KEK.GO.ID

INDONESIA SEZ

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

Hilirisasi untuk Indonesia Emas 2045

Sekretariat Jenderal Dewan Nasional
Kawasan Ekonomi Khusus
Republik Indonesia
Tahun 2024

LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS 2024



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KEPANGAN
MAKASAN ELEMENTAL INDUSTRIAL



DEWAN NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS

LAPORAN PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS TAHUN 2024

Pemegang Hak Cipta
Dewan Nasional Kawasan
Ekonomi Khusus

- **Diproduksi :**
  Dewan Nasional
  Kawasan Ekonomi Khusus
- **Pengarah :**
  Airlangga Hartarto
- **Penanggung Jawab :**
  Rizal Edwin Manansang
- **Penanggung Jawab Substansi :**
  Netty Muharni
  Paulus Riyanto
  Bambang Wijanarko
  Muksin
  Sunoto Setyo
- **Koordinator Teknis :**
  Noviar Iskandar
- **Penyusun :**
  Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi
  Sekretariat Jenderal
  Dewan Nasional KEK
- **Editor :**
  Novita Nugraningrum
  Dewi Arumsari
- **Penyusun Naskah :**
  Novita Nugraningrum
  Ike Nurjanah
  Firda Mawadah
  Atantya Wimbari
- **Penyusun Kreatif :**
  Firmansyah Pomalinggo
  Dhiemas Ridha Rizkiana
  Muhammad Abduh
  Alif Syariat Muhammad

Hak Cipta Dilindungi
Undang-undang

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024


SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 5
KATA PENGANTAR 6

21 **BAB I**
Instrumen Strategis Akselerasi Pembangunan WIlayah dan Memacu Pertumbuhan Ekonomi

31 **BAB II**
Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus

KEK MANUFAKTUR / INDUSTRI **32**
- KEK GRESIK 34
- KEK KENDAL 38
- KEK GALANG BATANG 42
- KEK SEI MANGKEI 46
- KEK ARUN LHOKSEUMAWE 50
- KEK BITUNG 54
- KEK PALU 58
- KEK MBTK (MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN) 62
- KEK MOROTAI 66
- KEK SORONG 70
- KEK TANJUNG SAUH 74
- KEK SETANGGA 78

KEK PARIWISATA **82**
- KEK MANDALIKA 84
- KEK LIDO 88
- KEK TANJUNG LESUNG 92
- KEK TANJUNG KELAYANG 96
- KEK LIKUPANG 100
- KEK KURA KURA BALI 104

KEK DIGITAL **108**
- KEK NONGSA 110
- KEK SINGHASARI 114

KEK JASA LAINNYA **118**
- KEK SANUR 120
- KEK BATAM AERO TECHNIC 124
- KEK EDUKASI, TEKNOLOGI, KESEHATAN INTERNASIONAL BANTEN 128
- KEK PARIWISATA DAN KESEHATAN INTERNASIONAL BATAM 132

137 **BAB III**
Usulan Kawasan Ekonomi Khusus

147 **BAB IV**
Kebutuhan Dukungan Kementerian/Lembaga

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

KATA PENGANTAR



Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional KEK

Kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dimulai sejak 2009 dan dalam satu dekade terakhir telah mengalami transformasi besar dalam pelaksanaannya. Pengembangan KEK merupakan bagian dari strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan wilayah, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pengembangan dan penguatan KEK difokuskan untuk menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Melihat keberhasilan pengembangan KEK, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan berbagai upaya yang sudah dilakukan dan menekankan peran penting KEK sebagai salah satu andalan pemerintah dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi 8%. KEK harus didorong untuk mendatangkan investasi sebanyak banyaknya, agar dapat memberikan dampak seluas-luasnya bagi masyarakat.

Kebijakan awal pengembangan KEK berorientasi pada akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah dan pemerataan pembangunan nasional melalui kegiatan industri dan pariwisata dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di sekitar kawasan. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, KEK juga didorong untuk mampu meningkatkan nilai tambah dengan mengembangkan sektor jasa yang mengarah pada penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

Hingga tahun 2024, sebanyak 24 KEK telah ditetapkan yang mencakup berbagai sektor, seperti industri, pariwisata, digital, kesehatan, pendidikan dan jasa lainnya. Berbagai KEK ini telah terbukti memberikan dampak secara ekonomi secara nasional maupun terhadap perekonomian daerah. Beberapa milestones yang menjadi capaian dan keberhasilan KEK pada tahun 2024 adalah:

1. Peresmian pabrik smelter tembaga dengan single line terbesar di dunia dengan kapasitas produksi hingga 17 juta ton konsentrat tembaga per tahun oleh Freeport Indonesia di KEK Gresik;
2. Dimulainya perkuliahan batch pertama di kampus cabang King's College London (KCL), di KEK Singhasari, Jawa Timur, yang mencatat sejarah dibidang pendidikan; dan
3. Beroperasinya 2 (dua) pelaku usaha yang memproduksi bahan baterai lithium yang akan mendukung ekosistem kendaraan listrik di KEK Kendal.

Diharapkan pembentukan KEK dapat mendukung upaya pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama wilayah yang belum berkembang di sekitar KEK. Kedepan, pengembangan KEK akan ditujukan pada upaya peningkatan ekspor dan substitusi impor, perbaikan neraca perdagangan, percepatan terwujudnya industri 4.0, serta pengembangan pusat-pusat ekonomi baru.

Kolaborasi dan dukungan yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan yaitu kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, pihak swasta, akademisi, dan masyarakat, menjadi faktor kunci dalam kesuksesan pengembangan KEK. Ke depan, KEK diharapkan mampu berkontribusi bagi pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kesejahteraan masyarakat secara luas.



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

KATA PENGANTAR



Rizal Edwin Manansang

Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK

Sejak pembentukannya di tahun 2009, KEK, dengan dukungan fasilitas fiskal dan non-fiskal yang ultimate, telah mengalami perkembangan cukup signifikan. Hingga tahun 2024, KEK berhasil mencatatkan akumulasi investasi sebesar Rp 263,4 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 160.874 orang dan melibatkan 403 pelaku usaha. Selama 2024 saja, investasi di KEK telah mencapai Rp 90,1 triliun, melebihi target yang telah ditetapkan (115%), dengan serapan tenaga kerja sebanyak 47.747 orang (122% dari target), serta penambahan 72 pelaku usaha baru.

Sekretariat Jenderal Dewan Nasional (Setdenas) KEK, yang memiliki tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Nasional KEK, memegang peranan penting dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi administrasi, guna memastikan tercapainya tujuan KEK, sebagaimana tercantum dalam pasal 10, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022, Tentang Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.

Berbagai upaya telah dilaksanakan Setdenas KEK dalam berkolaborasi dengan seluruh stakeholder terutama untuk mendatangkan investasi, diantaranya melalui fasilitasi penetapan strategi dan kebijakan umum KEK, pengkajian usulan dan rekomendasi pembentukan KEK, penetapan standar pengelolaan, penyelesaian permasalahan strategis, pemantauan dan evaluasi KEK, kerjasama investasi dengan mitra strategis, serta penyelenggaraan komunikasi publik yang efektif.

Untuk memberikan kejelasan, kepastian, dan kemudahan bagi investor, saat ini sedang dilakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2020, Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, yang diharapkan dapat mengakomodasi dinamika kondisi yang terjadi saat ini, mewujudkan regulasi yang lebih ramah investasi, serta memfasilitasi upaya pengembangan KEK yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Oleh karenanya, sejumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) telah disusun, seperti: 1) Pedoman Pengusulan Pembentukan KEK; 2) Pedoman Evaluasi Pembentukan KEK; 3) Petunjuk Teknis Penyusunan Pedoman Bangunan atau Estate Regulation; 4) Pedoman Pelaporan Perkembangan, Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan, dan Evaluasi Kesiapan Beroperasi KEK; 5) Pedoman Masterplan KEK; 6) Pedoman Penerbitan Tanda Pengenal Khusus Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK; 7) Pedoman Penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor di KEK; dan lain-lain.

Dengan berbagai upaya tersebut di atas, diharapkan KEK dapat meningkatkan daya saingnya secara global, sehingga mampu menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.

Terima kasih.

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

LAPORAN PERKEMBANGAN

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



INDUSTRI

PARIWISATA

DIGITAL

JASA TEMA LAINNYA

1. Tanjung Lesung

Kab. Pandeglang, Banten
(PP No. 26/2012 - Februari 2012)
Beroperasi Februari 2015

Kegiatan Utama:
Pariwisata

2. Sei Mangkei

Kab. Simalungun, Sumatera Utara
(PP No. 30/2012 - Februari 2012)
Beroperasi Januari 2015

Kegiatan Utama:
- Industri Pengolahan Kelapa Sawit
- Industri Pengolahan Karet
- Pariwisata
- Logistik

3. Palu

Kota Palu, Sulawesi Tengah
(PP No. 31/2014 - Mei 2014)
Beroperasi September 2017

Kegiatan Utama:
- Industri Logam Dasar
- Logistik

7. Maloy Batuta Trans Kalimantan

Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur
(PP No. 88/2014 - Oktober 2014)
Beroperasi April 2019

Kegiatan Utama:
- Industri Pengolahan Kelapa Sawit
- Industri Energi
- Industri Pengolahan Kayu
- Logistik

8. Tanjung Kelayang

Kab. Belitung, Kepulauan Bangka Belitung
(PP No. 6/2016 - Maret 2016)
Beroperasi Maret 2019

Kegiatan Utama:
Pariwisata

9. Sorong

Kab. Sorong, Papua Barat Daya
(PP No. 31/2016 - Agustus 2016)
Beroperasi Oktober 2019

Kegiatan Utama:
- Industri Pengolahan Nikel
- Industri Pengolahan Kelapa Sawit
- Industri Hasil Hutan dan Perkebunan (Sagu)
- Logistik

13. Likupang

Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara
(PP No. 84/2019 - Desember 2019)

Kegiatan Utama:
Pariwisata

14. Kendal

Kab. Kendal, Jawa Tengah
(PP No. 85/2019 - Desember 2019)
Beroperasi Mei 2021

Kegiatan Utama:
- Industri Tekstil dan Busana
- Industri Furnitur dan Alat Permainan
- Industri Makanan dan minuman
- Industri Otomotif
- Industri Elektronik
- Logistik

15. Batam Aero Technic

Kota Batam, Kepulauan Riau
(PP No. 67/2021 - Juni 2021)

Kegiatan Utama:
Industri MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) Pesawat

19. Sanur

Denpasar, Bali
(PP No. 41/2022 - November 2022)

Kegiatan Utama:
- Kesehatan
- Pariwisata

20. Kura Kura Bali

Denpasar, Bali
(PP No. 23/2023 - April 2023)

Kegiatan Utama:
- Pariwisata
- Industri Kreatif

21. Tanjung Sauh

Kota Batam, Kepulauan Riau
(PP No. 24/2024 - Mei 2024)

Kegiatan Utama:
- Produksi dan Pengolahan
- Logistik dan Distribusi
- Pengembangan Energi

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

SEBARAN
24 KAWASAN EKONOMI KHUSUS



4. Bitung

Kota Bitung, Sulawesi Utara
(PP No. 32/2014 - Mei 2014)
Beroperasi April 2019

Kegiatan Utama:
- Industri Pengolahan Kelapa
- Industri Pengolahan Perikanan
- Logistik

5. Morotai

Kab. Pulau Morotai, Maluku Utara
(PP No. 50/2014 - Juni 2014)
Beroperasi April 2019

Kegiatan Utama:
- Industri Pengolahan Perikanan
- Pariwisata
- Logistik

6. Mandalika

Kab. Lombok Tengah, NTB
(PP No. 52/2014 - Juni 2014)
Beroperasi Oktober 2017

Kegiatan Utama:
Pariwisata

10. Arun Lhokseumawe

Aceh Utara & Lhokseumawe, Aceh
(PP No. 5/2017 - Februari 2017)
Beroperasi Desember 2018

Kegiatan Utama:
- Industri Petrokimia dan Kimia Lainnya
- Logistik
- Industri Energi

11. Galang Batang

Kab. Bintan, Kepulauan Riau
(PP No. 25/2017 - Oktober 2017)
Beroperasi Desember 2018

Kegiatan Utama:
- Industri Pengolahan Bauksit
- Logistik

12. Singhasari

Kab. Malang, Jawa Timur
(PP No. 68/2019 - September 2019)

Kegiatan Utama:
- Pariwisata
- Pengembangan Teknologi

16. Nongsa

Kota Batam, Kepulauan Riau
(PP No. 68/2021 - Juni 2021)

Kegiatan Utama:
- Riset, Ekonomi Digital, dan Pengembangan Teknologi
- Pariwisata
- Pendidikan
- Industri Kreatif

17. Lido

Bogor, Jawa Barat
(PP No. 69/2021 - Juni 2021)

Kegiatan Utama:
- Pariwisata
- Industri Kreatif

18. Gresik

Kab. Gresik, Jawa Timur
(PP No. 71/2021 - Juni 2021)

Kegiatan Utama:
- Industri Metal
- Industri Elektronik
- Industri Kimia
- Industri Energi
- Logistik

22. Setangga

Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
(PP No. 26/2024 - Juni 2024)

Kegiatan Utama:
- Kawasan Industri
- Logistik dan Distribusi
- Pengembangan Energi

23. Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten

Kab Tangerang, Provinsi Banten
(PP No. 38/2024 - Oktober 2024)

Kegiatan Utama:
- Riset, Ekonomi Digital dan Pengembangan Teknologi
- Pendidikan
- Kesehatan
- Industri Kreatif

24. Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam

Kota Batam, Kepulauan Riau
(PP No. 39/2024 - Oktober 2024)

Kegiatan Utama:
- Pariwisata
- Kesehatan

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

LINI MASA 2024

JANUARI

FEBRUARI

Peresmian Coding Factory di KEK Singhasari

MARET

APRIL

Indonesia SEZ Business Forum in London

SEPTEMBER

- Peresmian Produksi Perdana Smelter PT Freeport Indonesia di KEK Gresik
- Usulan pembentukan 6 KEK baru, yakni KEK Industri Halal Sidoarjo, KEK Industri Kimia Kutai Timur, KEK Industri Petrokimia dan Elektronika Patimban, KEK Industri Teknologi Terpadu Subang, KEK Industropolis Batang, KEK Mangkupadi serta perluasan KEK Nongsa di Batam

OKTOBER

- Penetapan KEK Edukasi Teknologi dan Kesehatan Internasional Banten (ETKI Banten) dan KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam (PKIB)
- Peresmian Pabrik Anoda Baterai Lithium (PT LBM Energi Baru Indonesia) di KEK Kendal
- Inaugurasi Kelas Perdana Kampus Cabang King's College London di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari

NOVEMBER

DESEMBER

Indonesia SEZ Business Forum 2024 "Diversifying SEZ Business Opportunity, KEK 2.0: The Dawn of New Era"

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

MEI

Penetapan KEK Tanjung Sauh dan KEK Setangga

JUNI

- Kesiapan beroperasi KEK Kura Kura Bali
- Kesiapan beroperasi KEK Likupang

JULI

- Penyelenggaraan MotoGP 2024 di KEK Mandalika
- Penyampaian Hasil Capaian PSN dan KEK pada acara Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024

AGUSTUS

Peresmian Pabrik Anoda Baterai Lithium (PT Indonesia BTR New Energy Material) di KEK Kendal

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



KAWASAN EKONOMI KHUSUS DALAM ANGKA

Kumulatif hingga **Desember 2024**

Rp 263,4 T
Realisasi investasi di **KEK**

160.874
Penyerapan **tenaga kerja**

Rp 31,6 T
Realisasi investasi **Badan Usaha** tanpa APBN

Rp 231,8 T
Realisasi **Pelaku Usaha**

403
Jumlah **pelaku usaha** yang tergabung di KEK

5 KEK dengan **Investasi Kumulatif** Terbanyak hingga Desember 2024

KEK Gresik	Rp92,8 T
KEK Kendal	Rp86,57 T
KEK Galang Batang	Rp23,2 T
KEK Sei Mangkei	Rp20,19 T
KEK Nongsa	Rp5,76 T

Capaian Investasi masing-masing KEK (miliar Rupiah)

KEK Gresik	92.800,00
KEK Kendal	86.575,00
KEK Galang Batang	23.202,17
KEK Sei Mangkei	20.190,00
KEK Nongsa	5.762,38
KEK Mandalika	5.726,00
KEK Arun Lhokseumawe	5.563,59
KEK Lido	5.080,72
KEK Sanur	4.256,69
KEK Tanjung Lesung	2.648,13
KEK Singhasari	1.971,00
KEK Bitung	1.849,67
KEK Tanjung Kelayang	1.708,55
KEK Setangga	1.392,71



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

KEK Palu	1.190,89
KEK Batam Aero Technic	1.151,00
KEK Kura Kura Bali	795,90
KEK Morotai	575,37
KEK Likupang	523,91
KEK Sorong	280,20
KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	100,00
KEK Tanjung Sauh	39,98
KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten	0,00
KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam	0,00
TOTAL	**263.423,37**

SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



Capaian Serapan Tenaga Kerja Di KEK

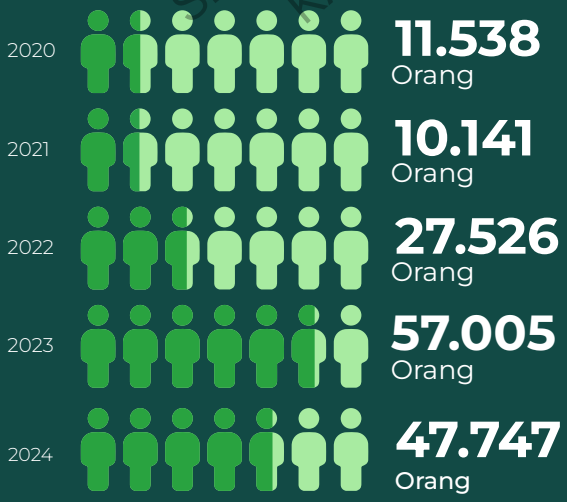

Capaian Investasi Di KEK

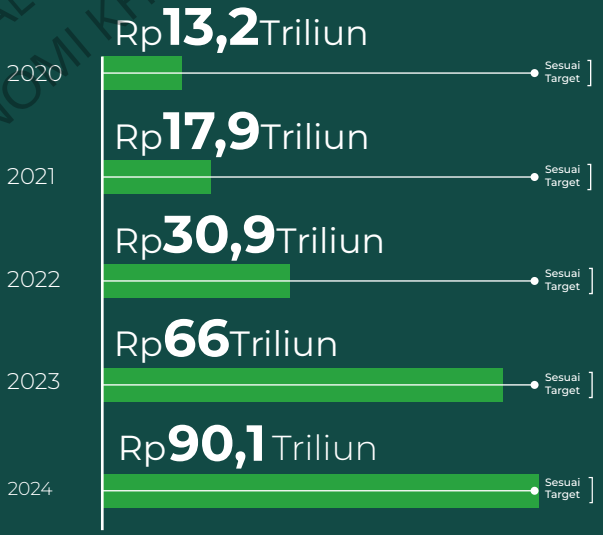



KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI TAHUN 2024

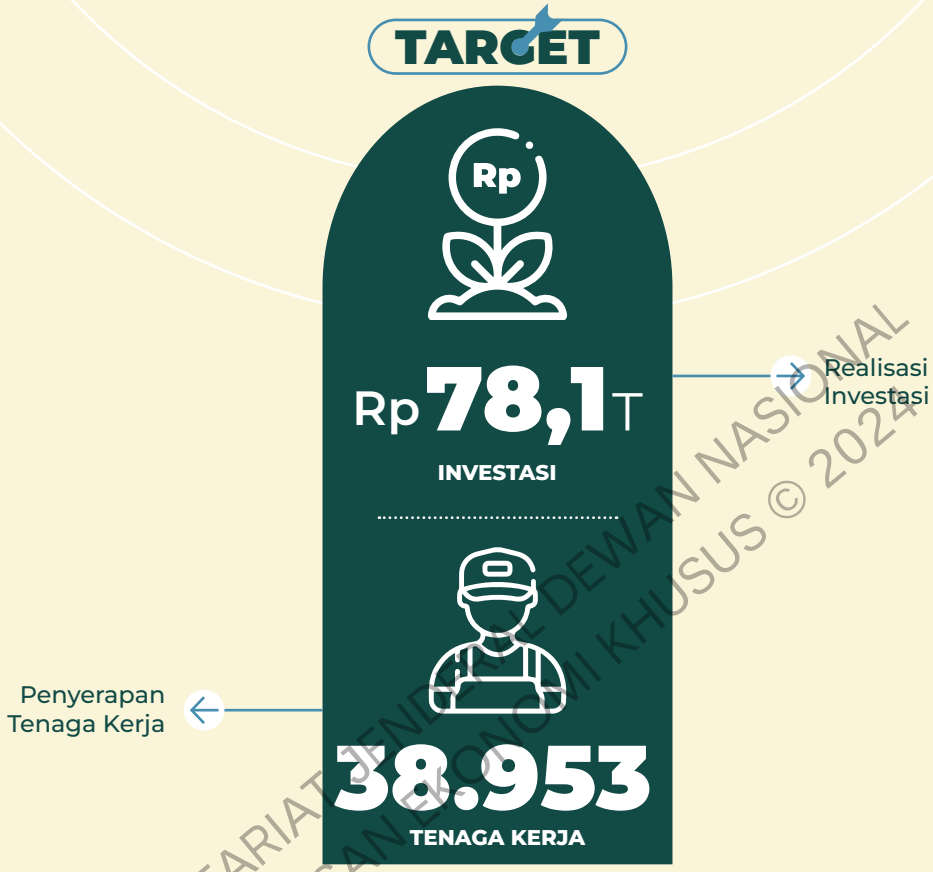

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

CAPAIAN TAHUN 2024

Realisasi investasi

Rp90,1T

Penyerapan tenaga kerja

47.747 ORANG

Pelaku usaha baru yang tergabung di KEK

72



NILAI EKSPOR SELURUH KEK

Rp21,78T

KEK GALANG BATANG	Rp 13,99T
KEK SEI MANGKEI	Rp 4,63T
KEK KENDAL	Rp 2,27T
KEK BITUNG	Rp 500,4M
KEK ARUN LHOKSEUMAWE	Rp 340M
KEK PALU	Rp 50,74M

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



KEK DENGAN CAPAIAN INVESTASI DI ATAS 100% DARI TARGET 2024

- KEK Sei Mangkei
- KEK Singhasari
- KEK Kendal
- KEK Nongsa
- KEK Lido
- KEK Sanur
- KEK Kura Kura Bali

KEK DENGAN SERAPAN TENAGA KERJA DI ATAS 100% DARI TARGET TAHUN 2024

- KEK Tanjung Lesung
- KEK Sei Mangkei
- KEK Mandalika
- KEK Kendal
- KEK Nongsa
- KEK Gresik
- KEK Batam Aero Technic
- KEK Kura Kura Bali

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

KEK DENGAN REALISASI INVESTASI TERBANYAK DI TAHUN 2024

KEK Kendal	**Rp42,7 T**
KEK Gresik	**Rp26,5 T**
KEK Sei Mangkei	**Rp5,6 T**
KEK Galang Batang	**Rp4,5 T**
KEK Nongsa	**Rp3 T**

KEK DENGAN SERAPAN TENAGA KERJA TERBANYAK DI TAHUN 2024

KEK Kendal	**17.635 Orang**
KEK Gresik	**7.656 Orang**
KEK Mandalika	**7.477 Orang**
KEK Sei Mangkei	**3.246 Orang**
KEK Tanjung Lesung	**2.261 Orang**



BAB



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

INSTRUMEN STRATEGIS AKSELERASI PEMBANGUNAN WILAYAH DAN MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI

KAWASAN EKONOMI KHUSUS : STRATEGI JITU INDONESIA DI TENGAH TANTANGAN EKONOMI GLOBAL

Tahun 2024, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia mencatat perkembangan yang signifikan.

Hilirisasi menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, strategi ini terbukti efektif memperkuat daya saing dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah juga terus mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sesuai amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009. KEK diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan menarik investasi dalam jumlah besar serta mempercepat proses industrialisasi agar menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing Indonesia dalam industri dan perdagangan global, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Awalnya, kebijakan pengembangan KEK berorientasi pada akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah dan pemerataan pembangunan nasional melalui kegiatan industri dan pariwisata dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di sekitar kawasan. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, KEK juga didorong untuk mampu meningkatkan nilai tambah dengan mengembangkan sektor jasa yang mengarah pada penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini diwujudkan dengan dibangunnya KEK Kesehatan, KEK Pendidikan, KEK Ekonomi Digital, dan KEK Maintenance, Repair and Overhaul. Pengembaangan industri Hijau juga menjadi prioritas dalam pengembangan KEK kedepan.

Saat ini tercatat 24 KEK di Indonesia, dan delapan KEK dalam tahap penetapan. Hingga 2024, KEK mencatatkan akumulasi investasi sebesar Rp263,4 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 160.874 orang dan melibatkan 403 pelaku usaha. Di tahun 2024 saja, investasi di KEK telah melebihi target yang telah ditetapkan, sebesar Rp90,1 triliun atau 115% dari target dengan serapan tenaga kerja sebanyak 47.747 orang atau 122% dari target, dan penambahan 72 pelaku usaha.
Perkembangan KEK di Indonesia terus menunjukkan progres yang signifikan. Pada tahun 2024, beberapa capaian penting yang diraih antara lain :

- **Peningkatan ekspor**
  Beberapa KEK seperti KEK Galang Batang, KEK Sei Mangkei, KEK Kendal, KEK Arun Lhokseumawe, KEK Bitung, dan KEK Palu telah menunjukkan peningkatan kinerja ekspor. KEK Galang Batang mencatatkan ekspor terbanyak, yaitu Rp13,99 triliun produk Smelter Grade Alumina, diikuti KEK Sei Mangkei senilai Rp4,63 triliun, dan KEK Kendal senilai Rp2,27 triliun. Secara keseluruhan, total nilai ekspor seluruh KEK tercatat sebesar Rp21,78 triliun.

- **Beroperasinya beberapa Perusahaan besar di KEK**
  Tahun 2024 mencatatkan beberapa *milestone* penting peresmian beberapa Perusahaan besar yang menjadi bagian dari rantai produk global, seperti peresmian ekspansi PT Unilever Oleochemical Indonesia di KEK Sei Mangkei, ekspansi PT Alliance Consumer Products Indonesia di KEK Sei Mangkei, PT Indonesia BTR New Energi di KEK Kendal, PT LBM Energi Baru Indonesia di KEK Kendal, PT Freeport Indonesia di KEK Gresik, serta Bali Beach Hotel, Bali Beach Convention, dan The Meru Sanur di KEK Sanur.

Secara keseluruhan, meskipun masih ada tantangan, perkembangan KEK selama 2024 menunjukkan potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024


INDONESIA
SEZ
DIVERSIFYING
SEZ
NESS
ORTUNITY
e Dawn of New
ponsored by :
jiipe
NONGSA
digITalpark
sinarmas land

ARAH PENGEMBANGAN KEK

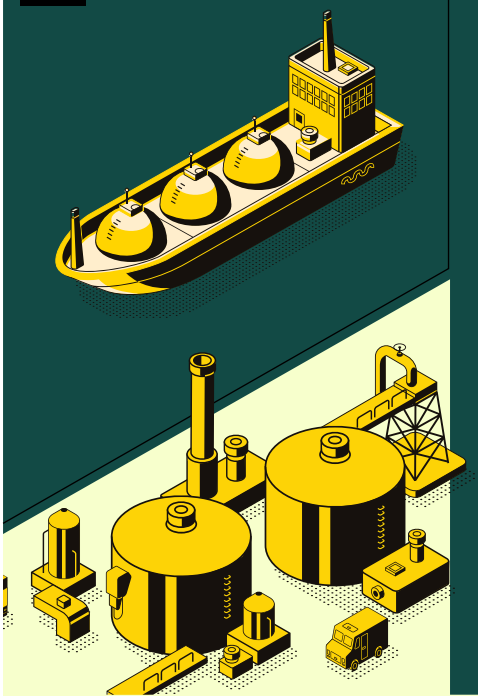

→ Meningkatkan Ekspor Dan Substitusi Impor

Industri yang memiliki daya saing ekspor (fashion, otomotif, furniture), dan merambah sektor industri halal (halal food, halal tourism, dll.).

→ Mempercepat Terwujudnya Industri 4.0

Industri manufaktur berbasis otomasi.

→ Pengembangan Wilayah yang Belum Berkembang

Pengolahan bahan mentah agar nilai tambahnya meningkat atau hilirisasi (pengolahan barang tambang dan pertanian).

→ Mempercepat Pengembangan Sektor Jasa/ Tersier

Industri teknologi informasi, jasa keuangan, jasa pendidikan, dan jasa medis.

→ Memperbaiki Neraca Perdagangan

Industri substitusi impor seperti industri kimia, permesinan, elektronik termasuk pengembangan sektor jasa yang selama ini menguras devisa, seperti sektor pendidikan dan kesehatan.

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS 2024

IMPLEMENTASI FASILITAS DAN KEMUDAHAN DI KEK

Implementasi fasilitas dan kemudahan di KEK menjadi salah satu faktor yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah realisasi investasi sepanjang tahun 2024, update dari pengajuan Tax Holiday dan Tax Allowance adalah sebagai berikut:

72

SK Tax Holiday/ Tax Allowance telah terbit.

17

SK Pemanfaatan Tax Holiday/Tax Allowance telah terbit

PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN

Struktur Dewan Nasional KEK telah diatur dalam Keputusan Presiden nomor 10 tahun 2022, terdiri dari berbagai Kementerian dan Lembaga untuk memudahkan koordinasi dan mengatasi berbagai hambatan yang ada. Hal ini penting agar setiap kendala yang muncul dapat diatasi dengan lebih cepat dan efisien, sehingga KEK bisa terus bergerak maju.

Untuk memastikan tugas Dewan Nasional KEK berjalan dengan baik, dibentuklah Sekretariat Jenderal Dewan Nasional yang bertugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Nasional. Sekretariat Jenderal ini berperan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022.

Struktur organisasi dari Dewan Nasional KEK, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, Dewan Kawasan, dan Administrator KEK ini disusun untuk mendukung kinerja dan koordinasi yang efektif dalam menjalankan berbagai tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan. Saat ini, sedang disusun sedang disusun perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 yang mengatur tentang Dewan Nasional, anggota Dewan Nasional KEK menyesuaikan susunan Kementerian/Lembaga pada Kabinet Merah Putih.

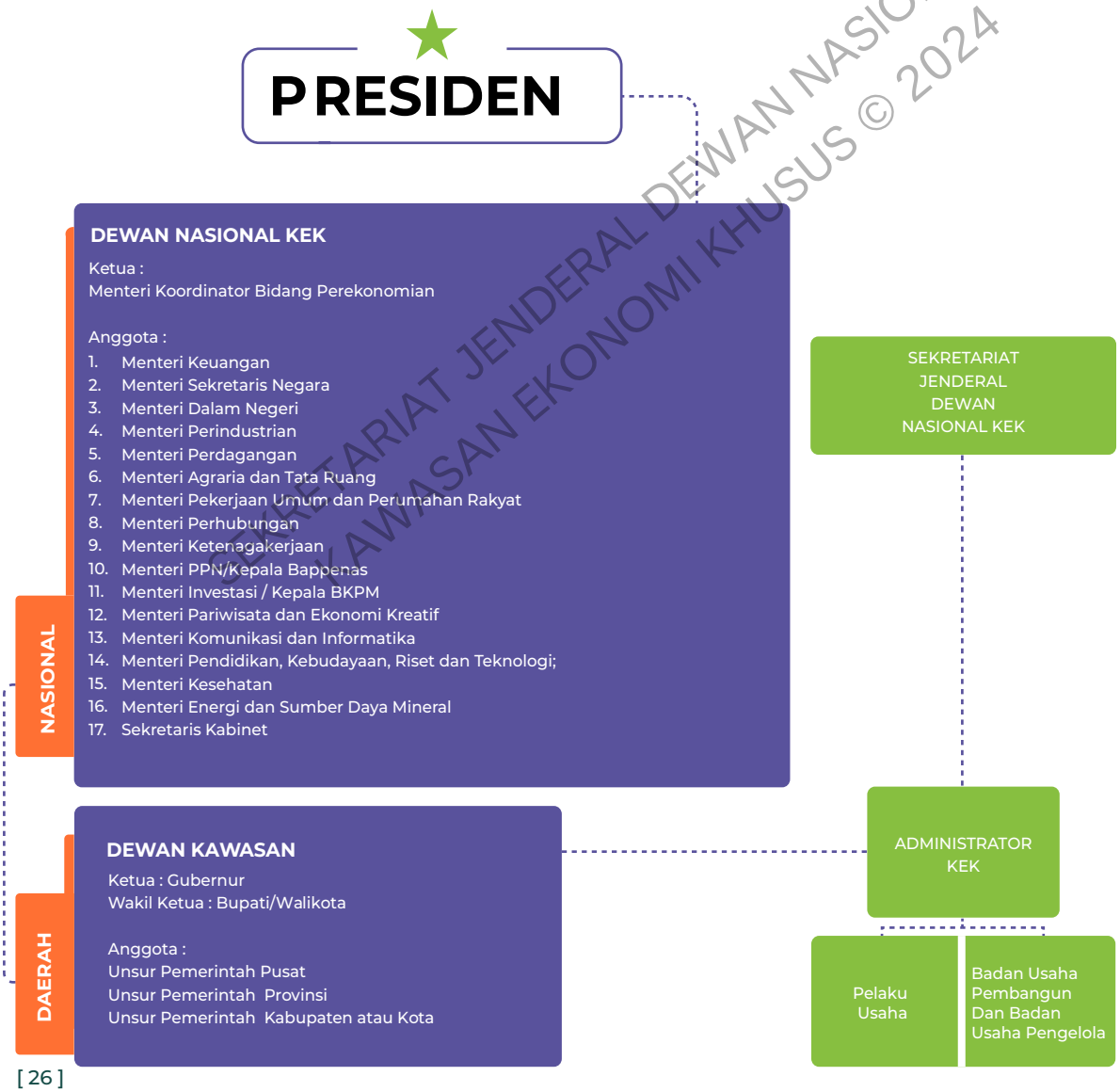

© 2024

PENERBITAN PERATURAN

Hingga akhir 2024, berbagai peraturan pelaksana untuk penyelenggaraan KEK telah diterbitkan. Peraturan-peraturan ini mencakup berbagai tingkatan, mulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, hingga Peraturan Menteri terkait.

NO.	PRODUK HUKUM	TAHUN
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Sauh	28 Mei 2024
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Setangga	13 Juni 2024
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten	7 Oktober 2024
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam	7 Oktober 2024
5.	Peraturan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengusulan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus	3 April 2024
6.	Peraturan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Kelengkapan dan Pengkajian Usulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus	3 April 2024
7.	Keputusan Ketua Dewan Nasional KEK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dalam rangka Penetapan Pengecualian Kebijakan dan Pengaturan	24 April 2024
8.	Keputusan Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dalam rangka Penetapan Pengecualian Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang di Kawasan Ekonomi Khusus terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan/atau Lingkungan Hidup	31 Mei 2024
9.	Keputusan Ketua Dewan Nasional KEK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan PT Dua Samudera Perkasa sebagai Badan Usaha Pembangun dan Badan Usaha Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Setangga	12 Juli 2024
10.	Keputusan Ketua Dewan Nasional KEK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penetapan PT Surya Inter Wisesa sebagai Badan Usaha Pembangun dan Badan Usaha Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten	11 Oktober 2024
11.	Keputusan Ketua Dewan Nasional KEK Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan PT Karunia Praja Pesona sebagai Badan Usaha Pembangun dan Badan Usaha Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam	11 Oktober 2024
12.	Keputusan Ketua Dewan Nasional KEK Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Masa Transisi Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam	11 Oktober 2024
13.	Keputusan Ketua Dewan Nasional KEK Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pembentukan Administrator KEK Tanjung Lesung, Administrator KEK Palu, Administrator KEK Bitung, Administrator KEK Morotai, Administrator KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, Administrator KEK Tanjung Kelayang, Administrator KEK Sorong, Administrator KEK Arun Lhokseumawe, Administrator KEK Singhasari, dan Administrator KEK Likupang	9 Desember 2024
14.	Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	7 Agustus 2024

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

NO.	PRODUK HUKUM	TAHUN
15.	Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kegiatan Utama Kawasan Ekonomi Khusus	9 Oktober 2024
16.	Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Nomor 34 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	31 Juli 2024
17.	Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengecualian Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang di Kawasan Ekonomi Khusus terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan/atau Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengecualian Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang di Kawasan Ekonomi Khusus terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan/atau Lingkungan Hidup	24 April 2024

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

POIN PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

- Penyesuaian definisi penanaman modal dengan UU Penanaman Modal;
- Memperjelas pengertian penguasaan tanah dalam dokumen pengusulan KEK;
- Pengaturan waktu pembentukan Administrator KEK;
- Penegasan fasilitas PPN dan PPnBM dalam transaksi pertanahan serta memperjelas cakupan barang modal di KEK;
- Pengaturan barang konsumsi di KEK Kesehatan, termasuk perlakuan terhadap obat-obatan, bahan medis habis pakal, dan alat kesehatan;
- Pengaturan fasilitas bagi kegiatan usaha Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) di KEK;
- Pengaturan terkait KEK hijau atau Green SEZ;
- Pengaturan terkait KEK yang berada di wilayah perairan;
- Pengaturan terkait pembebasan pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) bagi Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing untuk jabatan tertentu di KEK; dan
- Perlakuan bagi orang asing di KEK yang melakukan kegiatan start up. remote worker, serta fasilitas bagi tenaga ahli asing tertentu di KEK.
- Tambahan materi pengaturan kegiatan usaha family office di Indonesia termasuk fasilitas dan kemudahannya.



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL
KAWASAN TRANSMIGRASI © 2024

BAB 2



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS



“

KEK sebagai salah satu **instrumen strategis** dalam mencapai **pertumbuhan ekonomi 8%**

SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



KEK MANUFAKTUR

SEKRETARIAT TENDER NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

KEK GRESIK
Manufaktur

Badan Usaha :
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera

Landasan Hukum :
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2021

Beroperasi :
8 November 2022

Kegiatan Utama :
> Industri Metal
> Industri Kimia
> Industri Elektronik
> Industri Energi
> Industri Pendukung & Logistik

Okupansi Lahan :
- Total Luas Lahan : **2.167 Ha**
- Luas Lahan yang telah dikuasai : **1.668 Ha (76,9%)**
- Luas Lahan yang telah dimanfaatkan : **1.101,8 Ha (50,8% dari luas lahan sesuai PP)**
- Lahan yang terjual 373 ha
- Lahan yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur & fasilitas Kawasan Industri 193,8 ha
- Lahan siap bangun 220 ha
- Proses Pematangan Lahan 163 ha
- Pelabuhan 112 ha (sudah beroperasi), 40 ha proses reklamasi

Kabupaten Gresik
Provinsi Jawa Timur



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



Katalis Investasi, Penggerak Ekosistem Hilirisasi

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

01 Capaian Kumulatif

Realisasi Investasi :
Rp 92,8 T

Badan Usaha : **Rp 9,5 T**
Pelaku Usaha : **Rp 83,3 T**

Serapan Tenaga Kerja :
± 39.656 orang

Pelaku Usaha :
30

*data per **Desember 2024**

02 Capaian Tahun 2024

Realisasi Investasi :
Rp 26,5 T

Target **Investasi** 2024 **Rp 29,34 T**

90,3 %

100%

Serapan Tenaga Kerja :
7.656

Target Penyerapan **Tenaga Kerja** 2024 **1509**

>100%

100%

Pelaku Usaha Baru :
+ 7

*data per **Desember 2024**

KEK GRESIK : KATALIS INVESTASI, PENGGERAK EKOSISTEM HILIRISASI

KEK Gresik, yang terletak di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, menjadi salah satu proyek strategis nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri berteknologi tinggi. Kawasan ini ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021 dan mencakup area seluas 2.167 hektar. KEK ini resmi dioperasikan pada 8 November 2022 dan dikelola oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera.

Hingga tahun 2024 secara akumulatif KEK Gresik mencatatkan investasi sebesar Rp92,8 T dan menyerap tenaga kerja ± 39.656 orang serta 30 pelaku usaha. Pada tahun 2024, KEK ini menarik investasi Rp26,5 T dan berhasil melampaui target tenaga kerja dengan jumlah 7.656 orang serta penambahan 7 pelaku usaha sebagai investor.



Salah satu *anchor tenant* di KEK Gresik adalah PT Freeport Indonesia (PTFI), yang telah meresmikan produksi katoda tembaga perdana dari fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik pada 23 September 2024.

Dalam peresmian smelter tersebut, Presiden Joko Widodo memperkirakan penerimaan negara dari PTFI dapat menembus Rp80 triliun.

Smelter PTFI merupakan single line design pengolahan katoda tembaga terbesar di dunia yang akan memproses 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun, serta produk sampingan lumpur anoda yang dapat diproses lebih lanjut menghasilkan produk bernilai tinggi seperti emas dan perak murni batangan, logam golongan platina, asam sulfat, terak, gipsum, dan timbal. Hasil tembaga dari smelter ini akan menjadi salah satu bahan utama ekosistem kendaraan listrik *(electric vehicle ecosystem)*.

Pembangunan smelter Freeport Indonesia merupakan usaha Pemerintah untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri maju dengan mengolah sumber daya alam sendiri dan tidak eskpor bahan mentah sehingga akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar. Ini merupakan pelaksanaan dari gagasan dari hilirisasi yang merupakan fondasi ekonomi baru Indonesia.

Kehadiran PTFI diharapkan menjadi salah satu penarik dalam membentuk kawasan dengan ekosistem yang mendukung hilirisasi serta pembentukan energi terbarukan lainnya yang akan memberikan nilai tambah salah satunya melalui hasil tambang yang diproses di dalam negeri sebelum diekspor. Kawasan ini signifikan bagi perekonomian nasional melalui pencapaian target investasi sebesar $6,7 miliar, peningkatan nilai ekspor hingga $12,7 miliar per tahun, serta substitusi impor sebesar $9,05 miliar. Selain itu, KEK ini ditargetkan untuk menyerap 42 ribu tenaga kerja dalam lima tahun pertama operasionalnya, sehingga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal.



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

Pengembangan pendidikan vokasi di KEK Gresik menjadi salah satu fokus utama dalam membangun ekosistem industri yang kuat dan berkelanjutan.

Untuk implementasinya, KEK Gresik akan bekerja sama dengan berbagai institusi pendidikan untuk mendirikan pusat-pusat pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri setempat. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi di kawasan tersebut.

Dalam perjalanannya, masih ada beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan untuk pengembangan KEK Gresik dan semuanya terkait dengan dukungan infrastruktur dari pemerintah. Selain percepatan realisasi pelebaran Jalan Nasional Daendels menuju KEK Gresik sepanjang ±2,2 km dan pembangunan jembatan baru, percepatan dukungan APBN Pemerintah untuk pembangunan tol KLBM section Bunder-Manyar sepanjang ±9 km juga masih dinantikan.

Dengan fasilitas dan infrastruktur yang lengkap serta dukungan kebijakan pro-investasi, KEK Gresik memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Kehadiran PT Freeport Indonesia dan berbagai industri lainnya di KEK Gresik semakin memperkuat posisi kawasan ini sebagai hub industri strategis yang mendukung hilirisasi dan peningkatan ekspor nasional. Pemerintah terus mendorong pengembangan kawasan ini untuk memastikan bahwa KEK Gresik dapat menjadi pilar utama dalam peta ekonomi Indonesia yang semakin kompetitif dan berdaya saing tinggi di kancah internasional.

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



KEK KENDAL
Manufaktur

Badan Usaha :
PT Kawasan Industri Kendal

Landasan Hukum :
Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2019

Beroperasi :
24 Mei 2021

Kegiatan Utama :
> Industri Tekstil & Busana
> Industri Furnitur dan Alat Permainan
> Industri Makanan & Minuman
> Industri Otomotif
> Industri Elektronik
> Logistik

Okupansi Lahan :
> Total Luas Lahan : **1.000 Ha**
> Luas Lahan yang telah dikuasai : **925,59 Ha (92,59%)**
> Luas Lahan yang telah dimanfaatkan : **580 Ha (58% dari luas lahan sesuai PP)**



SEKRETARIAT DEWAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS



> **Magnet Investasi, Pemacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Nasional**

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

01 Capaian Kumulatif

Realisasi Investasi :
Rp 86,57 T
Badan Usaha : **Rp 5,3 T**
Pelaku Usaha : **Rp 81,27 T**

Serapan Tenaga Kerja :
61.984 orang

Pelaku Usaha :
117

*data per **Desember 2024**

02 Capaian Tahun 2024

Realisasi Investasi :
Rp 42,7 T
Rp 17,7 T
Target **Investasi** 2024
>100 %

Serapan Tenaga Kerja :
17.635
15.100
Target Penyerapan **Tenaga Kerja** 2024
>100 %

Pelaku Usaha Baru :
+ 19

*data per **Desember 2024**

KEK KENDAL : MAGNET INVESTASI, PEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DAN NASIONAL

KEK Kendal, yang berlokasi di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, merupakan salah satu proyek strategis nasional yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri. KEK ini resmi beroperasi pada 24 Mei 2021 dan mencakup area seluas 1.000 hektar, dengan fokus pada industri tekstil dan pakaian, otomotif, furnitur dan alat permainan, makanan dan minuman, serta logistik. Pengelolaan KEK Kendal dilakukan oleh PT Kawasan Industri Kendal.

Fasilitas *ultimate* yang diberikan kepada pelaku usaha, termasuk Pemberitahuan Jasa Kawasan Ekonomi Khusus (PJKEK) dan fasilitas *Masterlist* untuk penangguhan bea masuk, menjadi magnet yang kuat bagi investor.

Hingga Desember tahun 2024, Kawasan ini juga menjadi magnet bagi investasi asing dengan berhasil menarik investasi sebesar Rp65 triliun. KEK Kendal terus berkembang menjadi destinasi investasi global, menandakan tren positif dalam peningkatan ekspor produk olahan hasil industri di Jawa Tengah.



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS 2024

Hingga tahun 2024, KEK Kendal telah mengukir pencapaian luar biasa melampaui target investasi sebesar Rp86,57 T, penyerapan 61.984 orang dari 117 pelaku usaha.

Di periode tahun 2024, KEK Kendal mencatat investasi tambahan sebesar Rp42,7 triliun, menciptakan 17.635 lapangan pekerjaan baru dan menambah 19 pelaku usaha.

Ekspor dari kawasan ini mencapai Rp2,27 triliun. Hal ini merupakan bukti nyata KEK Kendal meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Pertumbuhan investasi di KEK Kendal adalah refleksi dari daya tariknya sebagai destinasi investasi yang menjanjikan, dengan peningkatan sebesar 340% sejak ditetapkan sebagai KEK.

KEK Kendal memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Melalui program *Link and Match*, KEK Kendal bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program ini memastikan lulusan vokasi dapat terserap di industri-industri yang ada, menciptakan tenaga kerja yang terampil dan kompeten.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan PT Kawasan Industri Kendal telah menandatangani berbagai kesepakatan untuk meningkatkan kualitas SDM, termasuk *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan beberapa pelaku usaha di KEK Kendal. pelaku usaha di KEK Kendal. Upaya ini mencakup rekrutmen bersama dan pemberian beasiswa, serta pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Pemerintah Kabupaten Kendal juga berkomitmen untuk menekan angka pengangguran melalui program relasi, rekrutmen, dan pelatihan siap kerja. Sinergi antara berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja yang terampil dan kompeten untuk mengelola kawasan ini.

Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk kemajuan KEK Kendal. Pemenuhan suplai dan keandalan listrik kawasan, percepatan penanganan abrasi, penerbitan peraturan pelaksana Peraturan Daerah terkait insentif menjadi tantangan yang sedang dihadapi. Kementerian dan lembaga terkait berupaya untuk merealisasikan hal tersebut.

Dengan fasilitas lengkap dan kebijakan pro-investasi, KEK Kendal memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Kawasan ini terus menarik perhatian investasi global dan berperan penting dalam meningkatkan daya saing industri nasional, membentuk fondasi yang kokoh untuk Indonesia yang lebih maju.

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



KEK GALANG BATANG

Manufaktur

Badan Usaha :
PT GBKEK Industri Park

Landasan Hukum :
PP No. 42 Tahun 2017

Beroperasi :
8 Desember 2018

Kegiatan Utama :
> Industri Pengolahan Bauksit
> Logistik

Okupansi Lahan :
> TOTAL LUAS LAHAN : **2.333,6 ha**
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIKUASAI : **2.000 ha (85,70%)**
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIMANFAATKAN : **1.238 ha (53,05% dari luas lahan sesuai PP)**

Kabupaten Bitan
Provinsi Kepulauan Riau



SEKRETARIAT TENDER KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

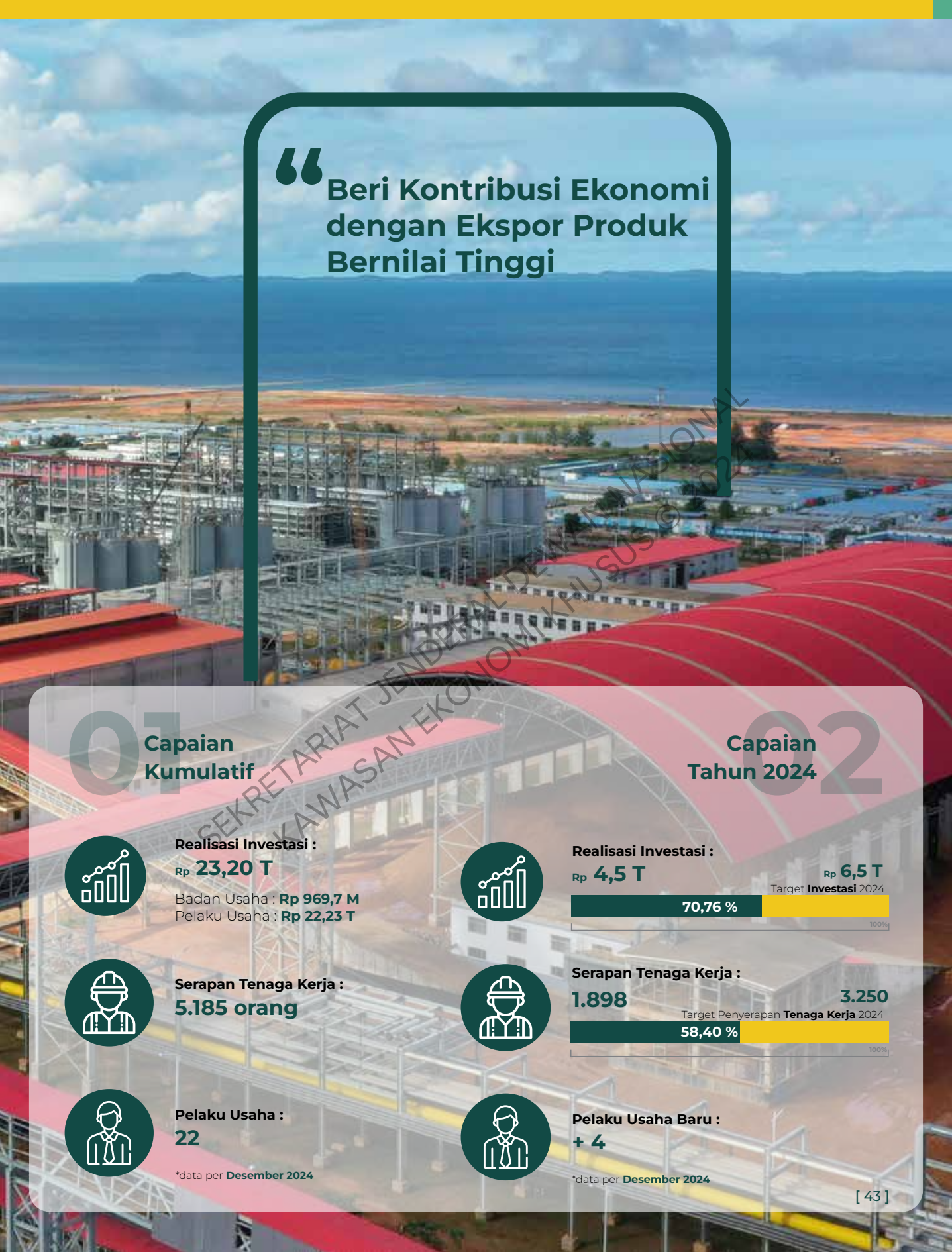

“Beri Kontribusi Ekonomi dengan Ekspor Produk Bernilai Tinggi

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

01 Capaian Kumulatif

Realisasi Investasi :
Rp **23,20 T**
Badan Usaha : **Rp 969,7 M**
Pelaku Usaha : **Rp 22,23 T**

Serapan Tenaga Kerja :
5.185 orang

Pelaku Usaha :
22

*data per **Desember 2024**

02 Capaian Tahun 2024

Realisasi Investasi :
Rp **4,5 T**
Rp **6,5 T**
Target **Investasi** 2024
70,76 %
100%

Serapan Tenaga Kerja :
1.898
3.250
Target Penyerapan **Tenaga Kerja** 2024
58,40 %
100%

Pelaku Usaha Baru :
+ 4

*data per **Desember 2024**

KEK GALANG BATANG : BERI KONTRIBUSI EKONOMI DENGAN EKSPOR PRODUK BERNILAI TINGGI

KEK Galang Batang, yang terletak di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, merupakan salah satu inisiatif penting dalam mengembangkan industri pengolahan mineral di Indonesia. Ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017, KEK ini mencakup area seluas 2.333,6 hektar dan resmi beroperasi pada 8 Desember 2018.

Kawasan KEK Galang Batang tumbuh menjadi sentra industri pengolahan mineral hasil tambang (bauksit) dan produk turunannya, baik dari refinery maupun proses smelter. Bahkan keberhasilan dalam memproduksi dan mengekspor alumina, membuat KEK Galang Batang menjadi primadona investasi di Indonesia.

Hingga tahun 2024, KEK Galang Batang telah mencatatkan investasi sebesar Rp23,20 triliun, menciptakan lapangan kerja bagi 5.185 orang, dan menarik 22 pelaku usaha. Pada tahun 2024, investasi tambahan sebesar Rp4,5 triliun berhasil dicapai, menyerap 1.898 tenaga kerja baru, serta menarik 4 pelaku usaha baru.

Pada tahun 2024, KEK Galang Batang menunjukkan performa ekspor yang cemerlang. Kawasan ini berhasil mengekspor Smelter Grade Alumina (SGA) senilai Rp13,99 triliun, sebuah bukti nyata dari kemampuan kawasan ini dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional melalui ekspor produk bernilai tambah tinggi.





Lokasi strategis KEK Galang Batang di Pulau Bintan menjadikannya sebagai simpul penting dalam rantai pasok industri global. Kawasan ini diharapkan mampu berintegrasi dengan baik ke dalam rantai pasok global, mengoptimalkan logistik modern yang ramah lingkungan, dan menarik minat investor dari seluruh dunia.

Pemerintah pusat terus mendukung pengembangan KEK Galang Batang dengan berbagai inisiatif, termasuk pembangunan infrastruktur penunjang seperti waduk berkapasitas besar untuk memenuhi kebutuhan air industri. Fasilitas ini diharapkan dapat mendukung operasional industri di kawasan tersebut secara optimal.

Pengembangan pendidikan vokasi juga menjadi perhatian utama di KEK Galang Batang. Pemerintah mendukung pendirian politeknik dan program pelatihan keterampilan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri di kawasan ini, memastikan bahwa tenaga kerja lokal memiliki keterampilan yang sesuai dan siap kerja.

Dengan terserapnya tenaga kerja di KEK Galang Batang, tingkat pengangguran di Kabupaten Bintan mengalami penurunan signifikan. Pemerintah Kabupaten Bintan bekerja sama dengan PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) menyelenggarakan berbagai job fair yang telah membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Selain itu, KEK Galang Batang juga berdampak positif pada peningkatan pendapatan usaha mikro kecil di sekitar kawasan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

Kawasan ini menerapkan standar tinggi dalam pengelolaan lingkungan, memastikan bahwa aktivitas industri tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berkelanjutan secara ekologis.

Untuk mempercepat pergerakan KEK Galang Batang masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mulai dari perubahan peraturan yang dapat mendukung iklim investasi, mengakomodir insentif dan retribusi daerah serta penyelesaian perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.



SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

KEK SEI MANGKEI

Manufaktur

Badan Usaha :
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Landasan Hukum :
PP No. 29 Tahun 2012

Beroperasi :
27 Januari 2015

Kegiatan Utama :
> Industri Kelapa Sawit
> Industri Karet
> Pariwisata
> Logistik

Okupansi Lahan :
> TOTAL LUAS LAHAN : **2.002,70 ha**
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIKUASAI : **1.933,80 ha (96,56%)**
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIMANFAATKAN : **507,68 ha (25,35% dari luas lahan sesuai PP)**

Kabupaten Simalungun
Provinsi Sumatera Utara



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS 2024



Titik Tumbuh Industri Hijau di Sumatera Utara

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

01 Capaian Kumulatif

Realisasi Investasi :
Rp **20,19 T**
Badan Usaha : **Rp 2,61 T**
Pelaku Usaha : **Rp 17,58 T**

Serapan Tenaga Kerja :
5.612 orang

Pelaku Usaha :
25

*data per **Desember 2024**

02 Capaian Tahun 2024

Realisasi Investasi :
Rp **5,61 T**
Rp **5,31 T**
Target **Investasi** 2024
>100 %
100%

Serapan Tenaga Kerja :
3.246
1.200
Target Penyerapan **Tenaga Kerja** 2024
>100 %
100%

Pelaku Usaha Baru :
+ 2

*data per **Desember 2024**

KEK SEI MANGKEI : TITIK TUMBUH INDUSTRI HIJAU DI SUMATERA UTARA

KEK Sei Mangkei, yang terletak di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, telah menjadi pusat pengembangan industri yang signifikan di Indonesia. Ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012, KEK ini memiliki luas area 2.002,70 hektar dan telah beroperasi sejak Januari 2015. Fokus utama KEK ini adalah industri kelapa sawit, industri karet, pariwisata, dan logistik, dengan pengelolaan oleh PT Perkebunan Nusantara III dan PT Kawasan Industri Nusantara (KINRA).

Hingga tahun 2024, KEK Sei Mangkei telah mencatatkan investasi senilai Rp20,19 triliun, menciptakan lapangan kerja bagi 5.612 orang, dan menarik 25 pelaku usaha baru. Pada periode 2024, tambahan investasi sebesar Rp5,61 triliun berhasil dicapai, menyerap 3.246 tenaga kerja baru, serta menarik 2 pelaku usaha baru.



Salah satu pencapaian signifikan di tahun 2024 adalah keberhasilan KEK Sei Mangkei menggaet perusahaan oleochemical ternama dari Jerman, PT Emery. Bersama PT Unilever Oleochemical Indonesia (UOI) dan PT Evyap Sabun Indonesia, mereka akan membangun ekosistem oleokimia berstandar internasional di kawasan ini. Salah satu *anchor tenant* di KEK Sei Mangkei, PT UOI melakukan *groundbreaking* proyek KernelMax bagian dari Projek Marvel 3 atau Projek ke-5 PT UOI dengan proyeksi investasi sebesar USD 20 juta.

PT UOI merupakan *anchor tenant* yang telah berinvestasi di KEK Sei Mangkei sejak tahun 2015 dan mencatatkan kontribusi investasi terbesar, senilai Rp6,7 triliun.

Selain itu, PT Alliance Consumer Products Indonesia telah melakukan inaugurasi proyek Veda-3 yang akan menjadi gerbang masuk rencana investasi sebesar USD 24 juta pada tahun 2025. Hal ini menjadi momen penting dalam memperkuat daya saing KEK Sei Mangkei sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia.

Pemerintah pusat terus mendukung pengembangan KEK Sei Mangkei dengan berbagai inisiatif, termasuk pembangunan infrastruktur penunjang seperti waduk dengan kapasitas besar untuk memenuhi kebutuhan air industri. Infrastruktur pendukung lainnya adalah jalur kereta api barang yang menghubungkan Sei Mangkei dengan Pelabuhan Kuala Tanjung dan Belawan, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi logistik dan distribusi barang.



KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara merupakan lokasi terbaik di Asia untuk pabrik ester. Pembeda utama seperti ketersediaan dan harga bahan baku, pembebasan pajak, harga tanah yang kompetitif, prosedur otorisasi yang sederhana, sinergi Oleokimia di lokasi, dan kedekatannya dengan Medan, dua pelabuhan dalam jarak 1,5 jam berkendara, serta dukungan yang sangat baik dari manajemen kawasan KINRA.

Testimoni tersebut disampaikan Dr. Thomas R. Hoffmann, Regional Business Director Emery Oleochemicals GmbH, dalam acara business dinner bersama pelaku usaha di Berlin, Jerman pada 6 Mei 2024.

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

Komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan juga tercermin dalam berbagai proyek di KEK Sei Mangkei. Kawasan ini menerapkan standar tinggi dalam pengelolaan lingkungan, memastikan bahwa aktivitas industri tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berkelanjutan secara ekologis. PT KINRA mendukung industri di kawasan menerapkan green and clean energy.

Pengembangan ekosistem kelapa sawit di KEK Sei Mangkei sejalan dengan program hilirisasi yang menjadi program prioritas pemerintah, sebagai upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dalam lima tahun.

Hilirisasi akan menciptakan nilai tambah sumber daya alam yang selama ini lebih banyak diekspor sebagai bahan mentah, sehingga akan menambah kekuatan ekonomi Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penambahan pendapatan negara dan penciptaan tenaga kerja di dalam negeri

Hadirnya KEK Sei Mangkei adalah oase investasi yang menguntungkan dan siap berkontribusi bagi kemajuan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia



SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

KEK ARUN LHOKSEUMAWE

Manufaktur

Badan Usaha :
PT. Patriot Nusantara Aceh

Landasan Hukum :
PP No. 5 Tahun 2017

Beroperasi :
14 Desember 2018

Kegiatan Utama :
> Industri Energi
> Industri Petrokimia dan Kimia Lainnya
> Industri Pengolahan Kelapa Sawit
> Industri Pengolahan Kayu
> Logistik

Okupansi Lahan :
> TOTAL LUAS LAHAN : **2.622,48 ha**
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIKUASAI : **2.158,44 ha (82,31%)**
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIMANFAATKAN : **546 ha (20,82% dari luas lahan sesuai PP)**

Kabupaten Aceh Utara &
Kota Lhokseumawe
Provinsi Aceh



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



> **Membangun KEK Hijau di Ujung Barat Indonesia**

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

01 Capaian Kumulatif

Realisasi Investasi :
Rp 5,56 T
Badan Usaha : **Rp 15,26 M**
Pelaku Usaha : **Rp 5,54 T**

Serapan Tenaga Kerja :
1.806 orang

Pelaku Usaha :
6

*data per **Desember 2024**

02 Capaian Tahun 2024

Realisasi Investasi :
Rp 560,5 M
Rp 786 M
Target **Investasi** 2024
71,3 %
100%

Serapan Tenaga Kerja :
109
315
Target Penyerapan **Tenaga Kerja** 2024
34,6 %
100%

Pelaku Usaha Baru :
0

*data per **Desember 2024**

KEK ARUN LHOKSEUMAWE : MEMBANGUN KEK HIJAU DI UJUNG BARAT INDONESIA

KEK Arun Lhokseumawe berlokasi di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. KEK ini ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 dan memiliki luas area 2.622,48 hektar. KEK dengan kegiatan usaha industri energi, petrokimia, dan kimia lainnya ini telah resmi beroperasi sebagai KEK pada 14 Desember 2018. BUPP KEK Arun Lhokseumawe adalah PT Patriot Nusantara Aceh.

Hingga tahun 2024, KEK Arun Lhokseumawe telah mencatatkan investasi senilai Rp,5,5 triliun, menciptakan lapangan kerja bagi 1.806 orang, dan menarik 6 pelaku usaha baru. Pada periode 2024, tambahan investasi sebesar Rp560,5 miliar berhasil dicapai, menyerap 109 tenaga kerja baru, diiringi ekspor senilai Rp340 miliar.

Proyek revitalisasi pabrik H2O2 milik PT PIM, eksplorasi gas alam dan minyak bumi oleh PT Pema Global Energi, serta revitalisasi tangki kondensat dan LNG oleh PT Pembangunan Aceh dan PT Perta Arun Gas adalah beberapa dari banyak langkah strategis.

Terletak di jalur strategis Selat Malaka, KEK Arun Lhokseumawe diharapkan memanfaatkan keunggulan komparatifnya dalam jaringan produksi global. Konsorsium perusahaan besar seperti PT Pertamina, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pelindo 1, dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) diharapkan sebagai tulang punggung di KEK Arun Lhokseumawe.

Presiden Joko Widodo menargetkan KEK ini menjadi kawasan industri hijau, dengan fokus pada pengembangan energi bersih seperti biomethane, blue ammonia, dan green ammonia. Pemerintah pusat telah mengucurkan dana Rp1,7 triliun untuk revitalisasi pabrik pupuk NPK, sebagai bukti nyata komitmen mereka.

Namun, tantangan tetap ada dan harus dihadapi. Kajian Kelayakan Pengembangan Bisnis dan Pendampingan Implementasi Model Bisnis PT Patriot Nusantara Aceh masih terus didorong.

Di balik semua tantangan, dampak positif KEK Arun Lhokseumawe mulai terasa. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi bukti nyata, dengan IPM Kota Lhokseumawe meningkat dari 78,92 pada 2023 menjadi 79,55 pada 2024, dan IPM Kabupaten Aceh Utara naik dari 70,87 menjadi 71,70 di periode yang sama

PJ. Gubernur Aceh telah berkomunikasi dengan gubernur terpilih, H. Muzakir Manaf, untuk memastikan kesinambungan komitmen dukungan terhadap pengembangan KEK Arun Lhokseumawe.

KEK Arun Lhokseumawe dapat menjadi KEK Hijau pertama di Indonesia. Konsep KEK Hijau ini sangat penting, mengingat kawasan ini memiliki potensi besar untuk menjadi contoh pengembangan kawasan ekonomi yang ramah lingkungan.

Dukungan penuh dari Pemerintah Aceh dan Dewan Nasional KEK diharapkan mampu menjadikan KEK Arun Lhokseumawe sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi di Aceh. Selain membuka peluang investasi, kawasan ini juga diproyeksikan menciptakan ribuan lapangan kerja baru.

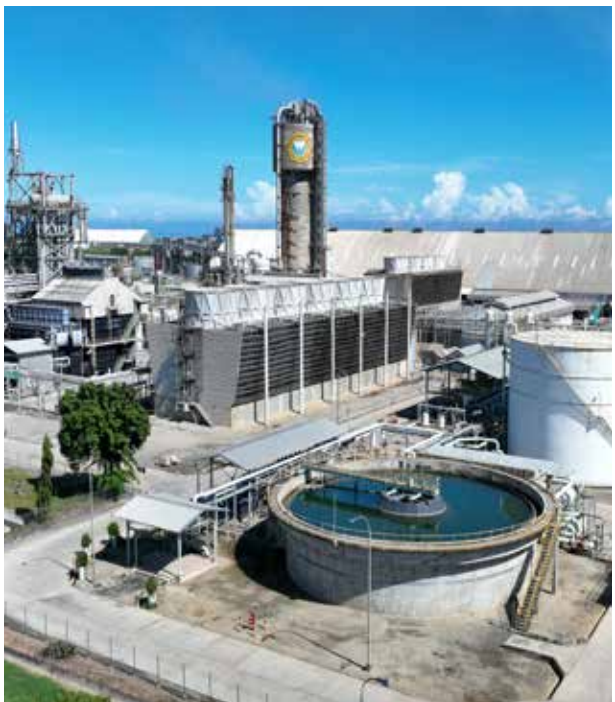

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



KEK BITUNG
Manufaktur

Badan Usaha :
PT Membangun Sulut Hebat

Landasan Hukum :
PP No. 32 Tahun 2014

Beroperasi :
1 April 2019

Kegiatan Utama :
> Industri Pengolahan Kelapa
> Industri Pengolahan Perikanan
> Perikanan
> Logistik

Okupansi Lahan :
> TOTAL LUAS LAHAN : **534 ha**
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIKUASAI : **108,92 ha (20,4%)**
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIMANFAATKAN : **20,23 ha (3,79% dari luas lahan sesuai PP)**

Kota Bitung
Provinsi Sulawesi Utara

DIPERTAHAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KEWASPAPAN EKONOMI KHUSUS 2024



“Tumbuhkan Ekonomi, di Pulau Sulawesi

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

01 Capaian Kumulatif

Realisasi Investasi :
Rp 1,84 T
Badan Usaha : **Rp 0**
Pelaku Usaha : **Rp 1,84 T**

Serapan Tenaga Kerja :
988 orang

Pelaku Usaha :
14

*data per **Desember 2024**

02 Capaian Tahun 2024

Realisasi Investasi :
Rp 171,5 M
Rp 1,63 T
Target **Investasi** 2024
10,4 %
100%

Serapan Tenaga Kerja :
471
720
Target Penyerapan **Tenaga Kerja** 2024
65,4 %
100%

Pelaku Usaha Baru :
+5

*data per **Desember 2024**

KEK BITUNG : TUMBUHKAN EKONOMI, DI PULAU SULAWESI

KEK Bitung, terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014, KEK Bitung mencakup area seluas 534 hektar dan berfokus pada industri pengolahan perikanan, pengolahan kelapa, dan logistik. Kawasan ini resmi beroperasi pada tanggal 1 April 2019, setelah diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Secara akumulatif hingga tahun 2024, KEK Bitung berhasil mencapai investasi sebesar Rp1,84 T dengan penciptaan lapangan kerja 988 orang melalui 14 pelaku usaha. Pada periode tahun 2024, KEK Bitung berhasil menarik investasi Rp171,5 miliar, menciptakan 471 tenaga kerja dan 5 pelaku usaha baru.

KEK Bitung memiliki keunggulan lokasi dalam pengembangan kawasan ekonomi karena terletak pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 3 yaitu jalur laut internasional yang melewati Laut Banda.

Ini menjadikan KEK Bitung sebagai pusat logistik Indonesia Timur dalam Sistem Logistik Nasional karena keberadaan pelabuhan kontainer dan pelabuhan perikanan, serta dukungan komoditas unggulan KEK Bitung. Selain itu, kebijakan pemerintah RI yang memindahkan pelabuhan impor ke sejumlah wilayah di Indonesia Bagian Timur sebagai program prioritas Kementerian Perindustrian cukup mendongkrak animo para investoruntuk mencari lokasi terdekat dengan fasilitas dan kemudahan yang *ultimate*.





Dalam perkembangannya, pembangunan fisik dalam KEK Bitung sampai saat ini masih dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keterbatasan ini dikarenakan PT Membangun Sulut Hebat selaku BUPP KEK Bitung tidak mendapatkan penyertaan modal dari Pemprov Sulawesi Utara. Perkembangan dan kemajuan KEK Bitung saat ini lebih terfokus kepada kemajuan investasi di luar lahan milik pemerintah seluas 92,79 Ha.

Ada beberapa hal yang perlu diselesaikan untuk mempermulus jalan KEK Bitung, antara lain penyertaan modal dari Pemprov Sulawesi Utara yang diharapkan dapat membantu BUPP mengelola lahan secara langsung. Selain itu, infrastruktur dalam kawasan memerlukan perbaikan, seperti pelebaran jalan untuk memuluskan manuver kontainer dan penyelesaian masalah jalur kontainer yang masih menggunakan jalan pemukiman penduduk.

Masyarakat setempat berharap agar lebih banyak tenant KEK hadir untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Penambahan jumlah pelaku usaha diharapkan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

Tumbuhnya UMKM di sekitar Kawasan juga menjadi salah satu indikator positif KEK Bitung. UMKM lokal mengalami perkembangan pesat dengan adanya KEK, yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk memulai dan mengembangkan usaha mereka. Dukungan pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berbagai inisiatif lainnya turut membantu UMKM meningkatkan daya saing dan kontribusi terhadap ekonomi lokal.

Pendapatan masyarakat di sekitar KEK Bitung meningkat melalui transaksi jual-beli lahan. Banyak warga memanfaatkan kesempatan ini untuk menjual atau menyewakan lahan mereka kepada para investor dan pelaku usaha, sehingga meningkatkan pendapatan mereka dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Pengolahan kelapa dan perikanan yang menjadi fokus utama KEK Bitung memberikan peluang bagi petani dan nelayan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan mereka. Kolaborasi dengan industri pengolahan dan dukungan pemerintah melalui pelatihan dan penyediaan fasilitas turut membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.

Dengan berbagai upaya dan strategi yang dilakukan, KEK Bitung diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian regional dan nasional. Dukungan dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan dan perkembangan KEK Bitung.

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



KEK PALU
Manufaktur

Badan Usaha :
PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah

Landasan Hukum :
PP No. 31 Tahun 2014

Beroperasi :
27 September 2017

Kegiatan Utama :
> Industri Logam Dasar
> Logistik

Okupansi Lahan :
> TOTAL LUAS LAHAN : **1.500 ha**
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIKUASAI :
946,89 ha (63,126%)
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIMANFAATKAN :
142,69 ha (9,51% dari luas lahan sesuai PP)

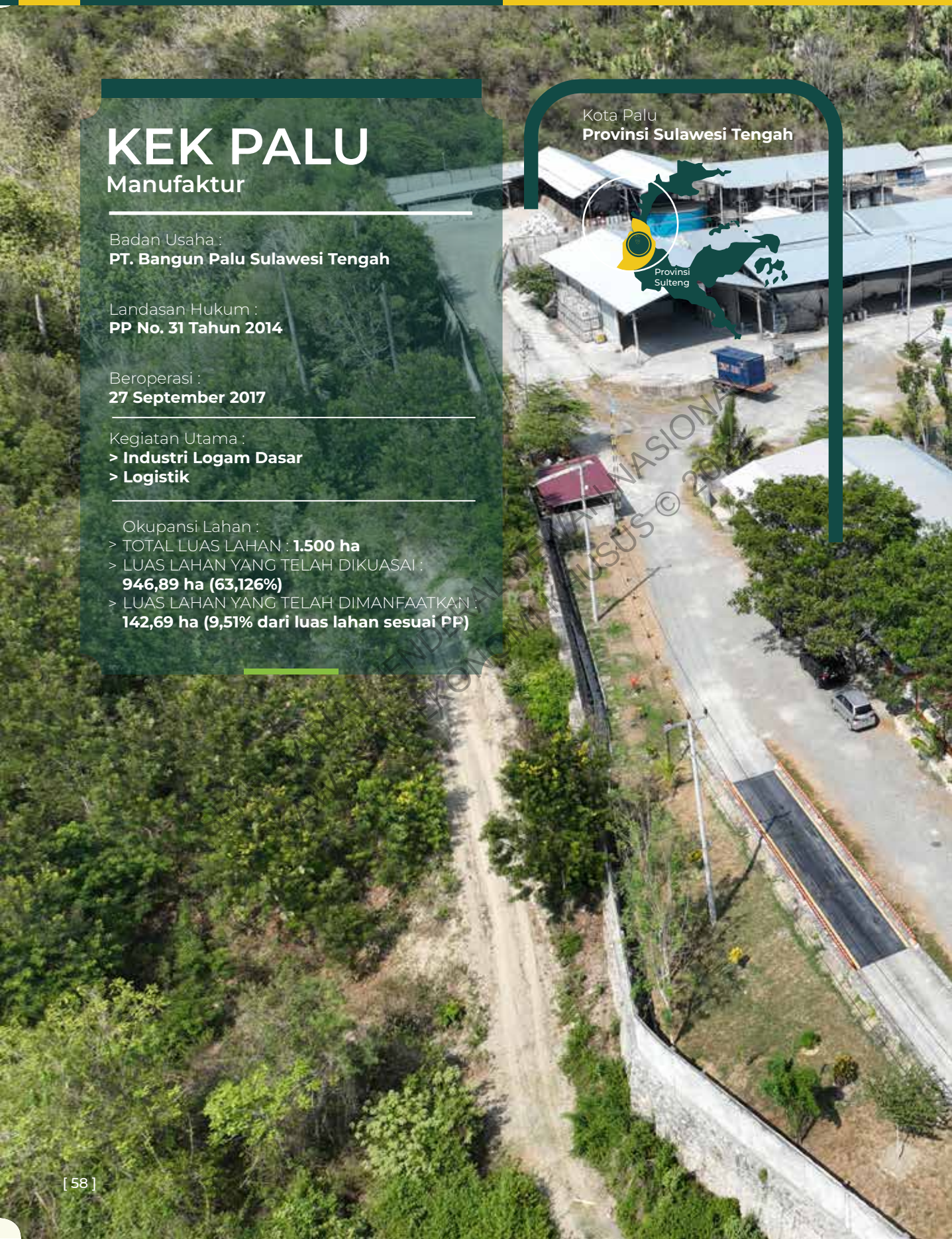

DOKUMENTASI PENDIDIKAN DEWAN NASIONAL
KEBIJAKAN EKONOMI KHUSUS © 202



> **Membangun Masa Depan Industri Logam Dan Logistik Di Sulawesi Tengah**

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

01 Capaian Kumulatif

Realisasi Investasi :
Rp **1,19 T**

Badan Usaha : **Rp 33 M**
Pelaku Usaha : **Rp 1,157 T**

Serapan Tenaga Kerja :
643 orang

Pelaku Usaha :
45

*data per **Desember 2024**

02 Capaian Tahun 2024

Realisasi Investasi :
Rp **132 M**

Rp **2,10 T**
Target **Investasi** 2024

6,27 %

100%

Serapan Tenaga Kerja :
317

1.050
Target Penyerapan **Tenaga Kerja** 2024

30,19 %

100%

Pelaku Usaha Baru :
+2

*data per **Desember 2024**

KEK PALU : MEMBANGUN MASA DEPAN INDUSTRI LOGAM DAN LOGISTIK DI SULAWESI TENGAH

Terletak di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, KEK Palu, merupakan salah satu kawasan strategis yang ditujukan untuk pengembangan industri logam dasar dan logistik. Ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014, kawasan ini mencakup area seluas 1.500 hektar dan telah resmi beroperasi sejak September 2017. Pengelolaan kawasan ini berada di bawah BUPP PT Bangun Palu Sulawesi Tengah.



Hingga tahun 2024, KEK Palu telah mencatatkan investasi sebesar Rp 1,19 triliun. Meskipun pertumbuhan investasi sepanjang tahun ini sebesar Rp 132 miliar terbilang moderat, kawasan ini berhasil menambah dua pelaku usaha baru, dengan total 45 pelaku usaha yang telah beroperasi. Dari sisi tenaga kerja, KEK Palu telah menyerap 643 tenaga kerja dengan tambahan 317 orang dalam satu tahun terakhir.

KEK Palu juga mencatat pencapaian penting dalam aktivitas ekspor. Pada tahun 2024, PT Hongthai International, salah satu pelaku usaha di KEK Palu, berhasil mengekspor produk gumrosin sebanyak 694.560 kg dan turpentine sebanyak 60.460 kg ke India dan China. Nilai ekspor ini mencapai Rp 13 miliar, menandakan peran penting KEK Palu dalam perdagangan internasional, khususnya di sektor industri bahan kimia.

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



Selain itu, PT Wanhong Nonferrous Recycling Utilization (PT Wanhong), salah satu pelaku usaha di KEK Palu, saat ini sudah tahap akhir pembangunan dan penyiapan sumber bahan baku untuk investasi Smelter tembaga di KEK Palu.

Dengan beroperasinya PT Wanghong dan realisasi investasi dari pelaku usaha baru, serta peningkatan kapasitas BUPP KEK Palu, diharapkan KEK Palu dapat meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian regional dan nasional.



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN RI
DEWAN NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS
© 2024

KEK MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN

Manufaktur

Badan Usaha :
PT Maloy Batuta Trans Kalimantan

Landasan Hukum :
PP No. 85 tahun 2014

Beroperasi :
1 April 2019

Kegiatan Utama :
> Industri Pengolahan Kelapa Sawit
> Industri Energi
> Industri Pengolahan Kayu
> Logistik

Okupansi Lahan :
> TOTAL LUAS LAHAN : **557,34 ha**
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIKUASAI : **509,49 ha (91,41%)** *Lahan yang dapat dikuasai hanya **509,49 ha**
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIMANFAATKAN : **26 ha (4,67% dari luas lahan sesuai PP)**

Kabupaten Kutai Timur
Provinsi Kalimantan Timur

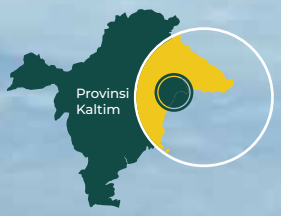

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2021



Transformasi Ekonomi Kalimantan Timur

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS

01 Capaian Kumulatif

Realisasi Investasi :
Rp **100 M**

Badan Usaha : **Rp 0,25 M**
Pelaku Usaha : **Rp 99,75 M**

Serapan Tenaga Kerja :
226 orang

Pelaku Usaha :
1

*data per **Desember 2024**

02 Capaian Tahun 2024

Realisasi Investasi :
Rp **0**

Rp **73,42 M**
Target **Investasi** 2024

0 %

100%

Serapan Tenaga Kerja :
57

93
Target Penyerapan **Tenaga Kerja** 2024

61,9 %

100%

Pelaku Usaha Baru :
0

*data per **Desember 2024**

KEK MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN : TRANSFORMASI EKONOMI KALIMANTAN TIMUR

Terletak di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) memiliki peran vital dalam mendorong pembangunan ekonomi wilayah Kalimantan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014, KEK MBTK mencakup area seluas 557,34 hektar dan difokuskan pada pengolahan bahan mentah seperti kelapa sawit serta sektor energi mineral, gas, dan batu bara.

Sejak diresmikan pada April 2019, secara akumulatif KEK MBTK telah mencatat investasi sebesar Rp100 miliar dengan mempekerjakan 226 orang, serta 1 pelaku usaha. Di tahun 2024, KEK MBTK berhasil menyerap 57 orang tenaga kerja baru.

KEK MBTK juga mendukung rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dengan fokus pada pengembangan klaster industri masa depan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan promosi investasi yang berkelanjutan. Langkah strategis ini termasuk percepatan hilirisasi produk turunan kelapa sawit, yang diharapkan dapat menarik lebih banyak investor.

Selain meningkatkan investasi, KEK MBTK juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. PT PLN (Persero) memastikan suplai listrik yang stabil untuk kawasan ini dan memenuhi kebutuhan industri serta masyarakat. Penyediaan air bersih juga menjadi prioritas penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar KEK. Kehadiran KEK MBTK juga membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal, membantu mengurangi tingkat pengangguran di daerah tersebut.



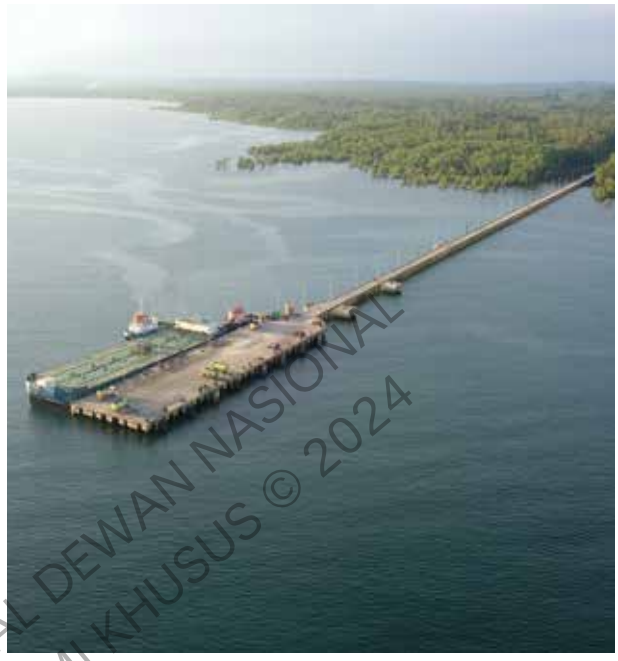

Infrastruktur di sekitar KEK MBTK terus diperbaiki, termasuk jalan akses menuju Sangkulirang, Kaliorang, dan Maloy, untuk mempermudah mobilitas dan distribusi barang serta jasa. Penguatan kelembagaan KEK MBTK dan dukungan dari pemerintah provinsi serta kabupaten diharapkan dapat meningkatkan daya tarik kawasan ini bagi investor dan memperkuat posisinya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Di sisi lain, promosi investasi terus dilakukan untuk menarik minat investor dari berbagai negara, termasuk India, Indonesia, China, dan Malaysia.

KEK MBTK diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Dengan langkah-langkah yang mantap, kawasan ini berpotensi besar untuk mendorong transformasi ekonomi Indonesia menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing global, membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

KEK MOROTAI
Manufaktur

Badan Usaha :
PT Jababeka Morotai

Landasan Hukum :
PP No. 50 Tahun 2014

Beroperasi :
1 April 2019

Kegiatan Utama :
> Pengolahan Ekspor
> Logistik
> Industri
> Pariwisata

Okupansi Lahan :
> TOTAL LUAS LAHAN : **1101,76 ha**
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIKUASAI : **390,3 ha (35,43%)**
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIMANFAATKAN : **130 ha (11,8% dari luas lahan sesuai PP)**

Kabupaten Pulau Morotai
Provinsi Maluku Utara



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS

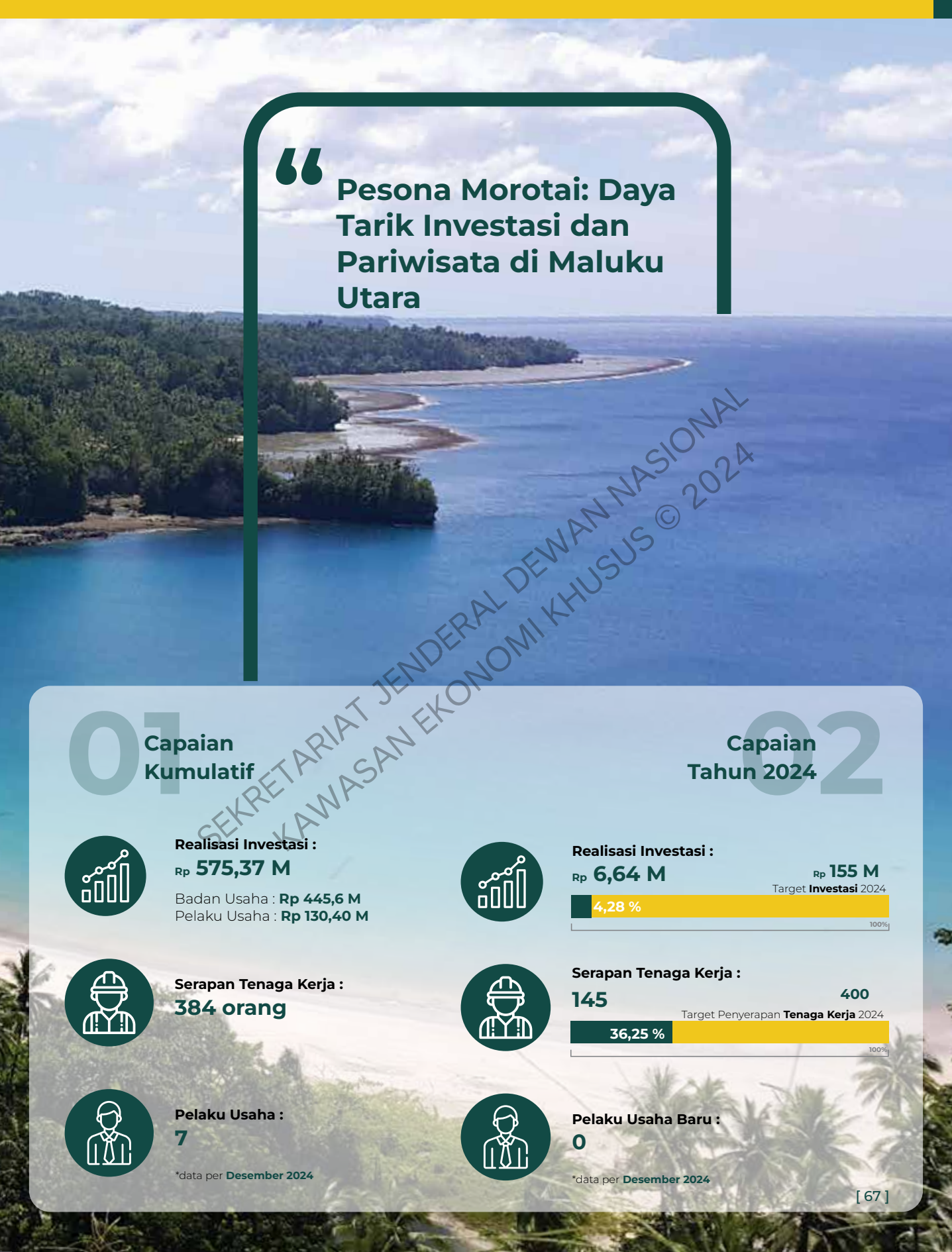

Pesona Morotai: Daya Tarik Investasi dan Pariwisata di Maluku Utara

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

01 Capaian Kumulatif

Realisasi Investasi :
Rp **575,37 M**

Badan Usaha : **Rp 445,6 M**
Pelaku Usaha : **Rp 130,40 M**

Serapan Tenaga Kerja :
384 orang

Pelaku Usaha :
7

*data per **Desember 2024**

02 Capaian Tahun 2024

Realisasi Investasi :
Rp **6,64 M**

Rp **155 M**
Target **Investasi** 2024

4,28 %

100%

Serapan Tenaga Kerja :
145

400
Target Penyerapan **Tenaga Kerja** 2024

36,25 %

100%

Pelaku Usaha Baru :
0

*data per **Desember 2024**

KEK MOROTAI : PESONA MOROTAI, DAYA TARIK INVESTASI DAN PARIWISATA DI MALUKU UTARA

Terletak di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai resmi ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014. Dengan luas area mencapai 1.101,76 hektar, kawasan ini dirancang untuk menjadi pusat pengembangan Pengolahan Ekspor, Logistik, Industri, dan Pariwisata. Sejak resmi beroperasi sebagai KEK pada April 2019, PT Jababeka Morotai selaku Badan Usaha Pengelola Kawasan (BUPP) telah menjadi penggerak utama dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan ini.

Hingga tahun 2024, KEK Morotai telah mencatatkan investasi sebesar Rp575,37 miliar, menciptakan lapangan kerja bagi 384 orang, dan menarik 7 pelaku usaha ke dalam kawasan. Selama 2024, tercatat tambahan investasi sebesar Rp 6,64 miliar dengan penambahan tenaga kerja sebanyak 145 orang.

Kehadiran KEK Morotai telah memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, terlihat dari tumbuhnya sektor pariwisata dengan munculnya berbagai hotel dan resort, seperti Metita Dive Resort, Moro Ma Doto, Molokai Hotel by Sahid, Marahai Villa, Daloha Resort, dan Flat Studio. Kehidupan Pulau Morotai semakin hidup dengan beragam pilihan akomodasi yang siap menyambut wisatawan dari berbagai penjuru.

Di tahun 2024, KEK Morotai mengajukan perubahan Peraturan Presiden untuk memindahkan lokasi KEK ke Tanjung Dehegila, dengan fokus yang lebih kuat pada pengembangan pariwisata. Pengusulan ini juga membawa tantangan baru bagi PT Jababeka Morotai untuk memperbaiki proses bisnis dan memastikan kelancaran transisi ini.

Selain sektor pariwisata, PT Jababeka Morotai juga mengembangkan industri perikanan di kawasan ini, ditandai dengan masuknya PT Samudera Era Abadi yang masuk ke KEK Morotai sejak tahun sebelumnya. Dengan demikian, KEK Morotai terus memperkuat posisinya sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang dinamis, berupaya memaksimalkan potensi alam Pulau Morotai demi kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



Sumber Foto : www.freepik.com / jcomp



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

KEK SORONG
Manufaktur

Badan Usaha :
PT Malamoi Olom Wobok (Perseroda)

Landasan Hukum :
PP No. 31 Tahun 2016

Beroperasi :
11 Oktober 2019

Kegiatan Utama :
> Industri Pengolahan Nikel
> Industri Pengolahan Kelapa Sawit
> Industri Hasil Hutan dan Perkebunan (sagu)
> Logistik

Okupansi Lahan :
> TOTAL LUAS LAHAN : **523,7 ha**
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIKUASAI : **338,5 ha (64,64%)**
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIMANFAATKAN : **45,06 ha (8,6% dari luas lahan sesuai PP)**

Kabupaten Sorong
Provinsi Papua Barat Daya

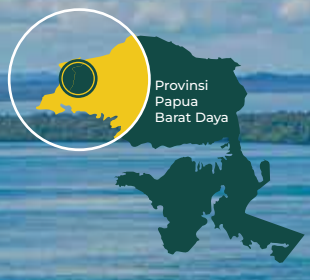

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



Membangun Masa Depan Papua Barat Daya

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

01 Capaian Kumulatif

Realisasi Investasi :
Rp **280,2 M**

Badan Usaha : **Rp 49,9 M**
Pelaku Usaha : **Rp 230,3 M**

Serapan Tenaga Kerja :
124 orang

Pelaku Usaha :
10

*data per **Desember 2024**

02 Capaian Tahun 2024

Realisasi Investasi :
Rp **7,21 M**

Rp **1,57 T**
Target **Investasi** 2024

0,46 %

100%

Serapan Tenaga Kerja :
35

540
Target Penyerapan **Tenaga Kerja** 2024

6,48 %

100%

Pelaku Usaha Baru :
+3

*data per **Desember 2024**

KEK SORONG : MEMBANGUN MASA DEPAN PAPUA BARAT DAYA

Terletak di ujung timur Indonesia, tepatnya di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong menjadi titik vital bagi pengembangan industri di wilayah timur Nusantara. Ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016, KEK dengan luas area sebesar 523,7 hektar ini berfokus pada industri pengolahan nikel, kelapa sawit, hasil hutan, perkebunan sagu, dan logistik.

Beroperasi sejak Oktober 2019, KEK Sorong telah mencatatkan investasi senilai Rp 280,2 miliar dengan tenaga kerja mencapai 124 orang dan melibatkan 10 pelaku usaha. Selama 2024, investasi yang tercatat di KEK Sorong mencapai Rp 7,21 miliar dengan tambahan 35 tenaga kerja baru.

Keberadaan KEK Sorong telah menjadi katalis pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Multiplier effect yang dihasilkan meliputi kemunculan UMKM dan koperasi yang kian berkembang, pembangunan perumahan di sekitar kawasan, serta penyerapan tenaga kerja yang semakin meningkat.

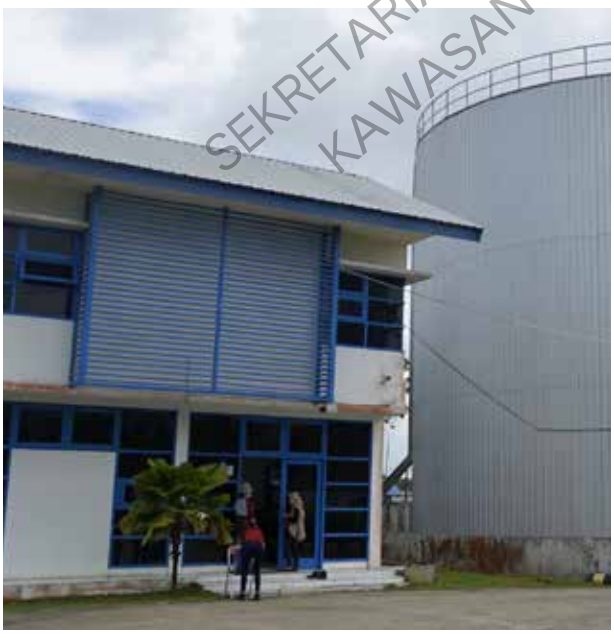



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

Kedepannya, KEK Sorong menargetkan investasi pabrik smelting dan pengembangan hilir nikel dengan jumlah investasi diperkirakan akan mencapai Rp1,57 triliun.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya masih berkomitmen untuk menyusun kajian teknis terumbu karang sebagai upaya mendukung pengembangan kawasani serta pembangunan reservoir dan jaringan air di dalam kawasan.

Dengan segala potensinya, KEK Sorong tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan industri di Papua Barat Daya tetapi juga simbol dari harapan besar bagi ekonomi kawasan timur Indonesia.



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

KEK TANJUNG SAUH

Manufaktur

Badan Usaha :
PT Batamraya Sukses Perkasa

Landasan Hukum :
PP No. 24 Tahun 2024

Beroperasi :
Belum Beroperasi

Kegiatan Utama :
> Produksi & Pengolahan
> Logistik & Distribusi
> Pengembangan Energi

Okupansi Lahan :
> TOTAL LUAS LAHAN : **840,67 ha**
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIKUASAI : **639,03 ha (76,01%)**

Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



Gerbang Ekonomi Baru di Jantung Kepulauan Riau

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

01 Capaian Kumulatif

Realisasi Investasi :
Rp 39,98 M
Badan Usaha : **Rp 0,5 M**
Pelaku Usaha : **Rp 39,48 M**

Serapan Tenaga Kerja :
240 orang

Pelaku Usaha :
1

*data per **Desember 2024**

02 Capaian Tahun 2024

Realisasi Investasi :
Rp 39,98 M
Rp 717,4 M
Target **Investasi** 2024
6 %
100%

Serapan Tenaga Kerja :
240
200
Target Penyerapan **Tenaga Kerja** 2024
>100 %
100%

Pelaku Usaha Baru :
+1

*data per **Desember 2024**

KEK TANJUNG SAUH : GERBANG EKONOMI BARU DI JANTUNG KEPULAUAN RIAU

Berlokasi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, KEK Tanjung Sauh ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2024. Dikelola oleh PT Batamraya Sukses Perkasa, dengan lahan seluas 840,67 hektar, KEK Tanjung Sauh berfokus pada kegiatan usaha produksi dan pengolahan, pengembangan energi, serta logistik dan distribusi.

Sebagai KEK yang baru saja ditetapkan, Tanjung Sauh telah mencapai realisasi investasi sebesar Rp 39,98 miliar dengan serapan tenaga kerja 240 orang, dan satu pelaku usaha. Rencananya, di kawasan ini akan dikembangkan industri komponen elektronik (PCB, RFID, GPS, CCTV, dan Semikonduktor), dan industri perakitan produk elektronik.

Pelabuhan di KEK Tanjung Sauh akan menjadi penghubung strategis antara Kepulauan Riau dengan pasar nasional dan internasional, menjadikannya jembatan penting dalam mobilisasi logistik. Selain itu, KEK ini juga diproyeksikan menjadi Gateway Port modern yang mampu menampung hingga 5 juta TEUS, sekaligus menjadi pusat logistik utama di wilayah antara Batam dan Bintan.

Tidak hanya itu, kawasan ini juga diperuntukkan sebagai pusat riset dan pengembangan di bidang energi. KEK Tanjung Sauh akan menjadi produsen energi alternatif, energi terbarukan, dan energi primer, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan industri dan rumah tangga di kawasan Batam-Bintan. Dengan visi yang ambisius dan perencanaan matang, KEK Tanjung Sauh siap menjadi motor penggerak ekonomi di masa depan.

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

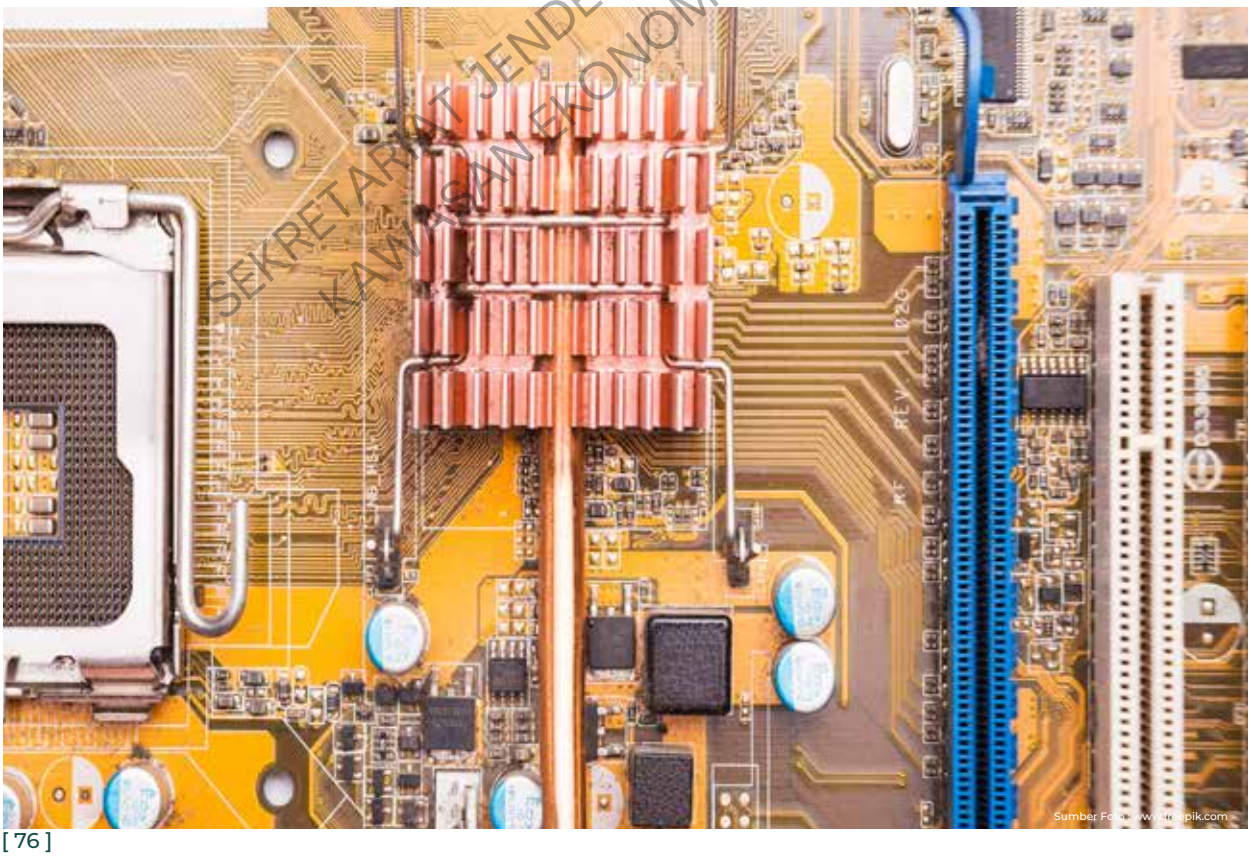



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

KEK SETANGGA

Manufaktur

Badan Usaha :
PT Dua Samudera Perkasa

Landasan Hukum :
PP No. 26 Tahun 2024

Beroperasi :
Belum Beroperasi

Kegiatan Utama :
> Produksi dan Pengolahan
> Logistik & Distribusi
> Pengembangan Energi

Okupansi Lahan :
> TOTAL LUAS LAHAN : **668,3 ha**
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIKUASAI : **559,01 ha (83,65%)**
> LUAS LAHAN YANG DIMANFAATKAN : **430,7 Ha (77% dari Luas sesuai PP)**

Kabupaten Tanah Bumbu
Provinsi Kalimantan Selatan

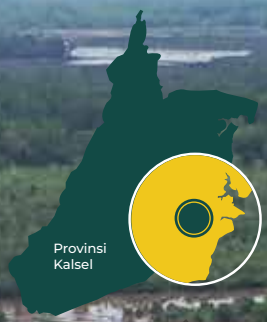

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

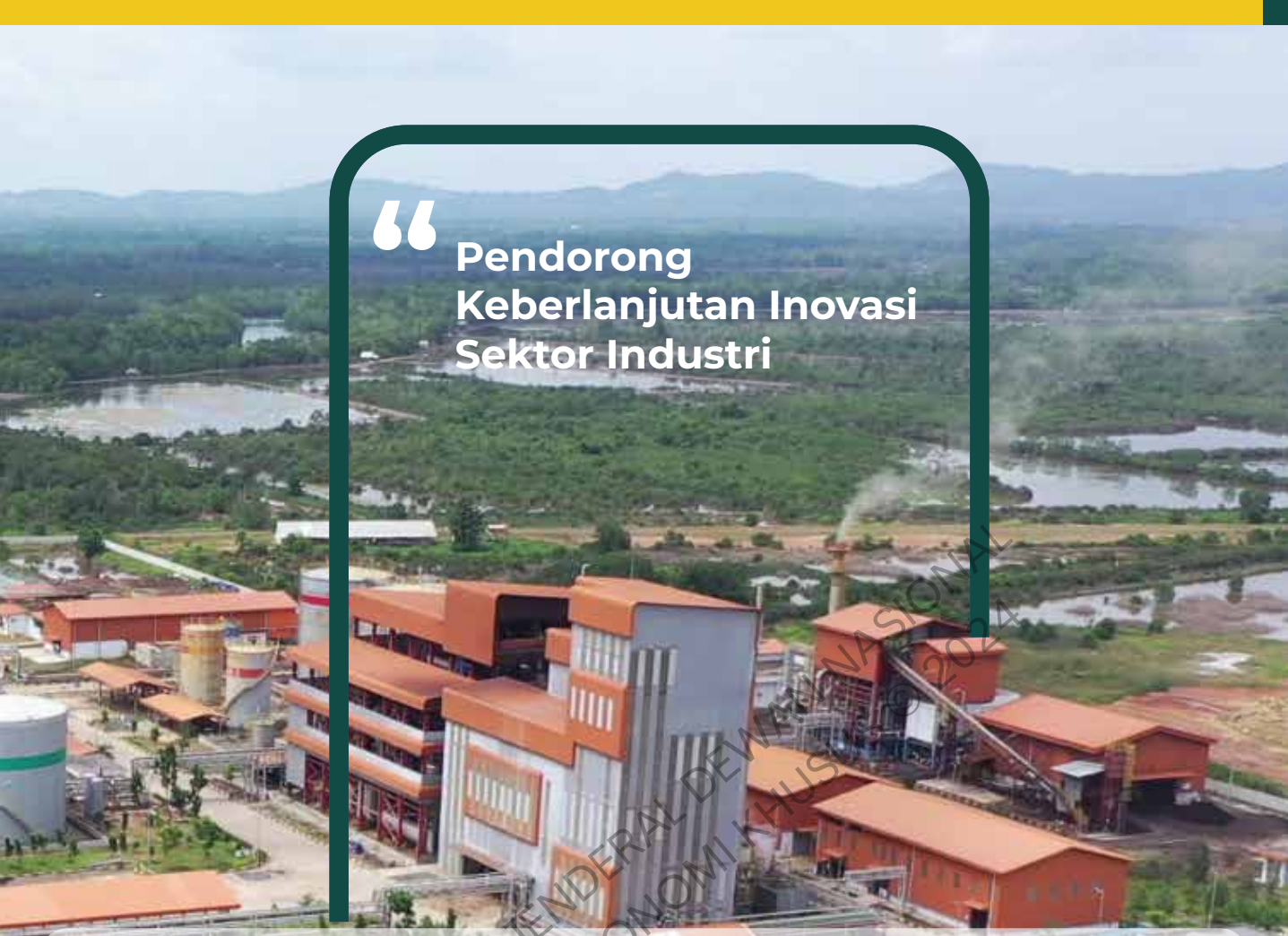

Pendorong Keberlanjutan Inovasi Sektor Industri

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS 2024

01 Capaian Kumulatif

Realisasi Investasi :
Rp 1,3 T
Badan Usaha : **Rp 805,74 M**
Pelaku Usaha : **Rp 586,97 M**

Serapan Tenaga Kerja :
795 orang

Pelaku Usaha :
9

*data per **Desember 2024**

02 Capaian Tahun 2024

Realisasi Investasi :
Rp 1,39 T
Rp 1,42 T
Target **Investasi** 2024
95,1 %
100%

Serapan Tenaga Kerja :
795
2.171
Target Penyerapan **Tenaga Kerja** 2024
36,61 %
100%

Pelaku Usaha Baru :
+5

*data per **Desember 2024**

KEK SETANGGA : PENDORONG KEBERLANJUTAN INOVASI SEKTOR INDUSTRI


Sumber Foto : www.freepik.com

Terletak di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, KEK Setangga ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2024 pada tahun 2024. Dikelola oleh PT Dua Samudera Perkasa yang bergerak di bidang pertambangan, transportasi udara, infrastruktur, dan manufaktur, dengan lahan seluas 668,3 hektar. KEK Setangga dirancang untuk menjadi lokomotif baru bagi perekonomian Kalimantan Selatan.

Sebagai KEK pendatang baru, Setangga telah mencatatkan investasi sebesar Rp 1,3 triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 795 orang, serta 9 pelaku usaha. Kawasan ini dirancang untuk menjadi episentrum industri yang beragam, mencakup sektor-sektor penting seperti smelter, biodiesel & refinery, fraksinasi untuk peningkatan produksi minyak goreng sawit nasional, serta industri besi, karet, dan kemasan. Setiap industri di KEK Setangga dirancang untuk saling mendukung, menciptakan ekosistem yang kuat dan terpadu.

Kehadiran KEK Setangga tidak hanya diperuntukkan bagi pemain industri besar. Kawasan ini juga memberi tempat bagi Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM), yang terhubung erat dengan sektor industri yang ada. Ini memberikan peluang bagi para pengusaha kecil untuk tumbuh bersama dengan raksasa industri di sekitarnya, membuka jalan menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Selain fokus pada industri, KEK Setangga juga menempatkan inovasi di garis depan melalui bisnis research and development. Di sini, riset dan pengembangan menjadi kunci untuk mendorong keberlanjutan dan inovasi dalam sektor industri, dengan menyediakan layanan terpadu bagi perusahaan yang membutuhkan dukungan dalam penelitian, pengembangan, dan pelatihan.

Di bawah naungan PT Dua Samudera Perkasa, yang bergerak di bidang pertambangan, transportasi udara, infrastruktur, dan manufaktur, KEK Setangga diharapkan mampu menciptakan 78.999 lapangan kerja hingga tahun 2053. Kawasan ini dirancang untuk menjadi lokomotif baru bagi perekonomian Kalimantan Selatan, membawa harapan baru bagi masyarakat setempat dan memperkuat posisi Indonesia di panggung ekonomi dunia.

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

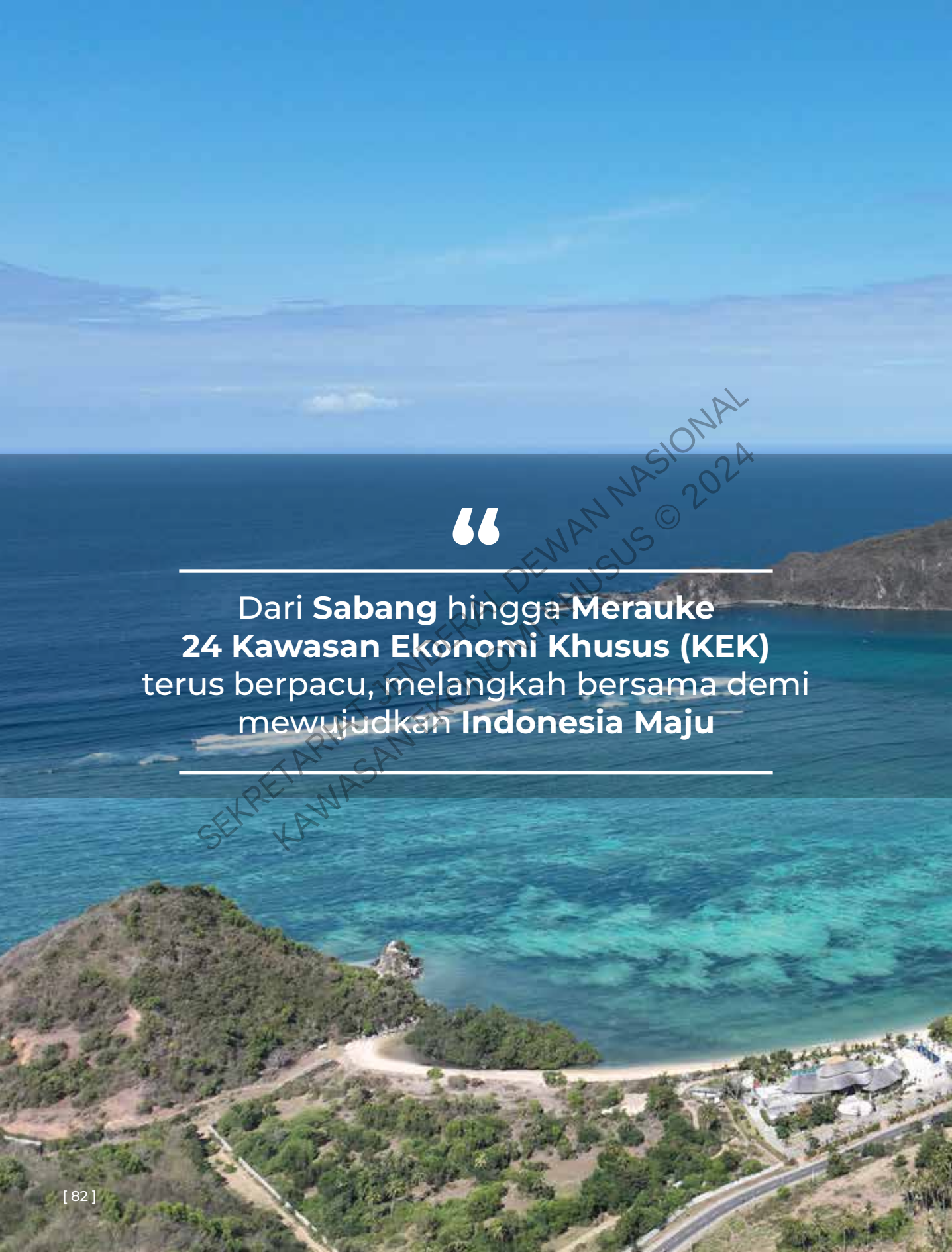

“

Dari **Sabang** hingga **Merauke**
24 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
terus berpacu, melangkah bersama demi
mewujudkan **Indonesia Maju**

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



KEK PARIWISATA

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

KEK MANDALIKA
Pariwisata

Badan Usaha :
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia

Landasan Hukum :
PP No. 52 Tahun 2014

Beroperasi :
20 Oktober 2017

Kegiatan Utama :
Pembangun dan Pengelola Pariwisata

Okupansi Lahan :
> TOTAL LUAS LAHAN : **1.035,67 ha**
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIKUASAI :
1.035,67 ha (100%)
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIMANFAATKAN :
307 ha (29,7% dari luas lahan sesuai PP)

Kabupaten Lombok Tengah
Provinsi Nusa Tenggara Barat

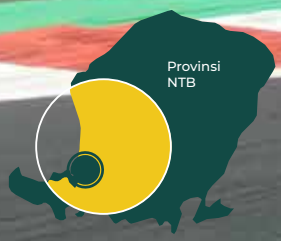

SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
UNTUK KEPENTINGAN KHUSUS © 2024

Dari Pantai Eksotis Hingga Event Dunia

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

01 Capaian Kumulatif

Realisasi Investasi :

Rp **5,7 T**

Badan Usaha : **Rp 5 T**
Pelaku Usaha : **Rp 719 M**

Serapan Tenaga Kerja :

17.455 orang

Pelaku Usaha :

22 Pelaku Usaha

Kerjasama :

25 Objek Kerjasama

*data per **Desember 2024**

02 Capaian Tahun 2024

Realisasi Investasi :

Rp **906 M**

Rp **946,16 M**
Target **Investasi** 2024

96%

100%

Serapan Tenaga Kerja :

7.477

6.222
Target Penyerapan **Tenaga Kerja** 2024

> 100%

100%

+2 Pelaku Usaha

+3 Luda

*data per **Desember 2024**

KEK MANDALIKA : DARI PANTAI EKSOTIS HINGGA EVENT DUNIA

Berada di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, KEK Mandalika ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014. Di atas lahan seluas 1.035,67 hektar, KEK Mandalika berfokus pada sektor pengembangan pariwisata. Tepat pada tanggal 20 Oktober 2017, KEK Mandalika resmi beroperasi di bawah pengelolaan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC).

Hingga tahun 2024, Mandalika telah berhasil menarik investasi sebesar Rp 5,7 triliun, dan menciptakan lapangan kerja bagi 17.455 orang, serta menampung 25 objek kerja sama dan 22 pelaku usaha. Pada tahun 2024, KEK Mandalika menyerap tenaga kerja sebesar 7.477 orang atau sebesar 120% dari target, serta mencatatkan nilai investasi sebesar Rp906miliar.

Mandalika juga menjadi panggung berbagai ajang balap motor dunia seperti MotoGP dan Asian Road Racing Championship (ARRC). Pertamina Street Circuit Mandalika menggelar berbagai acara, dari Arrive & Drive di bulan Maret, hingga JDM Fun Run Time Attack dan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024. Kehadiran acara-acara ini diharapkan tidak hanya menggerakkan roda ekonomi tetapi juga menambah jumlah tenaga kerja di Mandalika.

Kesuksesan Mandalika juga tercermin dalam peningkatan jumlah wisatawan. MotoGP Mandalika 2023, misalnya, berhasil menarik lebih dari 102.929 penonton, melampaui ekspektasi, serta meningkatkan okupansi bandara hingga 20%. Penonton internasional dan media global turut hadir, menambah sorotan dunia kepada Mandalika dan Indonesia.

Di sekitar wilayah Mandalika, ekonomi berdenyut lebih kencang. Penjualan tiket MotoGP 2023 mencapai estimasi Rp73 miliar, disusul peningkatan jumlah gerai minimarket dan hotel kelas atas di Pulau Lombok. KEK Mandalika juga memberikan pelatihan keterampilan kepada warga sekitar, memberdayakan mereka dalam pengembangan pariwisata. Pelatihan ini mencakup layanan pariwisata dan keterampilan yang mendukung.

Di bawah naungan ITDC, Mandalika meraih penghargaan sebagai KEK Jasa Terbaik dalam acara Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper OPM Beyond 2024. Penghargaan ini adalah bukti dedikasi ITDC dan para pemangku kepentingan dalam menjadikan Mandalika sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal dan nasional.

ITDC berkomitmen meningkatkan daya saing internasional dengan menyediakan pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja lokal. Contohnya, lebih dari 380 marshal dari masyarakat lokal dilibatkan dalam MotoGP setelah mendapatkan sertifikasi internasional. Selain itu, lebih dari 1000 tenaga kerja lokal dikaryakan dalam gelaran ARRC pada Agustus 2024 ini.



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024 DEWAN NASIONAL JENDERAL

KEK LIDO
Pariwisata

Badan Usaha :
PT MNC Land Lido

Landasan Hukum :
PP No. 69 Tahun 2021

Beroperasi :
8 November 2022

Kegiatan Utama :
> Pariwisata
> Industri Kreatif

Okupansi Lahan :
> TOTAL LUAS LAHAN : **1.040 ha**
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIKUASAI :
864,90 ha (83,16%)
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIMANFAATKAN :
348,72 ha (33,5% dari luas lahan sesuai PP)

Kabupaten Bogor
Provinsi Jawa Barat

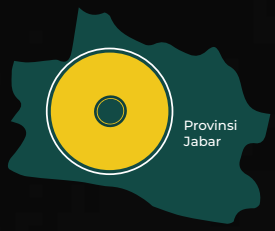

KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS 2024



Menggagas Masa Depan Pariwisata di Jawa Barat

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

01 Capaian Kumulatif

Realisasi Investasi :
Rp **5,08 T**
Badan Usaha : **Rp 2,22 T**
Pelaku Usaha : **Rp2,86 T**

Serapan Tenaga Kerja :
4.879 orang

Pelaku Usaha :
9 Pelaku Usaha
*data per **Desember 2024**

02 Capaian Tahun 2024

Realisasi Investasi :
Rp **898,28 M**
Rp **882,03 M**
Target **Investasi** 2024
101,84%

Serapan Tenaga Kerja :
1.032
1.152
Target Penyerapan **Tenaga Kerja** 2024
90%

1 Pelaku Usaha
*data per **Desember 2024**

KEK LIDO : MENGGAGAS MASA DEPAN PARIWISATA DI JAWA BARAT

KEK Lido berlokasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. KEK ini menawarkan keindahan alam di antara 2 gunung yaitu Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Sejak diresmikan pada November 2022, kawasan ini telah berkembang dengan pesat, mencatat investasi sebesar Rp5,08 triliun dan menciptakan lapangan kerja bagi 4.879 pekerja.

Selama tahun 2024, KEK Lido menarik investasi sebesar Rp898,28 miliar, membuka pintu bagi 1.032 tenaga kerja baru dan menambah satu pelaku usaha. Ini adalah bukti nyata dari kepercayaan yang diberikan para investor terhadap KEK Lido, sebuah tempat yang dirancang untuk menjadi pusat pariwisata dan kreativitas di Indonesia.

Pada bulan Agustus 2024 yang lalu, LMAC menjadi saksi kemeriahan Super Hitz Fest, sebuah konser yang diharapkan menarik ribuan pengunjung. Sementara itu, pembangunan Lido Lake Resort Extension terus berlanjut, mencapai tahap akhir pengerjaan agar segera beroperasi.

Pemerintah berharap KEK Lido menjadi magnet bagi wisatawan domestik, mengurangi jumlah warga Indonesia yang memilih berlibur ke luar negeri. Dengan fasilitas seperti theme park, movieland, water park, dan techno park, KEK Lido menawarkan segudang atraksi yang memikat hati dan jiwa.

Dengan menarik wisatawan domestik, KEK ini diharapkan dapat menghemat devisa negara hingga USD2,4 miliar.

Dalam dua dekade ke depan, KEK Lido diproyeksikan menyerap hampir 30.000 tenaga kerja, memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

Dukungan infrastruktur dari pemerintah daerah, seperti pembangunan Tol Bocimi dan Tol Jagorawi yang tersambung langsung ke KEK Lido, semakin memperkuat potensi kawasan ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Selama tahun 2024, selain menyelesaikan beberapa proyek yang sudah berjalan seperti hotel extention, lapangan golf, dan *movieland*, BUPP sedang berfokus untuk melengkapi kebutuhan infrastruktur dasar sehingga pada saatnya semua pelaku usaha yang beroperasi di KEK Lido akan mendapat pelayanan yang terbaik

Namun, ada tantangan yang harus dihadapi. Masalah sumber air bersih dan kendala perizinan menjadi perhatian utama. Akses langsung dari Pintu Tol Cigombong 2 dan rute menuju Taman Nasional Gunung Gede Pangrango masih perlu diperbaiki. Semua isu ini sedang dalam penanganan, agar mempercepat perkembangan KEK Lido.

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

KEK TANJUNG LESUNG

Pariwisata

Badan Usaha :
PT Banten West Java Tourism Development Corporation

Landasan Hukum :
PP No. 26 Tahun 2012

Beroperasi :
24 Februari 2015

Kegiatan Utama :
> Pariwisata
> Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan
> Penyediaan Infrastruktur Kawasan

Okupansi Lahan :
> TOTAL LUAS LAHAN : **1.500 ha**
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIKUASAI : **1.447 ha (96,48%)**
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIMANFAATKAN : **657,36 ha (43,82% dari luas lahan sesuai PP)**

Kabupaten Pandeglan
Provinsi Banten



DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2014



> **Akses yang Semakin Mudah dengan Pembangunan Tol Serang Panimbang**

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2025

01 Capaian Kumulatif

Realisasi Investasi :
Rp **2,6 T**

Badan Usaha : **Rp 530 M**
Pelaku Usaha : **Rp 2,1 T**

Serapan Tenaga Kerja :
5.961 orang

Pelaku Usaha :
27

*data per **Desember 2024**

02 Capaian Tahun 2024

Realisasi Investasi :
Rp **165,11 M**

Rp **682,5 M**
Target **Investasi** 2024

24%

100%

Serapan Tenaga Kerja :
2.261

1.585
Target Penyerapan **Tenaga Kerja** 2024

143%

100%

Pelaku Usaha Baru :
9

*data per **Desember 2024**

KEK TANJUNG LESUNG : AKSES YANG SEMAKIN MUDAH DENGAN PEMBANGUNAN TOL SERANG PANIMBANG

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, terletak di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, adalah sebuah bentuk pengembangan kawasan ekonomi di Indonesia. Ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 dan mulai beroperasi pada 23 Februari 2015, kawasan ini telah memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal.

Sejak penetapannya pada 2012 hingga tahun 2024, KEK Tanjung Lesung mencatat investasi sebesar Rp2,6 triliun, menciptakan lapangan kerja bagi 5.961 orang dan menarik 27 pelaku usaha. Khusus pada periode 2024, tambahan investasi senilai Rp165,11 miliar telah direalisasikan, bersama dengan 2.261 tenaga kerja baru dan sembilan pelaku usaha baru yang bergabung.

Di tahun 2024, KEK Tanjung Lesung menarik investasi melalui beberapa pelaku usaha seperti PT Pantai Kelapa Kuning, PT Air Samudera Propertindo, Yayasan Pendidikan Universitas Presiden, dan 2 (dua) pelaku usaha perorangan.

Selain itu, dilaksanakan pula pembangunan Taman Shree Bunar, perluasan Ladda Bay Village, dan pembangunan *Beach Club* dengan *Freya* dengan total nilai Rp117 miliar yang dijalankan secara bertahap. Proyek besar yang telah selesai termasuk pembangunan president school 2 dengan nilai Rp15 miliar dan Plaza Tanjung Lesung senilai Rp6 miliar.

Ruas jalan tol Serang-Panimbang sepanjang 83,67 kilometer diharapkan dapat selesai segera karena ketika beroperasi penuh, akan memangkas waktu perjalanan dari lima jam menjadi hanya dua hingga tiga jam.

Seksi I Serang-Rangkas Bitung telah selesai dikerjakan dan telah beroperasi sejak 2023. Saat ini, sedang dikerjakan seksi 2 Rangkasbitung-Cileles sepanjang 24,17 kilometer dengan progres 86,14%; serta seksi 3A ruas Cileles-Bojong sepanjang 17,46 kimoleter dengan progres 91,52%.

Selain persoalan jalan tol, peningkatan kualitas jalan nasional 012 SP. Labuan – Cibaliung, reaktivasi jalur kereta api RangkasbitungLabuan, dan percepatan penetapan Pelabuhan serta Kawasan Marina Tanjung Lesung adalah beberapa isu yang perlu diatasi untuk optimalisasi kawasan ini.

Dampak ekonomi dari pengembangan KEK Tanjung Lesung sangat signifikan. Dengan munculnya 16 desa wisata, 95 kelompok ekonomi kreatif, dan 149 homestay di sekitar kawasan, perekonomian lokal semakin bergairah.

KEK Tanjung Lesung juga mulai membuat terobosan dengan menawarkan paket wisata khusus bagi pasien, termasuk *land sport, aero sport,* dan *water sport*. KEK Tanjung Lesung tidak hanya memiliki pantai yang indah, tetapi juga menawarkan 25 aktivitas seru, termasuk berenang di pantai yang jernih, menikmati *sunrise* dan *sunset* dengan latar belakang Anak Gunung Krakatau, *snorkeling, diving*, hingga bermain jet ski. Wisatawan juga bisa menjajal naik *stand up paddle board*, berkeliling kawasan dengan sepeda atau sepeda listrik, atau menyaksikan panorama Gunung Krakatau dengan pesawat Cessna 152 & 172. Untuk akomodasi, pengelola menyediakan berbagai pilihan, termasuk Tanjung Lesung Hotel & Resort, Villa Kalicaa, *homestay Ladda Bay Village, Lallasa Container Inn,* dan *Camping Camp*.

Selanjutnya, pemerintah pusat dan daerah terus berkolaborasi untuk memastikan semua proyek di KEK Tanjung Lesung berjalan sesuai rencana. Dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, terutama dalam hal pembebasan lahan dan pendanaan.

SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024





PROFIL PENGELOLA KAWASAN EKONOMI KHUSUS NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS TAHUN 2024

KEK TANJUNG KELAYANG

Pariwisata

Badan Usaha :
PT Belitung Pantai Intan

Landasan Hukum :
PP No. 6 Tahun 2016

Beroperasi :
31 Januari 2024

Kegiatan Utama :
> Pariwisata

Okupansi Lahan :
> TOTAL LUAS LAHAN : **324,4 ha**
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIKUASAI : **324,4 ha (100%)**
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIMANFAATKAN : **35,85 ha (11,05% dari luas lahan sesuai PP)**

Kabupaten Belitung
Provinsi Kep. Bangka Belitung



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



Keindahan Pantai Tanjung Kelayang Siap Menyambut Dukungan Akses Penerbangan

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS ©2024

01 Capaian Kumulatif

Realisasi Investasi :
Rp 1,7 T
Badan Usaha : **Rp 1,18 T**
Pelaku Usaha : **Rp 521,5 M**

Serapan Tenaga Kerja :
719 orang

Pelaku Usaha :
8
*data per **Desember 2024**

02 Capaian Tahun 2024

Realisasi Investasi :
Rp 35 M — **Rp 626,6 M**
Target **Investasi** 2024
5 %
100%

Serapan Tenaga Kerja :
134 — **1.520**
Target Penyerapan **Tenaga Kerja** 2024
8%
100%

Pelaku Usaha Baru :
1
*data per **Desember 2024**

KEK TANJUNG KELAYANG : KEINDAHAN PANTAI TANJUNG KELAYANG SIAP MENYAMBUT DUKUNGAN AKSES PENERBANGAN

KEK Tanjung Kelayang di Belitung berfokus pada pariwisata berkelanjutan, dengan fokus utama pada konsep *low carbon footprint tourism*. Hingga 2024, KEK ini berhasil mencatatkan investasi sebesar Rp 1,7 triliun, yang diperkuat dengan tambahan Rp 35 miliar pada tahun 2024 saja. Investasi ini bukan hanya angka di atas kertas, tetapi juga berarti terciptanya lapangan kerja baru bagi 134 orang, sehingga total tenaga kerja yang terserap mencapai 719 orang.

Selain berbagai upaya untuk menarik investasi, KEK Tanjung Kelayang gencar menghidupkan kembali sektor pariwisata yang sempat terpuruk akibat pandemi. Pengelola kawasan ini aktif melakukan promosi di berbagai forum internasional, serta menjalin kerja sama dengan maskapai penerbangan untuk meningkatkan frekuensi penerbangan menuju Belitung. Langkah ini disertai dengan rencana membuka rute penerbangan internasional baru melalui Bali, Batam, atau Jakarta, dengan harapan dapat menarik lebih banyak wisatawan mancanegara.

BUPP KEK Tanjung Kelayang juga berharap semakin banyak kegiatan nasional maupun internasional yang diadakan di kawasan ini. Aktivitas ini tidak hanya akan membantu mengembalikan semangat pariwisata pasca-COVID-19, tetapi juga menjadi bukti nyata bagi investor bahwa potensi yang dimiliki KEK ini masih sangat besar. Selain itu, acara-acara ini memberikan peluang bagi UMKM lokal untuk memasarkan produk-produk unggulan mereka kepada audiens yang lebih luas.

Sinergi antara pemerintah, pengelola, dan sektor swasta menjadi kunci dalam mengembangkan KEK Tanjung Kelayang sebagai destinasi wisata internasional yang berkelanjutan dan berkualitas tinggi.

Dengan segala upaya ini, KEK Tanjung Kelayang diharapkan tidak hanya menjadi motor penggerak ekonomi lokal, tetapi juga menjadi contoh sukses dalam pengembangan pariwisata berbasis keberlanjutan di Indonesia.

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024





SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

KEK LIKUPANG

Pariwisata

Badan Usaha :
PT Minahasa Permai Resort Development

Landasan Hukum :
PP No. 84 Tahun 2019

Beroperasi :
28 Juni 2024

Kegiatan Utama :
> Pariwisata

Okupansi Lahan :
> TOTAL LUAS LAHAN : **197,4 ha**
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIKUASAI : **197,4 ha (100%)**
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIMANFAATKAN : **43,1 ha (22% dari luas lahan sesuai PP)**



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA



> **Menggerakkan Ekonomi Minahasa Utara Lewat *Sustainable Tourism***

SEKRETARIAT JEDE - DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

01 Capaian Kumulatif

Realisasi Investasi :
Rp **523,91 M**

Badan Usaha : **Rp 348,97 M**
Pelaku Usaha : **Rp 174,94 M**

Serapan Tenaga Kerja :
1.010 orang

Pelaku Usaha :
8

*data per **Desember 2024**

02 Capaian Tahun 2024

Realisasi Investasi :
Rp **14,86 M**

Rp **175,17 M**
Target **Investasi** 2024

8,48%

100%

Serapan Tenaga Kerja :
191

440
Target Penyerapan **Tenaga Kerja** 2024

43,4%

100%

Pelaku Usaha Baru :
1

*data per **Desember 2024**

KEK LIKUPANG : MENGGERAKKAN EKONOMI MINAHASA UTARA LEWAT *SUSTAINABLE TOURISM*

KEK Likupang, yang terletak di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, semakin menunjukkan potensinya sebagai pusat pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Dengan luas area 197,4 hektar, kawasan ini ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2019 dan diresmikan beroperasi pada tahun 2024. . Usulan pengembangan KEK ini berasal dari PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD), anak perusahaan dari Sintesa Group, yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan kawasan tersebut.

Hingga tahun 2024, KEK Likupang telah mencatatkan investasi total senilai Rp523,91 miliar, menciptakan lapangan kerja bagi 1010 orang dan menarik 8 pelaku usaha yang berkontribusi pada pengembangan kawasan.

Selama tahun 2024, KEK Likupang mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp14,96 miliar, dan menyerap tenaga kerja 191 orang, bersama dengan penambahan satu pelaku usaha baru.

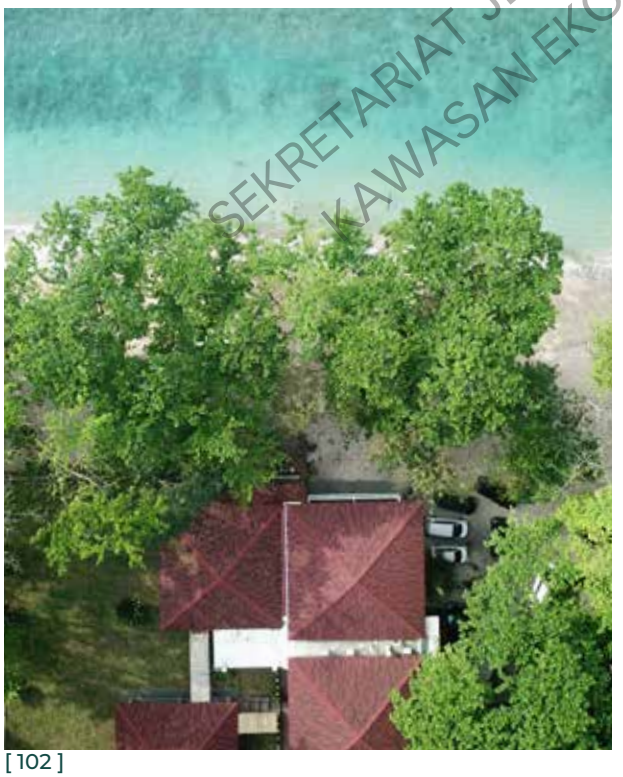

Beberapa fasilitas pariwisata yang mendukung terwujudnya *sustainable tourism* akan dikembangkan di KEK Likupang, mencakup pembangunan infrastruktur penting seperti *Yacht & Sailing Club, Yacht & Sailing Resort, Sea Water Reverse Osmosis,* dan *Waterfront City* Proyek-proyek ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik KEK Likupang bagi para investor.

Salah satu fokus utama pengembangan di KEK Likupang adalah konsep marina dan *waterfront city* yang terintegrasi dengan kawasan konservasi. Konsep ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada upaya untuk menciptakan pariwisata berkelanjutan yang selaras dengan tren global yang semakin mengutamakan keberlanjutan lingkungan. KEK Likupang, dengan konsep *sustainable tourism*, berada di garis depan dalam menawarkan pengalaman wisata yang tidak hanya menarik bagi wisatawan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan komunitas lokal.

Kawasan ini telah memenuhi sebagian besar kriteria yang diperlukan, termasuk infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, pengolahan air limbah, dan telekomunikasi. Fasilitas pendukung lainnya, seperti pengelolaan sampah, pemadam kebakaran, dan kantor pengelola, juga telah tersedia.



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



SEKRETARIAT INDEPENDEN DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

KEK KURA KURA BALI

Pariwisata

Badan Usaha :
PT Bali Turtle Island Development

Landasan Hukum :
PP No. 23 Tahun 2023

Beroperasi :
26 Juni 2024

Kegiatan Utama :
> Pariwisata
> Industri Kreatif

Okupansi Lahan :
> TOTAL LUAS LAHAN : **498 ha**
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIKUASAI : **492,6 ha (98,9%)**
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIMANFAATKAN : **74,83 ha (15,03% dari luas lahan sesuai PP)**

Kota Denpasar
Provinsi Bali



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



> **Rumah bagi Berbagai Kegiatan Bertaraf Internasional**

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

01 Capaian Kumulatif

Realisasi Investasi :
Rp **795,91 M**

Badan Usaha : **Rp 65,46 M**
Pelaku Usaha : **Rp 730,45 M**

Serapan Tenaga Kerja :
1.383 orang

Pelaku Usaha :
2

*data per **Desember 2024**

02 Capaian Tahun 2024

Realisasi Investasi :
Rp **258,53 M**

Rp **67,66 M**
Target **Investasi** 2024
382,10%
100%

Serapan Tenaga Kerja :
1.198

741
Target Penyerapan **Tenaga Kerja** 2024
161,67%
100%

Pelaku Usaha Baru :
1

*data per **Desember 2024**

KEK KURA KURA BALI : RUMAH BAGI BERBAGAI KEGIATAN BERTARAF INTERNASIONAL

Terletak di Kota Denpasar, Provinsi Bali, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali menjadi sorotan baru dalam pengembangan pariwisata dan industri kreatif di Indonesia. Dengan luas area mencapai 498 hektar, KEK ini resmi ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023 dan mulai beroperasi pada 26 Juni 2024. Pengelolaan kawasan ini berada di bawah kendali PT Bali Turtle Island Development (BTID).

Sejak beroperasi, KEK Kura Kura Bali telah mencatatkan investasi sebesar Rp795,91 miliar hingga 2024. Investasi ini berhasil menciptakan lapangan kerja bagi 1.383 orang, dengan dua pelaku usaha yang aktif beroperasi di kawasan ini. Selama 2024, KEK Kura Kura Bali mencatatkan tambahan investasi sebesar Rp258,53 miliar, 382,10% dari target 2024; serta penambahan tenaga kerja sebanyak 1.198 orang, 161,67% dari target 2024. KEK Kura Kura Bali tidak hanya berfokus pada pengembangan infrastruktur dasar, tetapi juga pada pembangunan fasilitas kelas dunia.

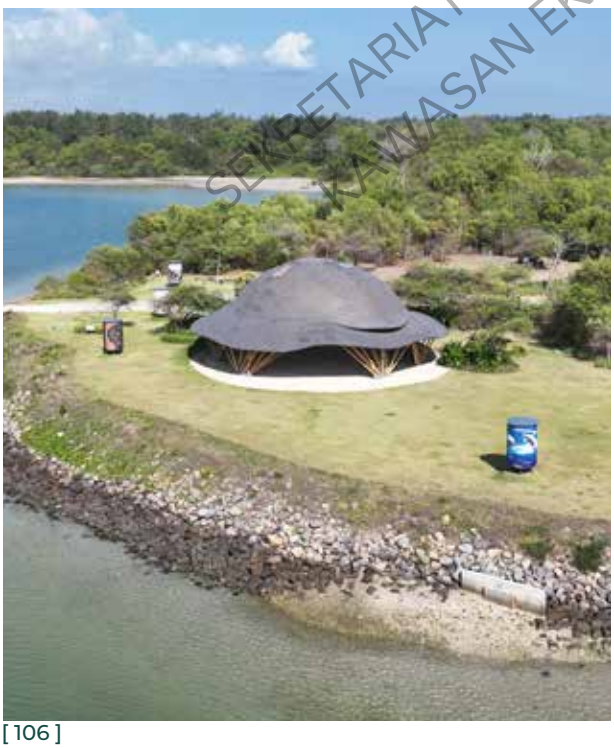

Saat ini, pembangunan *Grand Outlet Bali* dan ACS *Intercultural School* sedang dalam tahap awal, dengan pekerjaan pondasi yang sedang berlangsung. Kawasan ini juga menjadi tuan rumah berbagai acara internasional, salah satunya adalah upacara pembukaan *World Water Forum* 2024 pada Mei lalu.

Infrastruktur di KEK Kura Kura Bali telah dibangun secara menyeluruh, mencakup jalan, listrik, jaringan air bersih, sistem air limbah, drainase, gerbang, serta jaringan telekomunikasi berbasis fiber optic sepanjang 8 km yang mencakup sisi utara pulau.

Fokus pembangunan jalan ada pada segmen jalan 2, 8, dan 9 serta pembangunan instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1 & 2. Fasilitas pendukung lainnya seperti Kawasan Persampahan, Pemadam Kebakaran, dan fasilitas keamanan juga telah tersedia, menjadikan kawasan ini siap untuk pengembangan lebih lanjut.

Sedangkan pelaku usaha di KEK Kura Kura Bali yaitu PT Kura Kura Bali Development, merealisasikan investasi yang cukup besar untuk membangun beberapa proyek seperti Pembangunan *ACS Bali,* dan *UID Lodge (Dormitory)*.

KEK Kura Kura Bali berpotensi menjadi destinasi unggulan yang menggabungkan keindahan alam Bali dengan fasilitas modern, menjadikannya tempat yang ideal untuk pengembangan pariwisata dan industri kreatif di masa depan.



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



SALINAN
DEWAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS



Dari **Sabang** hingga **Merauke**
24 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
terus berpacu, melangkah bersama demi
mewujudkan **Indonesia Maju**

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



KEK DIGITAL

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

KEK NONGSA
Digital

Badan Usaha :
PT Taman Resor Internet (Tamarin)

Landasan Hukum :
PP No. 68 Tahun 2021

Beroperasi :
8 November 2022

Kegiatan Utama :
> IT Digital
> Pariwisata

Okupansi Lahan :
> TOTAL LUAS LAHAN : **166,45 ha**
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIKUASAI :
166,45 ha (100%)
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIMANFAATKAN :
141,26 Ha (84,87% dari luas lahan sesuai PP)

Kota Batam
Provinsi Kepulaun Riau

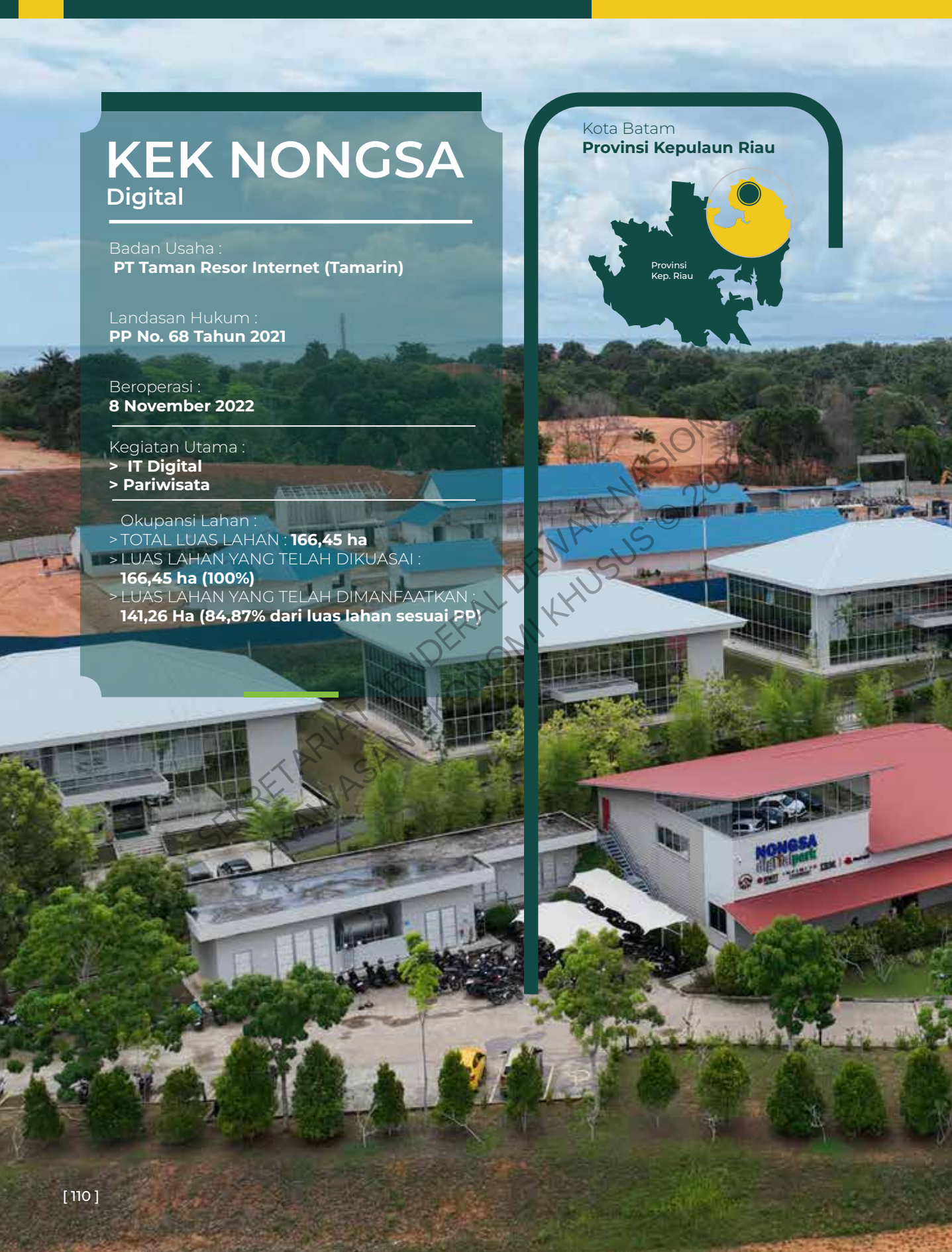

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL
PENGAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



Banyak Investor Tertarik, KEK Nongsa Lakukan Perluasan Kawasan

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS 2025

01 Capaian Kumulatif

Realisasi Investasi :

Rp **5,7 T**

Badan Usaha : **Rp 849,35 M**
Pelaku Usaha : **Rp 4,91 T**

Serapan Tenaga Kerja :

4.982 orang

Pelaku Usaha :

18

*data per **Desember 2024**

02 Capaian Tahun 2024

Realisasi Investasi :

Rp **3 T**

Rp **413 M**
Target **Investasi** 2024

>100%

100%

Serapan Tenaga Kerja :

637

346
Target Penyerapan **Tenaga Kerja** 2024

>100%

100%

Pelaku Usaha Baru :

0

*data per **Desember 2024**

KEK NONGSA : BANYAK INVESTOR TERTARIK, KEK NONGSA LAKUKAN PERLUASAN KAWASAN

KEK Nongsa terus memperkuat posisinya sebagai pusat ekosistem digital terintegrasi di Indonesia. Terletak di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, KEK Nongsa mencakup area seluas 166,45 hektar dan telah resmi beroperasi sejak 8 November 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2021.

KEK ini berfokus pada kegiatan usaha yang mencakup riset, ekonomi digital, pengembangan teknologi, pariwisata, pendidikan, dan industri kreatif. Pengelolaan KEK Nongsa dilakukan oleh PT Taman Resor Internet (Tamarin) sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP).



Hingga tahun 2024, KEK Nongsa telah berhasil mencatatkan investasi sebesar Rp5,7 T. Pencapaian ini melibatkan 18 pelaku usaha dan menciptakan lapangan kerja bagi 4.982 (termasuk 2.411 mahasiswa yang ikut program pendidikan vokasi IT hingga 2023). Pada periode 2024 saja, investasi mencapai Rp3 T dengan capaian tenaga kerja yang melampaui target, yaitu sebanyak 637 orang.

Sebagai kawasan yang berfokus pada pengembangan digital dan pariwisata, KEK Nongsa menawarkan ekosistem digital yang terintegrasi, termasuk keberadaan pusat data (data centre) dan pusat pengembangan talenta digital. Lokasi Batam yang dekat dengan Singapura menjadikannya sebagai titik masuk strategis serta jembatan digital bagi perusahaan teknologi internasional, terutama dari Singapura dan negara-negara lainnya.

Kehadiran perusahaan-perusahaan IT internasional diharapkan dapat mendorong transfer teknologi, sehingga Nongsa dapat berkembang menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia muda Indonesia yang unggul dalam bidang teknologi dan technopreneurship.

Perkembangan sektor digital, pendidikan, dan industri kreatif di KEK Nongsa hingga Juni 2024 menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Beberapa data center besar dunia, termasuk GDS, Gaw Capital, PDG, dan BW Digital, telah berinvestasi di KEK ini.

Pada sektor pendidikan, KEK Nongsa juga telah membentuk *Infinite Learning* di bawah PT Kinema Systrans Multimedia, yang bekerja sama dengan berbagai investor internasional, termasuk *Apple Developer Academy*.

Sejak awal pendirian, KEK Nongsa telah menjadi salah satu studio animasi terbesar di Asia Tenggara dan telah banyak mengerjakan proyek global di sektor industri animasi, seperti Kinema Studio di KEK Nongsa telah berhasil memproduksi sejumlah judul animasi untuk broadcaster internasional terkenal seperti *Netflix, HBO, Disney Jr, dan Nickelodeon, serta film-film layar lebar seperti Garfield, Peter Rabbit, Cocomelon, dan Unicorn Academy.* Di sisi pariwisata, KEK Nongsa telah terdapat villa dan hotel, marina serta golf yang telah beroperasi.

KEK Nongsa merupakan salah satu inisiatif penting pemerintah Indonesia khususnya kota Batam untuk mengembangkan ekonomi regional. Dengan lokasi strategis, fasilitas modern, dan beragam insentif investasi, KEK Nongsa dapat menjadi destinasi ideal bagi para investor yang ingin mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinamis.

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

KEK SINGHASARI
Digital

Kabupaten Malang
Provinsi Jawa Timur



Badan Usaha :
PT Intelegensia Grahatama

Landasan Hukum :
PP No. 68 Tahun 2019

Beroperasi :
8 November 2022

Kegiatan Utama :
> Pariwisata
> Pengembangan Teknologi

Okupansi Lahan :
> TOTAL LUAS LAHAN : **120,3 ha**
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIKUASAI :
115,6 ha (96%)
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIMANFAATKAN:
44,8 ha (37,2% dari Luas sesuai PP)

SEKRETARIAT JENDERAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2021



“Perkuliahan King's College London Sudah Dimulai, Babak Baru Pendidikan Tinggi di KEK

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2025

01 Capaian Kumulatif

Realisasi Investasi :

Rp **1,9 T**

Badan Usaha : **Rp 1,59 T**
Pelaku Usaha : **Rp 375 M**

Serapan Tenaga Kerja :

856 orang

Pelaku Usaha :

23

*data per **Desember 2024**

02 Capaian Tahun 2024

Realisasi Investasi :

Rp **499,2 M**

Rp **367,0 M**
Target **Investasi** 2024

Serapan Tenaga Kerja :

380

870
Target Penyerapan **Tenaga Kerja** 2024

Pelaku Usaha Baru :

0

*data per **Desember 2024**

KEK SINGHASARI : PERKULIAHAN KING'S COLLEGE LONDON SUDAH DIMULAI, BABAK BARU PENDIDIKAN TINGGI DI KEK

KEK Singhasari, yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur, telah berkembang pesat menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia dan talenta digital kelas dunia. KEK ini resmi beroperasi pada 8 November 2022, dengan luas area 120,3 hektar. Fokus utama pengembangan di kawasan ini adalah sektor pariwisata dan teknologi, yang dikelola secara profesional oleh PT Intelegensia Grahatama sebagai Badan Usaha Pengelola (BUPP).

Ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019, KEK Singhasari telah sukses menciptakan ekosistem digital yang komprehensif. Saat ini progres investasi di KEK Singhasari, yaitu:
1. Kampus King's College London (KCL)
2. Singhasari Animation Factory
3. Singhasari Film Factory
4. Singhasari Coding Factory
5. Singhasari Digital Factory

Hingga tahun 2024, KEK Singhasari telah menarik investasi senilai Rp1,9 triliun, menciptakan lapangan kerja bagi 856 orang, dan memfasilitasi 23 pelaku usaha. Periode tahun 2024, tercatat tambahan investasi sebesar Rp499,2 miliar, dengan penciptaan 380 lapangan kerja baru.



Tahun 2024 menjadi tahun yang penuh pencapaian bagi KEK Singhasari. Salah satu tonggak penting adalah peresmian *coding factory* pada bulan Juni 2024 oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. Selain itu, KEK Singhasari telah melaksanakan Inaugurasi Kelas Perdana Kampus Cabang KCL di KEK Singhasari pada 15 Oktober 2024 lalu.

Kehadiran KCL di KEK Singhasari diharapkan menjadi role model pendidikan di Indonesia, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berwawasan global. KCL, yang merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di dunia dengan peringkat top 40 menurut QS World University Rankings, berkomitmen untuk menghadirkan kualitas pendidikan yang setara dengan kampus utamanya. Dampak positif dari kehadiran KCL diharapkan tidak hanya dirasakan di Jawa Timur, tetapi juga di seluruh Indonesia.

KCL akan mengambil peran penuh dalam penyelenggaraan pendidikan program master degree, mulai dari pelaksanaan kurikulum perkuliahan hingga tenaga pengajar. Seluruh standar perkuliahan di KCL akan sepenuhnya diadaptasi di cabang KCL Singhasari. Di lain pihak, KEK Singhasari akan mengambil peran penuh dalam penyediaan infrastruktur, sarana prasarana, dan fasilitas pembelajaran untuk mahasiswa.

Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dampak besar bagi pengembangan SDM tidak hanya di Jawa Timur, tetapi juga di seluruh Indonesia. Ini merupakan langkah besar dalam menciptakan bangsa yang memiliki sumber daya manusia unggul dan siap bersaing di tingkat global.

Dukungan Pemerintah melalui KEK Singhasari berupa fasilitas dan insentif merupakan stimulus agar pembentukan pembangunan KEK nanti memberikan daya tarik, khususnya terkait kerja sama pendidikan.

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



Dari **Sabang** hingga **Merauke**
24 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
terus berpacu, melangkah bersama demi
mewujudkan **Indonesia Maju**

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



KEK JASA LAINNYA

SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

KEK SANUR

Jasa Lainnya

Badan Usaha :
PT Hotel Indonesia Natour

Landasan Hukum :
PP No. 41 Tahun 2022

Beroperasi :
31 Januari 2024

Kegiatan Utama :
> Kesehatan
> Pariwisata

Okupansi Lahan :
> TOTAL LUAS LAHAN : **41,26 ha**
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIKUASAI : **41,26 ha (100%)**
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIMANFAATKAN : **36,96 ha (89,58% dari luas lahan sesuai PP)**

Kota Denpasar
Provinsi Bali

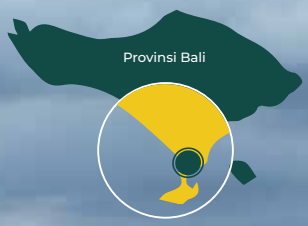

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



> **Fasilitas Penunjang Telah Berdiri, KEK Sanur Siap Jadi KEK Kesehatan Unggulan**

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

01 Capaian Kumulatif

Realisasi Investasi :
Rp **4,25 T**

Badan Usaha : **Rp27,5 M**
Pelaku Usaha : **Rp 4,22 T**

Serapan Tenaga Kerja :
3.826 orang

Pelaku Usaha :
11

*data per **Desember 2024**

02 Capaian Tahun 2024

Realisasi Investasi :
Rp **2,19 T**

Rp **1,380 M**
Target **Investasi** 2024

>100%

100%

Serapan Tenaga Kerja :
1.468

1.600
Target Penyerapan **Tenaga Kerja** 2024

91,75%

100%

Pelaku Usaha Baru :
8

*data per **Desember 2024**

KEK SANUR : FASILITAS PENUNJANG TELAH BERDIRI, KEK SANUR SIAP JADI KEK KESEHATAN UNGGULAN

KEK Sanur, yang berlokasi di Kota Denpasar, Provinsi Bali, resmi beroperasi pada 31 Januari 2024 dengan luas area 41,26 hektar. KEK ini mengintegrasikan sektor kesehatan dan pariwisata, yang dikelola oleh PT Hotel Indonesia Natour (HIN). Hingga tahun 2024, KEK Sanur telah mencatatkan investasi sebesar Rp4,25 triliun, dengan tenaga kerja sebanyak 3.826 orang dan 11 pelaku usaha. Di tahun 2024, KEK Sanur mencatatkan investasi baru sebesar Rp2,19 T, menyerap 1.468 tenaga kerja baru, dan menambah 8 pelaku usaha.

KEK Sanur yang ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 Tahun 2022, merupakan KEK kesehatan pertama di Indonesia didirikan dengan visi menjadi *"World Class Medical & Wellness Destination"* dilengkapi fasilitas kesehatan dan pariwisata terintegrasi berstandar internasional. Salah satu fasilitas KEK Sanur yaitu International Medical Facility yang membawa *Top Notch Brands*, menghadirkan *Best Technology & Medicines* serta *Expertise* untuk menciptakan *Seamless Experience* bagi pengunjung.

KEK Sanur menghadirkan alur perjalanan *end to end* yang mengintegrasikan layanan kesehatan dan pariwisata dengan berbagai fasilitas berstandar internasional dan sebagai langkah transformatif strategis untuk menjawab tantangan ribuan masyarakat Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri.

Pengembangan KEK Sanur telah memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi lokal. Dengan penambahan 1468 orang tenaga kerja baru di bidang lapangan, perhotelan, dan rumah sakit, KEK ini berhasil menciptakan peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Pekerjaan baru ini meliputi dokter, perawat, tenaga medis pendukung, serta pekerja hotel dan jasa lainnya.

PT HIN yang ditetapkan sebagai Badan usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Sanur berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 6 Tahun 2022, berkomitmen terus melakukan terobosan dalam mendukung pengembangan KEK Sanur yang diharapkan dapat menjadi diversifikasi ekonomi bagi pariwisata Indonesia.

KEK Sanur juga berkontribusi dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal melalui Sentra UMKM Sanur. Sentra UMKM ini menyediakan kios untuk pelaku usaha lokal, memungkinkan mereka untuk meningkatkan daya saing dan aksesibilitas produk mereka kepada wisatawan dan masyarakat sekitar. Fasilitas ini juga dilengkapi dengan balai nelayan dan panorama deck dengan sentuhan kearifan lokal Bali.

PT HIN atau *InJourney Hospitality* mengungkapkan bahwa pengembangan Sentra UMKM Sanur ini menjadi bukti komitmen berkelanjutan pemerintah melibatkan para pemangku kepentingan setempat untuk berkolaborasi bersama pelaku usaha lokal, mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor UMKM.

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



Dengan beroperasinya KEK Sanur, diharapkan dapat menyerap hingga 43.000 tenaga kerja pada tahun 2045 dan berkontribusi berkontribusi dalam mengurangi kebutuhan berobat ke luar negeri yang diproyeksikan menghemat devisa hingga total Rp86 triliun serta penambahan devisa pada periode yang sama mencapai total Rp19,6 triliun.

Pertumbuhan ekonomi lokal juga didukung oleh peningkatan jumlah pelaku usaha di KEK Sanur, yang mencakup berbagai sektor seperti kesehatan, perhotelan, dan jasa.



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

KEK BATAM AERO TECHNIC (BAT)

Jasa Lainnya

Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau

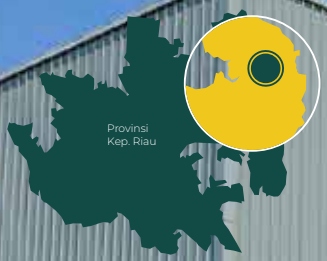

Badan Usaha :
PT. Batam Teknik

Landasan Hukum :
PP No. 67 Tahun 2021

Beroperasi :
8 November 2022

Kegiatan Utama :
> Industri MRO Pesawat

Okupansi Lahan :
> TOTAL LUAS LAHAN : **30 ha**
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIKUASAI : **30 ha (100%)**
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIMANFAATKAN : **24 ha (80% dari luas lahan sesuai PP)**

DEWAN NASIONAL KEK
DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



> **Lengkapi Fasilitas dan Infrastruktur Penunjang, KEK BAT jadi Pusat MRO Pesawat di Indonesia**

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

01 Capaian Kumulatif

Realisasi Investasi :
Rp **1,15 T**
Badan Usaha : **-**
Pelaku Usaha : **Rp 1,15 T**

Serapan Tenaga Kerja :
2.269 orang

Pelaku Usaha :
1
*data per **Desember 2024**

02 Capaian Tahun 2024

Realisasi Investasi :
Rp **354 M**
Rp **673 M**
Target **Investasi** 2024
52,6%

Serapan Tenaga Kerja :
359
300
Target Penyerapan **Tenaga Kerja** 2024
119%

Pelaku Usaha Baru :
1
*data per **Desember 2024**

KEK BATAM AERO TECHNIC : LENGKAPI FASILITAS DAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG, KEK BAT JADI PUSAT MRO PESAWAT DI INDONESIA

Hingga tahun 2024, KEK Batam Aero Technic (BAT) menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan, memperkuat posisinya sebagai pusat *Maintenance, Repair, and Overhaul* (MRO) pesawat terbesar di Indonesia. KEK BAT, yang berlokasi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, telah mencatatkan investasi sebesar Rp 1,15 triliun, dengan tambahan investasi Rp 354 miliar pada tahun 2024.

Selain itu, kawasan ini berhasil menyerap 2.269 tenaga kerja, dengan 359 orang direkrut pada periode tahun 2024. Pengembangan KEK BAT didorong oleh kebutuhan mendesak akan layanan MRO di kawasan Asia Pasifik.

KEK BAT saat ini telah memiliki empat hanggar *maintenance* yang dapat menampung hingga 25 pesawat jenis *narrow body*. Ke depannya akan membangun hingga 10 hanggar yang diestimasikan dapar menampung hingga 50 pesawat *narrow body*. Terdapat 1 hanggar *painting* dan 1 hanggar *cleaning* yang belum tersedia di MRO Indonesia.

Dengan penambahan hanggar F dan G di tahun 2025 maka akan menambah kapasitas produksi sebanyak 24 slot pesawat dimulai triwulan 3 tahun 2025 dan 31 slot pesawat dimulai triwulan 4 tahun 2025.

Dengan berbagai inovasi tersebut, KEK BAT menargetkan akan menjadi 5 besar Asia Pacific MRO *Market Leaders* atau Pemimpin Pasar MRO Asia Pasifik.

Pengembangan KEK BAT tidak hanya berdampak pada sektor aviasi, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar Bandara Internasional Hang Nadim.

Saat ini, masyarakat Batam memiliki lebih banyak kesempatan bekerja di sektor industri penerbangan yang terus berkembang. Selain itu, pelatihan yang diberikan BAT kepada karyawannya membantu mengembangkan keterampilan khusus yang diperlukan dalam bidang perawatan komponen pesawat, memberikan dampak jangka panjang bagi pengembangan tenaga kerja lokal.

KEK BAT juga diharapkan dapat menurunkan biaya perawatan pesawat di dalam negeri, yang berpotensi menurunkan harga tiket pesawat secara nasional dan meningkatkan arus penumpang ke Batam. Dengan perkembangan ini, KEK Batam Aero Technic siap menjadi pemain kunci dalam industri MRO di Asia Pasifik, berkontribusi signifikan terhadap daya saing Indonesia di sektor aviasi.



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

KEK EDUKASI, TEKNOLOGI, DAN KESEHATAN INTERNASIONAL BANTEN

Jasa Lainnya

Badan Usaha :
PT Surya Inter Wisesa (SIW)

Landasan Hukum :
PP Nomor 38 Tahun 2024

Beroperasi :
-

Kegiatan Utama :
> Riset, Ekonomi Digital, dan Pengembangan teknologi
> Pendidikan
> Kesehatan
> Industri Kreatif

Okupansi Lahan :
> TOTAL LUAS LAHAN : **59,68 ha**
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIKUASAI : **33,17 ha (55,57%)**

Kabupaten Tangerang
Provinsi Banten

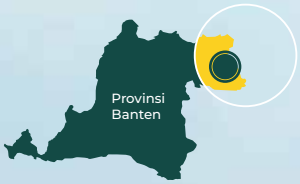

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



“ Pusat Pendidikan, Kesehatan, dan Teknologi di Indonesia

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

01 Rencana Investasi dan Tenaga Kerja

Sampai Dengan 20 Tahun :

Rp 18,8 T

Badan Usaha : **Rp 18,1 T**
Pelaku Usaha : **Rp 736 M**

Serapan Tenaga Kerja

13.446 orang

Investor Utama

- **Monash University – Pendidikan**
- **Increase Biotechnologies – Riset Kesehatan**
- **Universitas Bina Nusantara – Pendidikan**

*data per **Desember 2024**

KEK EDUKASI, TEKNOLOGI, DAN KESEHATAN INTERNASIONAL BANTEN : PUSAT PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN TEKNOLOGI DI INDONESIA

Terletak di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional (ETKI) Banten menjadi salah satu KEK paling muda di Indonesia. Ditetapkan pada 7 Oktober 2024, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2024, KEK ETKI Banten bergerak di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan internasional dengan pengembangan teknologi digital yang diusulkan oleh PT Surya Inter Wisesa (SIW), anak perusahaan PT Bumi Serpong Damai (BSD).

Dengan target realisasi investasi sebesar Rp18,8 triliun saat beroperasi penuh, KEK ETKI Banten diharapkan dapat menyerap tenaga kerja hingga 13.446 orang. KEK ini akan menjadi pusat pendidikan internasional dengan beroperasinya *Monash University*, sebagai salah satu universitas terbaik ke-37 di dunia, bidang riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi dengan target 100 *start-up*, bidang kesehatan dengan pelayanan yang terintegrasi, serta industri kreatif.

Kawasan dengan area sebesar 59,68 hektar ini bertujuan mempercepat penciptaan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Selain berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal, KEK ini juga dirancang untuk mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional.

PT Surya Inter Wisesa, sebagai BUPP, membawa jaringan praktisi kesehatan internasional yang berfokus pada estetika medis, sementara di bidang teknologi, kawasan ini akan menjadi pusat digital *(digital hub)* dan inkubator bagi perusahaan rintisan *(start-up)*. Kehadiran perguruan tinggi luar negeri di kawasan ini juga akan memperkaya ekosistem pendidikan, menjadikan KEK ini sebagai pusat inovasi, teknologi, dan pendidikan berstandar internasional.

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024







SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

KEK PARIWISATA DAN KESEHATAN INTERNASIONAL BATAM

Jasa Lainnya

Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau



Badan Usaha :
PT Karunia Praja Pesona

Landasan Hukum :
PP Nomor 39 Tahun 2024

Beroperasi :
-

Kegiatan Utama :
> Pariwisata
> Kesehatan

Okupansi Lahan :
> TOTAL LUAS LAHAN : **47,17 ha**
BP Batam: **11,96 Ha**
PT KPP: **35,21 Ha**
> LUAS LAHAN YANG TELAH DIKUASAI :
47,17 ha (100%)

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



“Magnet Baru Pariwisata Kesehatan Indonesia

01 Capaian Kumulatif

Realisasi Investasi :
Rp **43 M**
Badan Usaha : **Rp 32 M**
Pelaku Usaha : **Rp 11 M**

Serapan Tenaga Kerja :
5 orang

Pelaku Usaha :
-

*data per **Desember 2024**

02 Kontribusi PDRB

Sampai Dengan 80 Tahun - 2103 :
± 1,03% per tahun, atau setara dengan rata-rata
Rp **18,8 Triliun.**

*data per **Desember 2024**

03 Rencana Investasi dan Tenaga Kerja

Sampai Dengan 20 Tahun :
Potensi memberikan devisa sebesar Rp 1.909 Triliun
- Menahan devisa keluar sebesar 2% per tahun atau sekitar Rp 1.806 Triliun
- Devisa masuk sebesar ± Rp 103 Triliun

Serapan Tenaga Kerja
± 105.406 pekerja.
- 86.503 pekerja tidak langsung
- 18.903 pekerja langsung

Investor Utama
- Mayapada Group
- Intiland
- Modern Group
- PT Petarung Tangguh Persada
- PT Sejahtera Alam Properti

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

KEK PARIWISATA DAN KESEHATAN INTERNASIONAL BATAM : MAGNET BARU PARIWISATA KESEHATAN INDONESIA

Sebagai salah satu pusat industri dan perdagangan utama di Indonesia, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau kini mengembangkan potensi baru yang tak kalah menjanjikan, dengan dihadirkannya KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam (PKIB). KEK ini ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2024 pada 7 Oktober 2024 yang diinisiasi oleh PT Karunia Praja Pesona.

Berdiri di atas lahan seluas 47,17 hektar, KEK PKIB diharapkan mampu menghadirkan layanan kesehatan berstandar internasional dengan menggandeng Apollo Hospitals, penyedia layanan kesehatan swasta terbesar di India. Apollo dikenal karena kemampuannya menyediakan perawatan berkualitas internasional dengan biaya yang kompetitif. Dengan spesialisasi dalam berbagai layanan kesehatan canggih seperti onkologi, kardiologi, neurologi, serta perawatan bedah berbasis robotic. Kehadiran Apollo di Batam akan membuka peluang bagi KEK ini untuk menawarkan perawatan kelas dunia.


Sumber Foto : www.freepik.com

KEK PKIB yang akan mulai pembangunannya pada 2025 menargetkan realisasi investasi hingga Rp 6,91 Triliun dengan potensi menyerap tenaga kerja sebanyak 105.406 orang. Apollo Hospital India selaku investor utama berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan layanan kesehatan berstandar internasional dan peningkatan medical-tourism, yang ditargetkan akan rampung dan beroperasi di tahun 2026. Dengan dibentuknya KEK PKIB, dalam lima tahun pertama, KEK PKIB diharapkan dapat menghemat devisa hingga Rp500 Miliar dan menghasikan devisa masuk Rp400 Miliar.

KEK PKIB akan menjadi magnet bagi warga Indonesia yang sebelumnya berobat di luar negeri. Selain itu, KEK ini diharapkan menjadi pusat layanan kesehatan terdepan yang dapat bersaing dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Ini akan memperkuat posisi Batam sebagai destinasi pariwisata kesehatan regional yang kompetitif, sekaligus mengurangi pengeluaran devisa melalui peningkatan layanan medis dalam negeri, sehingga masyarakat Indonesia tidak perlu lagi mencari perawatan ke luar negeri.

Hadirnya KEK Kesehatan di Batam ini juga menciptakan multiplier effect bagi beberapa sektor, seperti konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum, *real estate*, jasa pendidikan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial di daerah sekitar Batam.


Sumber Foto : www.freepik.com

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2021



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

Sumber Foto : www.freepik.com



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

BAB



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

USULAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

KRITERIA LOKASI PENGUSULAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

“ Pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memerlukan pertimbangan yang cermat, mengingat dampak strategisnya terhadap perkembangan ekonomi nasional. Setiap lokasi yang diusulkan sebagai KEK harus memenuhi sejumlah kriteria penting. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan KEK berjalan dengan tertib dan memberikan manfaat maksimal.

KRITERIA LOKASI USULAN KEK DAPAT DIBAGI MENJADI TIGA:

Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung.

Mempunyai batas yang jelas.

Lahan yang diusulkan menjadi KEK telah dikuasai paling sedikit 50% dari yang telah direncanakan.

Sumber :

> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

> Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK.

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024





SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KEK MELAKUKAN KAJIAN TERHADAP DOKUMEN PERSYARATAN BERDASARKAN PASAL 17, 18, 19, DAN 20 PP 40 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEK, SEHINGGA PROSES PENGUSULAN KEK MEMPERTIMBANGKAN POTENSI YANG ADA MELALUI PENYIAPAN KAWASAN YANG MEMILIKI KEUNGGULAN GEOEKONOMI DAN GEOSTRATEGI. OLEH KARENA ITU, POTENSI KEK BARU MAMPU MENAMPUNG KEGIATAN INDUSTRI, EKSPOR, IMPOR, DAN KEGIATAN EKONOMI LAINNYA YANG MEMILIKI NILAI EKONOMI TINGGI DAN DAYA SAING INTERNASIONAL.

Dewan Nasional KEK telah menerima beberapa usulan baru KEK, dengan kegiatan utama yang beragam, yaitu:

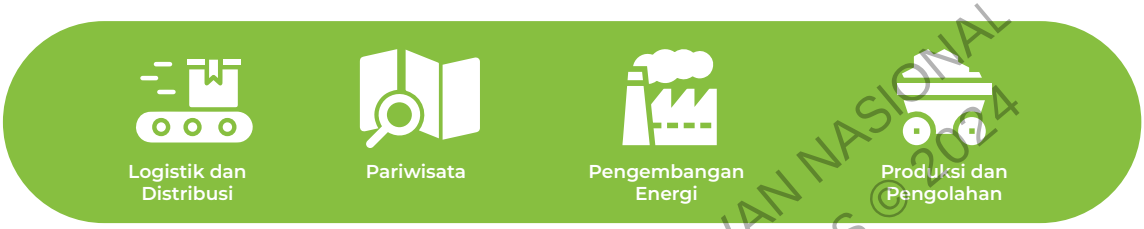

Dewan nasional bersama Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus melakukan pengkajian atas usulan tersebut untuk dijadikan KEK dan merekomendasikan pembentukan KEK kepada Presiden

Saat ini terdapat 8 proses penetapan usulan KEK baru yaitu usulan KEK Nipa, Industri Hijau Bungku, Industri Kimia Kutai Timur, Industri Petrokimia dan Elektronika Patimban, Industri Teknologi Terpadu Subang, Industropolis Batang, Mangkupadi, 1 usulan perubahan kegiatan usaha KEK Singhasari dan 1 usulan perluasan KEK Nongsa.

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024





USULAN KEK

NIPA



LOKASI :
Pulau Nipa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

LUAS LAHAN :
4.505 Ha (Dikuasai 100%)

PENGUSUL :
PT Asinusa Putra Sekawan

KEGIATAN USAHA :
> Logistik dan Distribusi
> Pengembangan Energi

INVESTASI HINGGA 50 TAHUN:
Rp 16,46 triliun
> Pelaku Usaha : Rp 15,97 triliun
> Badan Usaha : Rp 494 miliar

TENAGA KERJA DALAM 50 TAHUN:
40.949 orang
> Langsung 557 orang
> Tidak langsung 40.392 orang

KONTRIBUSI PDRB DALAM 50 TAHUN:
Rp24,1 triliun

INDUSTRI HIJAU BUNGKU

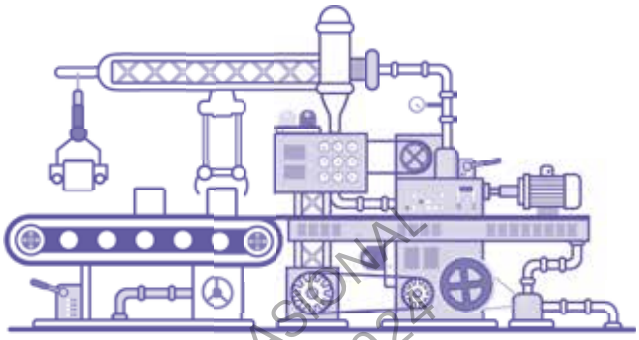

LOKASI :
Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah

LUAS LAHAN :
1.077,6 Ha (Dikuasai 76,51%)

PENGUSUL :
PT Anugrah Tambang Industri

KEGIATAN USAHA :
> Produksi dan Pengolahan
> Logistik dan Distribusi
> Pengembangan Energi

INVESTASI DALAM 30 TAHUN :
Rp135,38 triliun
> Pelaku Usaha: Rp133,5 triliun
> Badan Usaha: Rp1,88 triliun

TENAGA KERJA DALAM 30 TAHUN :
136.000 orang
> Langsung: 64.000 orang
> Tidak Langsung: 72.000 orang

KONTRIBUSI PDRB DALAM 30 TAHUN :
> Kabupaten Morowali: Rp85,5 triliun (4,75%)
> Provinsi Sulawesi Tengah: Rp85,5 triliun (2,95%)

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

INDUSTRI HALAL SIDOARJO

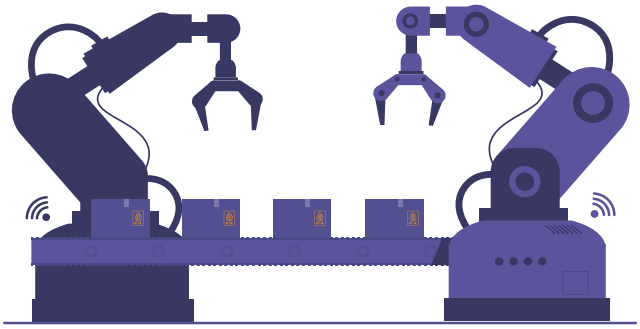

LOKASI :
Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

LUAS LAHAN :
796,65 Ha (Dikuasai 59,49%)

PENGUSUL :
PT Makmur Berkah Amanda Tbk

KEGIATAN USAHA :
> Produksi dan Pengolahan
> Logistik dan Distribusi

INVESTASI DALAM 30 TAHUN :
Rp97,8 triliun
> Pelaku Usaha: Rp91,1 triliun
> Badan Usaha: Rp6,7 triliun

TENAGA KERJA DALAM 30 TAHUN :
317.670 orang
> Langsung 184.023 orang
> Tidak langsung 133.647 orang

KONTRIBUSI PDRB RATA-RATA PER TAHUN :
> Kabupaten Sidoarjo: Rp844 miliar (15,8%)
> Provinsi Jawa Timur: Rp8,5 miliar (1,591%)

INDUSTRI KIMIA KUTAI TIMUR

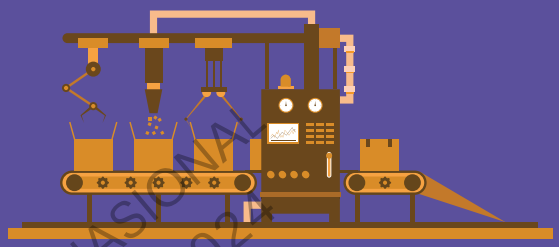

LOKASI :
Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan TImur

LUAS LAHAN :
748,9 Ha (Dikuasai 85,64%)

PENGUSUL :
PT Batuta Chemical Industrial Park

KEGIATAN USAHA :
> Produksi dan Pengolahan
> Logistik dan Distribusi
> Pengembangan Energi

INVESTASI DALAM 30 TAHUN :
Rp61,51 triliun
> Pelaku Usaha: Rp51,3 triliun
> Badan Usaha: Rp10,21 triliun

TENAGA KERJA DALAM 30 TAHUN :
432.964 orang
> Langsung: 207.856 orang
> Tidak Langsung: 225.108 orang

KONTRIBUSI PDRB RATA-RATA PER TAHUN :
> Kabupaten Kutai Timur: Rp75,33 triliun (3,95%)
> Provinsi Kalimantan Timur: Rp75,33 triliun (1%)

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

USULAN KEK

INDUSTRI PETROKIMIA DAN ELEKTRONIKA PATIMBAN

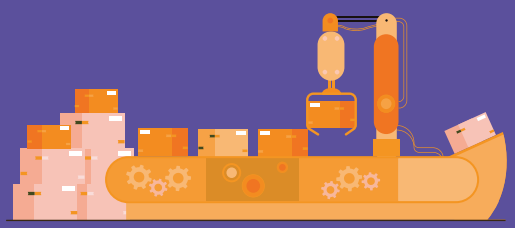

LOKASI :
Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat

LUAS LAHAN :
511 Ha (Dikuasai 71,5%)

PENGUSUL :
PT Wahana Mitra Semesta

KEGIATAN USAHA :
> Produksi dan Pengolahan
> Logistik dan Distribusi

INVESTASI DALAM 30 TAHUN :
Rp141,6 triliun
> Pelaku Usaha: Rp135,59 triliun
> Badan Usaha: Rp6,01 triliun

TENAGA KERJA DALAM 30 TAHUN :
156.154 orang
> Langsung 40.258 orang
> Tidak langsung 115.896 orang

KONTRIBUSI PDRB RATA-RATA PER TAHUN :
> Kabupaten Subang: Rp5,52 triliun (6,1%)
> Provinsi Jawa Barat: Rp10,98 triliun (0,26%)

INDUSTRI TEKNOLOGI TERPADU SUBANG



LOKASI :
Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat

LUAS LAHAN :
481,93 Ha (Dikuasai 53,42%)

PENGUSUL :
PT Aneka Bumi Cipta (ABC)

KEGIATAN USAHA :
> Produksi dan Pengolahan
> Logistik dan Distribusi

INVESTASI DALAM 27 TAHUN :
Rp134,59 triliun
> Pelaku Usaha: Rp130,59 triliun
> Badan Usaha: Rp4 triliun

TENAGA KERJA DALAM 27 TAHUN :
95.139 orang
> Langsung: 37.948 orang
> Tidak Langsung: 57.191 orang

KONTRIBUSI PDRB :
> Kabupaten Subang: Rp190,3 triliun (58,78%)
> Provinsi Jawa Barat: Rp475,9 triliun (7,13%)

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

USULAN KEK

INDUSTROPOLIS BATANG



LOKASI :
Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah

LUAS LAHAN :
2.886,87 Ha (Dikuasai 100%)

PENGUSUL :
PT Kawasan Industri Terpadu Batang

KEGIATAN USAHA :
> Produksi dan Pengolahan
> Logistik dan Distribusi
> Pariwisata

INVESTASI DALAM 80 TAHUN :
Rp130,26 triliun
> Pelaku Usaha: Rp125,5 triliun
> Badan Usaha: Rp4,76 triliun

TENAGA KERJA DALAM 30 TAHUN :
325.651 orang
> Langsung 266.658 orang
> Tidak langsung 58.993 orang

KONTRIBUSI PDRB DALAM 80 TAHUN :
> Kabupaten Batang: Rp26,89 triliun (28,58%)
> Provinsi Jawa Tengah: Rp26,89 triliun (0,49%)

MANGKUPADI



LOKASI :
Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara

LUAS LAHAN :
11.696,53 Ha (Dikuasai 67,37%)

PENGUSUL :
PT Kalimantan Industrial Park Indonesia

KEGIATAN USAHA :
> Produksi dan Pengolahan
> Logistik dan Distribusi
> Pengembangan Energi

INVESTASI DALAM 37 TAHUN :
Rp504 triliun
> Pelaku Usaha : Rp490 triliun
> Badan Usaha : Rp14 triliun

TENAGA KERJA DALAM 37 TAHUN :
140.796 orang
> Langsung 128.274 orang
> Tidak langsung 12.522 orang

KONTRIBUSI PDRB RATA-RATA PER TAHUN :
> Kabupaten Bulungan: Rp42 triliun (87%)
> Provinsi Kalimantan Utara: Rp42 triliun (31%)

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

USULAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA KEK

SINGHASARI

PERATURAN PEMERINTAH (PP) :
Perubahan PP 68 Tahun 2019 tentang KEK Singhasari

PENGUSUL :
PT Intelegensia Grahatama

KEGIATAN USAHA :
> Riset, Ekonomi Digital dan Pengembangan Teknologi
> Pariwisata
> Pendidikan
> Industri Kreatif

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024



USULAN PERLUASAN KEK

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

NONGSA

LOKASI :
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

PERLUASAN KEK NONGSA :
21,59 Ha (Dikuasai 53,12%)

PENGUSUL :
PT Taman Resor Internet (PT Tamarin)

KEGIATAN USAHA :
> Riset, Ekonomi Digital & Pengembangan Teknologi
> Pariwisata
> Pendidikan
> Industri Kreatif
> Ekonomi lain

INVESTASI HINGGA TAHUN 2030 :
Rp20,075 triliun
> Pelaku Usaha : Rp20 triliun
> Badan Usaha : Rp75 Miliar

TENAGA KERJA HINGGA TAHUN 2030 :
4.500 orang
> Langsung 4.200 orang
> Tidak langsung 300 orang



DEWAN NASIONAL
KHUSUS © 2024

BAB



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

KEBUTUHAN DUKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

Kebutuhan Dukungan

1) Kementerian Perhubungan

No.	KEK	KLASTER	KEBUTUHAN DUKUNGAN K/L	PERKEMBANGAN DAN USULAN TINDAK LANJUT
1.	KEK Mandalika, KEK Likupang, KEK Tanjung Sauh	Perhubungan Laut	**Dukungan pemrosesan perizinan pembangunan terminal khusus**	Kemenhub menyampaikan bahwa berdasarkan PP 40/2120 administrator KEK adalah unit kerja yang menyelenggarakan perizinan berusaha melalui OSS. sehingga di KEK menjadi kewenangan Administrator selaku pemilik hak akses OSS. Jika ada verif lapangan diharapkan dapat berkoordinasi dengan KSOP setempat. Seluruh perizinan telah dilayani full online melalui aplikasi Simlala (Sistem Perizinan Laut).
2.	KEK Tanjung Lesung		**Dukungan Penetapan Marina Tanjung Lesung sebagai Pelabuhan Singgah Embarkasi dan Debarkasi Kapal Pesiar Asing**	• Kemenhub menyampaikan bahwa perlu identifikasi atas kemampuan wilayah ruang laut pada pelabuhan eksisting untuk menjadi lokasi transit. Terkait hal ini beradaa di luar kewenangan Dit Kepelabuhanan. • BUPP KEK Tanjung Lesung akan koordinasi langsung ke Direktorat Angkutan Laut.
3.	KEK Galang Batang		**Dukungan Percepatan Permohonan PKKPRL untuk Kepentingan Perluasan Pelabuhan /TUKS KEK Galang Batang**	• Kemenhub menyampaikan bahwa PKKPRL menjadi tanggung jawab KKP • Terkait permohonan PKKPRL untuk Perluasan Pelabuhan di KEK Galang Batang akan dibahas bersama KKP
4.	KEK Sei Mangkei		**Percepatan penerbitan Izin Operasional Dry Port**	• Kemenhub menyampaikan bahwa izin operasional Dryport dapat diterbitkan setelah adanya kerja sama konsesi antara KSOP Kuala Tanjung dan BUP Dryport. • Selain itu sesuai dengan Permenhub 48/2021 tentang konsesi kerja sama bentuk lainnya, terdapat persyaratan konsesi melalui penugasan penunjukkan BUP dimana lahan harus dimiliki oleh BUP. • Ditjen Hubla diminta memberikan tanggapan atas surat PT KINRA terkait poin-poin yang perlu dipenuhi
5.	KEK MBTK		**Pengurusan Izin Sewa Pelabuhan Maloy KEK MBTK**	• Kemenhub menyampaikan bahwa telah diterbitkan persetujuan operasi per 11 sep 2024 • Terkait izin pemanfaatan 31 juli 2024, BUPP perlu koordinasi dengan KSOP dan KUPP untuk menginventarisasi BMN dan skema pemanfaatannya • Terkait izin pemanfaatan 14 Okt 2024 terkait tanggapan sewa BMN du KUPP sangkulirang, BUPP KEK perlu menyiapkan data dukung, data BUP, dan BMN yang akan disewakan. • BUPP KEK MBTK menyampaikan saat ini sudah berproses namun atas nama PT Hijau Nusantara Terminal, sedangkan yang mengajukan PT Kaltim Bhakti Samudra. Selain itu, disampaikan juga kebutuhan ekspor dari tenant dan dibutuhkan kepastian apakah dengan izin operasional yang sudah terbit memungkinkan, namun perlu pertemuan lebih lanjut dengan pemangku kepentingan untuk pembahasan hal tersebut.
6.	KEK Sorong		**Percepatan review Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Pelabuhan Sorong untuk pengembangan Pelabuhan Arar**	• Kemenhub menyampaikan bahwa berdasarkan data dari Bappeda Kab Sorong tahun 2022, terdapat 4 PU yang sudah operasional (logistik, aspal curah, pengolahan kayu) • Pelabuhan Arar ditujukan untuk meminimalisir biaya logistik di KEK Sorong • Dokumen Lingkungan menjadi sarat pengembangan KEK Sorong • Pelindo masih melakukan perbaikan dokumen untuk pengajuan RIP • BUPP KEK memberikan tanggapan bahwa Dokumen amdal Pelabuhan Arar sudah ada sejak tahun 2021. Rencana pengembangan pelabuhan yang meliputi perpanjangan dermaga dari 100 - 300m, reklamasi seluas 3 ha,dan kajian teknis untuk kapal 30 GT perlu dilakukan adendum amdal. Hingga saat ini belum ada alokasi anggaran dari Pemprov Papua Barat Daya. • Diharapkan Pelabuhan Arar dapat segera dikembangkan untuk mendukung rencana bisnis SPBE PT MOW.
7.	KEK Kendal		**Dukungan fasilitasi perizinan sesuai PM 48/2021 tentang Proses Konsensi dan PM 112/2017 tentang Perencanaan Pelabuhan**	• Kendal membutuhkan review RIP Tanjung Emas • Substansi RIP Tanjung Emas bisa dikoordinasikan oleh BUPP KEK Kendal • BUPP KEK menyampaikan bahwa Pelabuhan Kendal terintegrasi dengan Tanjung Mas Semarang. Seluruh persiapan sudah siap untuk dibangun oleh swasta. BUPP KEK perlu kepastian dasar perizinannya.

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS 2024

No.	KEK	KLASTER	KEBUTUHAN DUKUNGAN K/L	PERKEMBANGAN DAN USULAN TINDAK LANJUT
8.	KEK Kura Kura Bali	Perhubungan Laut	**Kepastian kewenangan pelaksanaan normalisasi alur laut**	• Kemenhub menyampaikan bahwa telah ada surat dari Dirjen kepada BUPP untuk segera mengajukan perizinan berusaha dan persetujuan pengerukan kepada Administrator KEK dengan koordinasi KSOP kelas II untuk pemenuhan keselamatan pelayaran. • BUPP KEK memberikan tanggapan bahwa surat yang dimaksud adalah lagoon, untuk itu akan dilakukan update kajian independen. • Terkait IUTK diarahkan untuk tidak dilanjutkan, karena termasuk ke dalam PBUMKU. • BUPP KEK juga telah melakukan koordinasi dengan KSOP dan HUBLA pada 30 Oktober 2024, arahan untuk pengambilan PNBP atas PB-UMKU diberikan kepada administrator. Hingga saat ini belum ada kepastian terkait PNBP yang harus dibayarkan ke Administrator.
9.	KEK Morotai	Perhubungan Udara	**Peningkatan layanan penerbangan menuju lokasi KEK**	• Saat ini terdapat rute wings air rute Ternate - Morotai PP dengan frekuensi 1x dalam seminggu (setiap hari rabu), jika sudah ada rute penerbangan reguler, tidak dapat diberikan rute penerbangan perintis. • Secara regulasi, harga tiket dari dan ke Morotai masih masuk batas atas, harga tersebut dikarenakan rendahnya *demand* terhadap penerbangan dari dan ke Morotai. • Selain itu terdapat moda transportasi laut dari Morotai ke Ternate dengan harga yang lebih terjangkau yang menjadikan *demand* terhadap transportasi udara dari dan ke Morotai masih rendah • BUPP menyampaikan setelah adanya dukungan Kemenhub terkait peningkatan daya dukung *runway* dan *taxiway* di tahun 2025, dibutuhkan juga kepastian terkait peningkatan status bandara Pitu Morotai menjadi Bandara Internasional. BUPP juga menyampaikan kebutuhan terkait penambahan rute dari Kao ditarik ke Morotai. Terkait harga tiket, BUPP KEK Morotai masih mengharapkan adanya penurunan harga. Selain kebutuhan dukungan perhubungan udara, disampaikan juga kebutuhan dukungan perhubungan laut berupa penambahan frekuensi tol laut di Pulau Morotai. • Kementerian Perhubungan akan melakukan pengembangan transportasi udara di KEK Morotai berupa peningkatan daya dukung *runway* dan *taxiway* pada TA. 2025.
10.	KEK Tanjung Kelayang		**Peningkatan layanan penerbangan menuju lokasi KEK**	• Direktorat Angkutan Udara telah bersurat kepada beberapa maskapai per 18 januari 2024 perihal Penawaran Rute Penerbangan dari dan ke Tj. Pandan dalam rangka mendukung KEK Tanjung Kelayang. • BUPP menyampaikan Forum internasional yang telah diajukan banyak dibatalkan karena terbatasnya opsi maskapai penerbangan, saat ini sudah dilakukan koordinasi dgn Direktorat Pelabuhan Udara. BUPP KEK juga menyampaikan dukungan rekomendasi dari Kemenhub untuk maskapai BUMN (Garuda dan Pelita) terbang ke Pulau Belitung. • Selain itu, perlu ditinjau kembali *internasional entry point* (Bandara H.A.S. Hanandjoeddin) sebagai sarana agar KEK Tj Kelayang dapat membantu meningkatkan devisa dan pariwisata di Pulau Belitung.
11.	KEK Tanjung Lesung	Perkerertaapian	**Re-Aktivasi KA Rangkasbitung - Labuan**	• Bandara Pandeglang sudah masuk tentang tatanan kebandarudaraan nasional, adapun untuk penlok sudah dimiliki namun dengan usia lebih dari 5 tahun • sudah ada pembuatan review 2017 untuk bandara pandeglang, namun review tsb belum disampaikan kepada kementerian perhubungan. Selain itu, belum melihat peran Prov Banten terkait pembebasan lahan. • DJKA menyampaikan bahwa sudah diterima anggaran untuk penertiban, sebesar 111 miliar (rencana realisasi tahap 1, 2025-2027). Sedangkan Tahap 2 akan dilakukan pada 2028-2029 (realsisasi pembangunan).

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS 2024

Kebutuhan Dukungan

2) Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kementerian Kehutanan

No.	KEK	KLASTER	KEBUTUHAN DUKUNGAN K/L	PERKEMBANGAN DAN USULAN TINDAK LANJUT
1.	Seluruh KEK	Pengendalian Pencemaran dan Kawasan Lingkungan	**Pengendalian Pencemaran dan Kawasan Lingkungan**	Sinkronisasi OSS dengan Amdalnet masih terus dikembangkankan dengan harapan Amdalnet beroperasi pada pertengahan tahun 2025 untuk KI dan KEK
2.	KEK Kendal		**Percepatan penerbitan UKL-UPL**	• Terkait izin lingkungan, pertek emisi udara (butuh waktu 5-6 bulan) yang menjadi bagian dari RKL RPL rinci PU yang harus disetujui oleh BUPP. Hal ini dapat menghambat realisasi investasi di KEK (kepastian hukum calon investor) • Terkait ukl upl, sudah berjalan 1 tahun dan belum selesai. pada Amdal sudah disampaikan kebutuhan suplai dengan jumlah 300 mw, pun demikian pabrik sudah dibangun tidak diikuti dengan keandalan listrik
3.	KEK Nongsa		**Permohonan Kewenangan Penerbitan Amdal Kawasan**	• Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa pengurusan dokumen lingkungan KEK pada dasarnya merupakan kewenangan di pusat, hal ini agar dapat lebih dimonitor perkembangannya oleh pusat. Terkait permohonan pelimpahan kewenangan ke daerah terdapat KepmenLHK 22/2024 terkait penugasan pusat ke daerah. Namun untuk KEK tidak termasuk kegiatan yang ditugaskan ke daerah, sehingga pengurusannya masih di pusat. • Kementerian Lingkungan hidup berkomitmen untuk upaya percepatan dan Menteri LH juga mendorong untuk lebih cepat untuk memenuhi SLA untuk pengurusan persetujuan teknis dan pengurusan persetujuan lingkungannya. • Kementerian LH akan segera memberikan tanggapan terhadap surat BUPP KEK Nongsa • BUPP menyampaikan dukungan Kementerian LH untuk percepatan pengurusan Addendum AMDAL KEK Nongsa yang akan dilakukan perluasan untuk tambahan investasi baru.
4.	KEK Sei Mangkei		**Addendum Dokumen Amdal Kawasan**	• Saat ini sedang proses persiapan terkait adendum amdal di KEK Sei Mangkei. • BUPP menyampaikan terkait permohonan arahan penyusuan pertek baku mutu emisi ke KLH sudah disampaikan pada 22 Oktober 2024, diharapkan adanya tanggapan dari KLH terkait permohonan tersebut.
5.	KEK Arun Lhokseumawe dan KEK Kendal	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	**1. Temuan Penegakan hukum dari tim GAKKUM KLHK pada tanggal 10 Juli 2024 (KEK Arun Lhokseumawe)** **2. Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup (KEK Kendal)**	Tanggapan Dirjen GAKKUM : • Sudah ada progres secara minor, namun terkait dengan pembersihan dan pengangkutan limbah Lagoon. lagoon ini menjadi tempat pengelolaan limbah terutama untuk 3 perusahaan yang mengandung merkuri. • Limbah dari kegiatan migas, menurut keterangan BUPP dan PU (PHE NSO dan PGE) masih baru melakukan kontrak untuk pengangkatan (kontrak harus segera diselesaikan) • terkait kontrak kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan sludge berjalan cukup lama • adapun lahan tersebut adalah milik LMAN sedangkan limbahnya berasal dari 3 PU (PHE NSO, PGE, dan PAG) yang harus disepakati terkait pembiayaan. • setelah selesai dilakukan pengangkatan dapat dilakukan pengelolaan yang berdasarkan pertek terkait air limbah dan SLO yang harus dimiliki oleh BUPP KEK Lhokseumawe. • LMAN juga dapat menyerahkan lahannya kepada KEK Arun Lhokseumawe • Tanggapan Pak Budi (Wakil Ketua Tim Pelaksana DN KEK): • Sudah ada kegiatan pengangkatan sejumlah 60 Ton, adapun lagoon tersebut masih dalam penguasaan LMAN. sebaiknya BUPP yang mengelola tata lingkungan di KEK termasuk lagoon tersebut. • terkait penanggung jawab lagoon dapat didiskusikan lebih lanjut. Tanggapan Direktur BUPP : BUPP sebagai pengawas sudah melakukan tugasnya, secara paralel sudah dilakukan pengangkatan. terkait kontrak sedang menentukan porsi masing-masing yang ditargetkan selesai pada akhir januari. Setelah bersih dapat diberikan pengelolaan oleh BUPP
6.	KEK Galang Batang	Kehutanan (PPKH)	**Percepatan penerbitan SK pelepasan kawasan hutan**	Sedang berproses di Kementerian Kehutanan (sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), terakhir melalui Surat Nomor 088/BAI/XI/2024 tanggal 21 November 2024 dari PT BAI kepada Menteri Kehutanan, perihal Penyampaian Komitmen Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, dalam rangka Permohonan Batas Areal Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan
7.	KEK Kura Kura Bali	Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3	**Percepatan alih fungsi kegiatan pasca penutupan ex-TPA Suwung**	• TPA regional suwung belum ditutup, karena belum ada sistem utama untuk menggantikan TPA suwung. • Sedang dilakukan percepatan untuk pembangunan fasilitas persampahan dengan kapasitas yang dapat dikonversi menjadi energi listrik

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Kebutuhan Dukungan

3) Kementerian BUMN

No.	KEK	KLASTER	KEBUTUHAN DUKUNGAN K/L	PERKEMBANGAN DAN USULAN TINDAK LANJUT
1.	KEK Arun Lhokseumawe	Kelayakan Pengembangan Bisnis	**Percepatan penyusunan kajian Kelayakan Pengembangan Bisnis**	• Akhir desember telah diselesaikan kajian kelayakan dan valuasi bisnis, saat ini sedang dilakukan pembahasan mengenai draft final stakeholder agreement (Pertamina melalui PAG dan Pelindo), harapannya Q1 2025 dapat diselesaikan. • Terkait rencana operasi dan pengembangan KEK Arun Lhokseumawe, K.BUMN membutuhkan dukungan LMAN terkait rencana kerjasama terkait pengelolaan aset di KEK Arun Lhokseumawe, dukungan pemerintah daerah terkait rencana tata ruang, dukungan Sekdenas KEK terkait masterplan KEK Arun Lhokseumawe • BUPP menyampaikan terkait pengembangan sudah berdiskusi dengan PT PI dan PT PIM terkait konsorsium (PIM, PAG, dan PEMA) sudah putus terkait mekanismenya, BUPP siap melakukan RUPS, harapannya dapat diselesaikan pada Q1 2025 (penyertaan modal, rencana pengembangan (khususnya Lagoon)
2.	KEK Likupang	Kerjasama Pemanfaatan Aset	**Kerjasama pemanfaatan aset antara BUMN dan BUPP**	• KBUMN menyampaikan bahwa BUPP telah menyampaikan minat kerja sama pengelolaan lahan dan pembangunan jalan akses. PTPN I telah menanggapi surat tsb dan meminta BUPP untuk melengkapi dokumen persyaratan sesuai Permen BUMN 2/2023. Atas tanggapan tsb, BUPP KEK telah menyampaikan bahwa meminta PTPN untuk persetujuan NDA. • Hingga saat ini, BUPP belum menyampaikan dokumen resmi ke PTPN. • BUPP KEK membutuhkan dukungan dari KBUMN untuk fasilitasi pelepasan aset PTPN I dalam mendukung akses jalan KEK Likupang dan informasi ganti rugi lahan. • BUPP KEK dan PTPN I perlu koordinasi lebih lanjut untuk menyelesaikan isu pemanfaatan aset.

Kebutuhan Dukungan

4) Kementerian Kesehatan

No.	KEK	KLASTER	KEBUTUHAN DUKUNGAN K/L	PERKEMBANGAN DAN USULAN TINDAK LANJUT
1.	KEK Sanur	Standarisasi Perizinan Tenaga Medis dan Layanan Kesehatan	**Penetapan Service Level Agreement (SLA) Izin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Asing maupun Diaspora**	• Kemenkes sedang menyusun revisi gabungan Permenkes yang berisi tahapan, proses, dan waktu yang lebih sederhana • Pendayagunaan nakes dan named akan ada 2 tahapan • Izin operasi RS agar dapat diakomodir dalam revisi Permenkes
			Percepatan penerbitan Sertifikat Izin Operasi (SIO) Bali International Hospital	• Saat ini dokumen sudah dipersiapkan • Akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kemenkes
2.	Seluruh KEK tema Kesehatan		**Implementasi layanan Telehealthcare di KEK**	• Regulasi yg berlaku hanya untuk antar faskes • Sudah memiliki sistem di rs remote, sehingga pemberian layanan telehealth care akan dapat bergantung pada faskes tersebut

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

Kebutuhan Dukungan

5) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

No.	KEK	KLASTER	KEBUTUHAN DUKUNGAN K/L	PERKEMBANGAN DAN USULAN TINDAK LANJUT
1.	Seluruh KEK	Teknologi Informasi	**Perbaikan mekanisme verifikasi lampiran teknis PB UMKU di dalam sistem OSS**	Pada prinsipnya terkait permasalahan yang tidak hanya untuk keperluan pelaku usaha juga administrator KEK dapat kita fasilitasi.
			Perbaikan keandalan sistem OSS	• Untuk pemadanan NPWP tidak ada masalah, ada beberapa feedback validasi dari DJP seperti kepatuhan wajib pajak • BKPM akan menyesuaikan notifikasi OSS yang berasal dari K/L terkait.
			Perbaikan menu RKL-RPL Rinci	Masih diperlukan detailnya dan dapat didiskusikan lebih lanjut pada rapat selanjutnya
		Pengendalian Pelaksanaan	**Dukungan akses Laporan LKPM dan TH/TA di OSS untuk Setjen DN KEK**	• Saat ini belum tersedia hak akses tersebut di akun Setjen DN KEK • Banyak yang mengecilkan realisasi investasi pada laporan LKPM, (perlu sosialisasi lebih lanjut terkait pengisian LKPM agar lebih sesuai dengan realisasi)
			Fitur monitoring pengendalian Administrator di KEK	Saat ini belum mendapatkan akses untuk hal tersebut
2.	KEK ETKI Banten	OSS	**Pelatihan dan Bimbingan Teknis untuk Administrator KEK, BUPP, dan Pelaku Usaha**	• Belum ada dummy OSS untuk pelatihan. Adapun masih perlu penyesuaian PP 5, agar dapat disesuaikan sistem OSS untuk mengakomodir dummy OSS untuk pelatihan • Terbuka untuk dilakukan bimtek baik daring / luring, kami mohon dapat diundang minimal dua minggu
3.	KEK Galang Batang		**Tidak dapat diberikannya fasilitas pembebasan (masterlist)**	• Dapat dibahas oleh dir fasilitas kementerian Investasi • Administrator menyampaikan harapan adanya fleksibilitas pentahapan
4.	KEK Tanjung Sauh		**Status Permohonan Terminal Khusus di OSS**	Tidak dapat masuk ke Kemenhub karena berlokasi di KEK, harusnya BUPP melakukan submisi diluar KEK agar dapat dilakukan verifikasi oleh Kemenhub
5.	KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam		**Percepatan persetujuan KKPR**	• Saat ini surat sudah diterima oleh Dit. Pelayanan Perizinan Berusaha Non-Industri • BUPP menyampaikan bahwa KKPR sudah dimiliki dengan luas yang sama, masalah yang timbul kami mengajukan dok KKPR yang lama namun luasannya tidak bisa sama.
6.	KEK Pariwisata		**Digitalisasi perizinan event melalui OSS**	Perlu dibahas secara detail pada rapat selanjutnya bersama KEK Pariwisata

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS 2024

Kebutuhan Dukungan

6) Kementerian ESDM

No.	KEK	KLASTER	KEBUTUHAN DUKUNGAN K/L	PERKEMBANGAN DAN USULAN TINDAK LANJUT
1.	KEK Sei Mangkei, KEK Kendal, KEK Gresik, KEK Arun Lhokseumawe	Minyak dan Gas bumi	**Percepatan penetapan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT)**	• Terkait kebijakan HGBT selama ini sudah berjalan, misalkan PT UOI di KEK Sei Mangkei. Selama ini usulan HGBT diajukan melalui Kementerian Perindustrian sebagai per pengguna atau per perusahaan, belum sebagai satuan per wilayah KEK. Selain itu yang dapat mengajukan HGBT adalah pelanggan gas dalam bentuk penyesuaian harga gas. Jika akan diusulkan penerima HGBT per wilayah, maka perlu ada penyesuaian peraturan. • Sampai dengan 2024, penerimaan negara dari sektor gas bumi untuk mengcover HGBT sebesar Rp81 Triliun, hal tersebut menjadi constraint untuk keberlanjutan kebijakan HGBT. • Saat ini HGBT masih terbatas 7 sektor, tadi pagi Kemenperin menyampaikan sudah mengajukan 15 sektor dengan mekanisme sesuai peraturan yang ada dimana keputusan perlu dilakukan melalui Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden, sektor baru dapat ditambahkan jika ada arahan Presiden. • BUPP KEK Sei Mangkei menaympaikan kendala supply dari Pertagas, dimana dilakukan substitusi sumber dari LNG dengan harga hargayang tinggi yaitu 18-19 USD. • Administrator KEK Gresik menyampaikan terdapat persoalan pada sisi anggaran untuk penyelesaian permasalahan HGBT

No.	KEK	KLASTER	KEBUTUHAN DUKUNGAN K/L	PERKEMBANGAN DAN USULAN TINDAK LANJUT
2.	KEK Sorong	Minyak dan Gas Bumi	**Izin Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi Proyek Pembangunan dan Pengelolaan SPBE**	• Kementerian ESDM menyampaikan bahwa SLA terkait izin usaha penyimpanan migas telah tersedia, BUPP dapat melakukan pengajuan melalui online dan melengkapi persyaratannya. • Sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan dan SOP, penunjukan SPBE diberikan kepada PT MOW dari PT Pertamina Patra Niaga untuk pembangunan dan pengoperasian. • PT MOW perlu mengajukan izin usaha kepada Ditjen Migas, Kementerian ESDM. • SPBE sekarang direncanakan akan operasional pada 6 bulan mendatang, pembangunan tangki dari semula 15 ton menjadi 50 ton.
3.	KEK Nongsa		**Harga Gas untuk penyediaan listrik di Batam**	• Sumber utama gas untuk kelistrikan di Batam berasal dari lapangan di Grissik (dekat Jambi) yang sudah digunakan puluhan tahun sehingga sudah mengalami penurunan produksi yang berdampak pada penurunan penyaluran gas ke Batam. • Kedepannya akan dikembangkan sumber gas di daerah Natuna yang diharapkan dapat membantu pasokan gas bumi ke Batam. Saat ini dalam proses kajian akhir Pembangunan pipa gas dari West Natuna menuju Singapura yang disambungkan ke pulau dekat Natuna. Sehingga gas yang selama ini berkontrak untuk diekspor ke Singapura dapat dikurangi untuk dapat digunakan sebagai tambahan pasokan gas ke Batam.
4.	KEK Sei Mangkei	Ketenagalistrikan (Gatrik)	**Penetapan Tarif Tenaga Listrik KEK Sei Mangkei**	• Draft RUPTL sudah selesai dievaluasi secara teknis, dan saat ini posisinya sedang di biro hukum jadi tidak lama lagi dapat ditetapkan oleh Menteri. KEK Sei Mangkei juga sudah melakukan audiensi, namun saat ini belum dilakukan penetapan harga listrik karena masih dilakukan kajian penetapan tarif. • Berdasarkan hasil audiensi, pergub tarif di KEK Sei Mangkei sudah melewati masa UUCK, jadi sudah tidak berlaku. Tarif sementara harus ada usulan dari KEK Sei Mangkei dan diskusi lebih lanjut dengan biro hukum DJK.
5.	KEK Kendal		**Percepatan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan**	Kementerian ESDM menyampaikan bahwa pembangunan 18 SUTT dalam proses perencanaan pengadaan paralel menunggu RUPTL PLN tahun 2025 yang akan ditetapkan dalam waktu dekat
6.	KEK Gresik		**Dukungan untuk pengembangan PLTS Floating on Grid 148 MW 1)**	• RUPTL BKMS sudah disetujui, terdapat skema swakelola dimana dapat dilakukan pembangunan oleh BKMS. Jika skema swakelola tersebut yang dipakai, untuk membangun PLTS floating on grid dapat memproses IUPTLU melalui sistem OSS. • Administrator KEK Gresik menyampaikan bahwa pada 15 Januari sudah dilakukan rapat wamen ESDM dan BUPP perihal rencana permohonan dukungan pengembangan PLTS Floating on Grid.
7.	KEK Nongsa		**Kebijakan tarif listrik khusus Data Center di KEK untuk meningkatkan kompetitif dengan investasi Data Center di Johor Bahru**	• Dit. Program Ketenagalistrikan menyampaikan bahwa Harga gas menyebabkan tarif listrik lebih mahal. Kedepannya akan dibangun interkoneksi dari Sumatera ke Batam yang direncanakan pada RUPTL di tahun 2028 (dapat dipertimbangkan untuk percepatan). • PLN Batam menyampaikan bahwa tarif di Batam saat ini mengacu pada Pergub tahun 2017, sampai dengan ada peraturan menteri yang menetapkan tarif. Tarif di Batam sekitar IDR 1300-1400/kwh atau 1600/kwh untuk keandalan tinggi, sedangkan di Johor IDR 1900-2000/kwh , dengan nilai ICPT sebesar 500-700 yang tidak masuk dalam komponen tarif. Sehingga pada dasarnya tarif listrik di Batam masih lebih murah daripada di Johor.
			Penetapan tarif tenaga listrik untuk penyediaan listrik bagi Data Center	Masih dalam tahapan audiensi untuk penetapan taris sementara, BUPP KEK Nongsa diharapkan dapat melakukan tindak lanjut atas hasil audiensi.
8.	KEK Likupang		**Dukungan fasilitasi pengajuan Wilayah Usaha (WILUS) Ketenagalistrikan**	• Dir Program Ketenagalistrikan menyampaikan bahwa PLN telah menyediakan GI Likupang 30 MVA, sementara beban puncak baru 1,3 MVA. PLN sudah sangat cukup memenuhi kebutuhan listrik KEK Likupang. • BUPP akan melakukan penjajakan kembali dengan calon investor yang berminat untuk mengembangkan Energi Baru Terbarukan

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS ©2024

Kebutuhan Dukungan

7) Kementerian Pariwisata

No.	KEK	KLASTER	KEBUTUHAN DUKUNGAN K/L	PERKEMBANGAN DAN USULAN TINDAK LANJUT
1.	Seluruh KEK Pariwisata	Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events)	**Peningkatan program pengembangan agenda (events) pariwisata di KEK**	Pemerintah provinsi perlu menyampaikan usulan event kepada Kemenparekraf untuk masuk dalam Karisma Event Nusantara · Pelaku usaha dapat bekerjasama dengan agen perjalanan untuk memberikan layanan bundling pembelian paket wisata
2.	KEK Morotai		**Fasilitas reguler untuk event Kharisma Event Nusantara dan non Kharisma Event Nusantara**	Untuk masuk dalam Kharisma Event Nusantara (KEN) perlu dukungan pengajuan melalui Pemerintah Provinsi, KEK Morotai sebelumnya tidak diikutsertakan dalam KEN karena belum ada pengusulan ke Kementerian Pariwisata.
3.	Seluruh KEK	Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif	**Perluasan akses pembiayaan bagi Pelaku Usaha/Startup bidang digital**	Dapat dibahas lebih lanjut dengan kementerian ekraf

Kebutuhan Dukungan

8) Kementerian Perindustrian

No.	KEK	KLASTER	KEBUTUHAN DUKUNGAN K/L	PERKEMBANGAN DAN USULAN TINDAK LANJUT
1.	Seluruh KEK Industri	Kemudahan Perizinan di bidang Perindustrian	**Penyepakatan mekanisme pengurusan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Usaha Industri (IUI) di KEK**	· Secara regulasi pengurusan IUKI masih diperlukan walaupun industri ada di KEK, penerbitan bisa melalui administrator KEK, namun untuk saat ini sistem belum bekerja maksimal karena harus dilakukan sinkronisasi sistem OSS dan SIINAS · Wakil Ketua Tim Pelaksana DN KEK menyampaikan bahwa diperlukan kesepakatan untuk administrator dapat mendaftarkan ke Kemenperin, agar KEK tidak perlu melakukan pengurusan IUKI seperti di luar KEK
2.	KEK Palu	Infrastruktur	**Implementasi Rehabilitasi Gedung Administrator KEK Palu**	· Pembangunan Rehabilitasi Gedung Administrator KEK Palu telah selesai 100%. Selanjutnya akan dilakukan BAST Operasional (BASTO) yang ditargetkan pada awal februari 2025. Selanjutnya Administrator dan BUPP KEK sudah dapat menggunakan gedung dan sudah dapat dilakukan operasional gedung. · Serah terima aset ditargetkan di bulan Juni 2025 (serah terima dari kontraktor ke Kemenperin dan selanjutnya dari Kemenperin ke Pemkot Palu) setelah masa pemeliharaan.
3.	KEK Sei Mangkei, KEK Kendal, KEK Gresik, KEK Arun Lhokseumawe	Gas Bumi	**Percepatan penetapan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT)**	· Kementerian Perindustrian sudah mengusulkan beberapa industri sebagai penerima HGBT, termasuk impor langsung gas bumi. · BUPP KEK Sei Mangkei menyampaikan bahwa Pelaku Usaha meminta kepastian harga gas bumi di KEK, karena saat ini terdapat perbedaan harga dan kenaikan harga secara insidental.

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

Kebutuhan Dukungan

9) Kementerian ATR/BPN

No.	KEK	KLASTER	KEBUTUHAN DUKUNGAN K/L	PERKEMBANGAN DAN USULAN TINDAK LANJUT
1.	Seluruh KEK	Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	**Implementasi fasilitas perpanjangan dan pembaharuan sekaligus untuk Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di KEK dan Percepatan Proses Sertifikasi Lahan**	• Perlu pembahasan secara khusus terkait pengaturan fasilitas perpanjangan dan pembaharuan Hak atas tanah di KEK untuk diatur dalam turunan PP 40/2021 atau disesuaikan dalam Permen ATR No. 18/2021 • Dukungan proses perpanjangan SHGB di KEK Tanjung Kelayang dan KEK Likupang • Kementerian ATR/BPN akan menyampaikan tanggapan lebih lanjut terkait dukungan fasilitas perpanjangan dan pembaharuan HGB di KEK
		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	**Dukungan mekanisme perpanjangan KKPR bagi BUPP dalam rangka percepatan sertifikasi lahan di KEK**	• KKPR terbagi menjadi 2 yaitu untuk KEKnya sendiri dan saat PU mengajukan untuk pemanfaatan ruang di KEK, jika sudah ditetapkan masterplan maka KKPR akan terbit otomatis (lebih cepat dan tidak ada penilaian) • Ketika KKPR ada jangka waktu 3 tahun, ketika menjadi KEK seharusnya tidak ada batas waktu jadi diperlukan pembahasan bersama dengan BKPM.
2.	KEK Sanur, KEK Kura Kura Bali, KEK Lido dan KEK Singhasari	Tata Ruang	**Percepatan penyusunan Materi Teknis (Matek) untuk RDTR sekitar KEK**	• Jika sudah ada RDTR disekitar KEK, maka proses untuk KKPR dapat lebih cepat. • Masih ada beberapa KEK yang belum memiliki RDTR • Program RDTR yang harus terintegrasi dengan OSS
3.	KEK Tanjung Kelayang	Penanganan Konflik Pemanfaatan Lahan	**Penanganan klaim atas kepemilikan tanah di dalam KEK**	Perwakilan Kementerian ATR akan melakukan koordinasi internal untuk membahas teknis isu penanganan konflik dan penetapan hak tanah
4.	KEK Likupang		**Penanganan isu klaim oleh beberapa masyarakat atas lahan bersertifikat milik PT MPRD di KEK Likupang**	
5.	KEK Sorong dan KEK Likupang	Tanah Terlantar	**Kepastian mekanisme penetapan status tanah terlantar di KEK**	• Kepastian mekanisme penetapan status tanah terlantar di KEK • Konfirmasi status tanah terlantar di area HGB dalam deliniasi KEK Likupang • Tindakan tegas untuk HGB di KEK yg ditelantarkan oleh pelaku usaha eksisting

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

Kebutuhan Dukungan

10) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

No.	KEK	KLASTER	KEBUTUHAN DUKUNGAN K/L	PERKEMBANGAN DAN USULAN TINDAK LANJUT
1.	Seluruh KEK	Peraturan Perundangan	**Percepatan pengaturan tentang fasilitas dan kemudahan imigrasi di KEK**	Masih menunggu revisi PP 40/2021 untuk pembuatan permenkumham
			Penyusunan Ketentuan khusus terkait regulasi Golden Visa di KEK	Saat ini telah ditetapkan Permenkumham No. 22 Tahun 2023 yang telah mengatur ketentuan terkait fasilitas Golden Visa secara umum
		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	**Pemberian layanan dan mekanisme pengawasan keimigrasian di KEK**	Setiap layanan di layani oleh kantor imigrasi setempat, kebutuhan tambahan dapat dilakukan via surat.
2.	KEK Nongsa	Visa On Arrival (VOA)	**Diperlukan implementasi pembebasan VOA bagi orang asing di luar ASEAN untuk kunjungan singkat pariwisata KEK Nongsa**	• Kebijakan VOA kunjungan singkat (7 hari) untuk Kepulauan Riau sudah disetujui dan diberlakukan sejak 17 Desember 2024 dengan tarif Rp 250.000. Hingga Januari 2025 tercatat sudah mencapai 5.000 pengguna. • Saat ini sedang diproses untuk pemberian bebas visa untuk beberapa jenis pass di singapore (keluarga pemegang PR Singapore dan Student Pass) • Bapak Budi santoso menyampaikan bahwa selain bebas visa bagi WNA Singapura, dapat dipertimbangkan juga bebas visa bagi beberapa negara yang tingkat kunjungan ke Singapuranya tinggi.

Kebutuhan Dukungan

11) Kementerian Dikti, Sains dan Teknologi

No.	KEK	KLASTER	KEBUTUHAN DUKUNGAN K/L	PERKEMBANGAN DAN USULAN TINDAK LANJUT
1.	KEK Singhasari	Pendidikan Tinggi	**Ketersediaan pedoman petunjuk pelaksana/petunjuk teknis terkait pendirian perguruan tinggi luar negeri di KEK**	• Prosedur kebijakan PTLN di KEK masih menggunakan Permendikbud No 10 tahun 2021 (di KEK) dan Kepdirjendiktiristek Nomor 128 tahun 2023 tentang Persyaratan dan Prosedur Perguruan Tinggi Luar Negeri Kampus Cabang (umum). Masih belum ada perubahan terkait regulasi perguruan tinggi luar negeri di KEK. • BUPP menyampaikan bahwa aturan yang disampaikan sudah diimplementasikan saat pendirian KCL, di implementasinya masih ada beberapa hal yang di lapangan tidak dapat dilaksanakan jadi harus ada diskresi dari pejabat yang berwenang. Kondisi di lapangan dalam pendirian KCL di KEK Singhasari, diharapkan dapat menjadi masukan untuk penyempurnaan dan perbaikan Permendikbud 10/2021. • Dari ketidaksesuaian yang disampaikan BUPP, perlu disampaikan juga surat berisi poin-poin ketidaksesuaian Permendikbud 10/2021 untuk dapat dibahas lebih lanjut.
2.	KEK ETKI Banten		**Kejelasan Skema Bisnis untuk Pelaku Usaha Bidang Pendidikan**	Diperlukan sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan KEK Pendidikan. Diharapkan agar penyelenggara pendidikan tinggi luar negeri yang berupa yayasan juga dapat berinvestasi (termasuk menghasilkan profit) dan memanfaatkan fasilitas Tax Holiday di KEK,
3.	Seluruh KEK Pendidikan		**Kekhususan untuk fasilitas dan kemudahan KEK di sektor pendidikan**	Sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan KEK Pendidikan

Kebutuhan Dukungan

12) Kementerian Dalam Negeri

No.	KEK	KLASTER	KEBUTUHAN DUKUNGAN K/L	PERKEMBANGAN DAN USULAN TINDAK LANJUT
1.	Seluruh KEK	Keuangan Daerah	**Percepatan penetapan regulasi insentif daerah, dengan rincian :** **1. Saat ini baru diterbitkan 4 Perda Provinsi dan 11 Perda Kabupaten/ Kota terkait insentif daerah, sehingga dibutuhkan percepatan penerbitan Perda Insentif dan regulasi turunannya** **2. PBB di dalam KEK belum dikecualikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam pungutan retribusi daerah, sehingga dibutuhkan penyampaian Surat Mendagri hingga ke tingkat Kabupaten/Kota** **3. Kemendagri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan akan melakukan fasilitasi kepada daerah perihal penetapan regulasi insentif daerah** **4. Akan dilakukan fasilitasi ke tingkat bupati/walikota melalui mekanisme Dekonsentrasi kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Dekon GWPP)**	• Dukungan terhadap KEK sudah masuk ke Permendagri 15 tahun 2024, melalui dorongan kepada Pemda untuk mengacu PP 40/2021 • Pemberian insentif tidak perlu disusun dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah, cukup turunan dari Perda Pajak dan Retribusi Daerah • Di dalam PP 35 tahun 2023 pasal 99 , disebutkan pemda dapat memberikan insentif daerah untuk mendukung program/proyek strategis nasional • Dalam UU 1 tahun 2022, diatur bahwa pemungutan pajak dan retribusi diatur di dalam Perda PDRD. Ketentuan ini dapat dijadikan dasar pemberian insentif daerah • Dari Setjen Denas dapat mengionisasi penyusunan Inpres untuk pengaplikasian insentif daerah yang lebih kuat bagi pemerintah daerah • Tanggapan Dewan Kawasan Bali, prov bali sudah memiliki perda 1 tahun 2024 dan perda 3 tahun 2024, sudah melalui proses dengan DPRD dan difasilitasi oleh kemendagri. setelah dalam bentuk perda apakah perlu penjabaran kembali pada perkada (dapat didiskusikan lebih lanjut dengan biro hukum, detail peraturan melalui keputusan kepala daerah)
			Pengecualian retribusi PBG SLF di KEK	Kemendagri akan mendorong Pemerintah Daerah agar mematuhi regulasi dan tidak memungut retribusi kepada Pelaku Usaha sepanjang Badan Usaha telah menetapkan estate regulation
2.	KEK MBTK		**Perubahan status PT MBTK menjadi BUMD**	Percepatan pembahasan draft Raperda pembentukan BUMD PT MBTK dengan Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim serta Pemkab Kutim dan DPRD Kutim.

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

Kebutuhan Dukungan

13) Kementerian Perdagangan

No.	KEK	KLASTER	KEBUTUHAN DUKUNGAN K/L	PERKEMBANGAN DAN USULAN TINDAK LANJUT
1.	Seluruh KEK Pariwisata	Perdagangan	**Pengaturan impor minuman beralkohol bagi pelaku usaha di KEK**	• Untuk importasi minuman beralkohol, masih dibebaskan • Untuk distribusi menjadi kewenangan dit. perdagangan dalam negeri
2.	KEK Arun Lhokseumawe	Perdagangan Luar Negeri	**Mekanisme Persetujuan Ekspor (PE) untuk Pupuk Urea Non Subsidi**	• PT PI yang menerbitkan SKAE yang nanti ditembuskan ke Sekdenas • Sekdenas KEK bersurat ke dirjen daglu terkait PE dikembalikan ke Kemendag • PT PIM mengajukan via INSW • Dirjen daglu menerbitkan izin PE • Permendag ekspor sedang dalam proses perbaikan • Pak Budi menyampaikan harapan agar prosedurnya dapat lebih pendek
3.	KEK BAT	Pemasukan barang Lartas untuk MRO	**Pengecualian larangan Impor atas fire extinguisher (HS Code: 84241010)**	• HS Code komoditas CFC merupakan larangan Impor, sehingga tidak ada pengecualian impor untuk komoditas tersebut. • Komoditas tersebut dikategorikan sebagai larangan impor, karena usulan dari Kementerian LH bahwa Indonesia sudah memiliki kesepakatan internasional untuk larangan terhadap CFC. • BUPP menyampaikan alternatif produk yang dapat digunakan selain CFC apabila memang termasuk larangan impor. alternatif lain produk tersebut adalah Halon 1211 dan Halon 1301, perlu dipastikan kebijakan pengaturan impor di KEK terhadap barang tersebut • Setjen DN KEK akan memastikan lebih lanjut kebijakan pengaturan impor terhadap alternatif produk Halon 1211 dan 1301.

Kebutuhan Dukungan

14) Kementerian Pekerjan Umum

No.	KEK	KLASTER	KEBUTUHAN DUKUNGAN K/L	PERKEMBANGAN DAN USULAN TINDAK LANJUT
1.	Seluruh KEK	-	**Mekanisme teknis penyesuaian sistem terkait PBG SLF di KEK**	• SLF dan SBKBG dapat diakomodir dalam SIMBG, Ciptakarya akan memberikan hak akses administrator untuk menerbitkan kedua surat tersebut • Ciptakarya mengusulkan untuk KEK yang belum memiliki ER dapat mengajukan PBG kepada daerah masing-masing • Akan dilakukan bimtek kepada administrator perihal SLF-PBG
2.	KEK Gresik	Jalan (Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT))	**Percepatan pembangunan Jalan Nasional Daendels dari exit tol Manyar menuju KEK**	• Untuk kontrak fisik sisa pelebaran jalan dan jembatan akan dilakukan pada tahun 2026, saat ini fokus pembebasan lahan 9 bidang • Administrator KEK Gresik menyampaikan harapan kami dapat dipercepat karena daendels satu-satunya jalan menuju KEK Gresik untuk lalu lintas pengangkutan barang dan pegawai • Setjen DN KEK menyampaikan harapan percepatan pembangunan Jalanan Nasional Daendels dengan konstruksi di tahun 2025, selanjutnya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan Setdukkab.
3.	KEK Tanjung Lesung		**Percepatan pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang**	• Seksi 3 fase 2 implementasinya mundur ke oktober 2025 . • BUPP membutuhkan kepastian apakah gerbang tol sudah sampai tol panimbang. Selain itu pada awal januari 2025, terjadi banjir di sekitar gerbang tol. • Ada keterlambatan penandatanganan agreement antara Kemenkeu dan lender • Untuk paket 3 fase 2, belum akan fungsional (menunggu kesepakatan pembiayaan) dan ditargetkan fungsional Bulan Oktober 2025
4.	KEK Lido		**Percepatan implementasi pembangunan Exit Tol Cigombong 2**	• Perlu dilakukan perubahan peruntukan masih ada jalan khusus ke jalan umum • BUPP menyampaikan bahwa akan dikoordinasikan dengan ditjen bina marga untuk penyusnan Rencana Teknis Akhir (RTA), saat ini masih meunggu mekanisme antara Kementerian PU dan Pemerintah daerah
			Penyepakatan rencana pembangunan jalan menuju Gunung Gede	Belum tercopy perihal masalah ini

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS 2025

No.	KEK	KLASTER	KEBUTUHAN DUKUNGAN K/L	PERKEMBANGAN DAN USULAN TINDAK LANJUT
5.	KEK Kura Kura Bali	Jalan (Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT))	**Percepatan pembangunan Jalan Tol Bandara Ngurah Rai (Benoa) - Mengwi via Singapadu**	Data realisasi akan didetailkan kemudian
			Percepatan pelebaran Jalan Bypass Ngurah Rai di sekitar persimpangan Suwung	• Masih dilakukan manajemen lalu lintas hingga 2026. konstruksi di tahun 2027-2028 • BUPP menyampaikan kajian konsultan di tahun 2028 akan terjadi kemacetan yang signifikan sehingga dapat dipertimbangkan untuk percepatan realisasi pelebaran jalan. • tanggapan bina marga: percepatan dapat dilakukan jika ada bantuan pemda mengenai lahan
			Modifikasi persimpangan Suwung menuju Kura Kura Bali menjadi persimpangan sebidang dan rekayasa lalu lintas	Direncanakan underpass dan u-turn pada tahun 2035-2039
6.	KEK Sei Mangkei		**Kebutuhan aksesibilitas menuju KEK Sei Mangkei (efisiensi logistik)**	BUPP menyampaikan bahwa terkait arah pintu tol lima puluh ke KEK Sei Mangkei melewati jalur kereta api tanpa palang pintu, dulu ada desainnya untuk membuat overpass di lintasan tak sebidang kereta api. Semakin meningkatnya penggunaan kereta api melalui penambahan Pelaku Usaha, risiko kecelakaan semakin tinggi. Selain itu, jembatan kaitannya dengan Kota Perdagangan, dengan desain kota baru seharusnya ada jembatan di utara kawasan
7.	KEK MBTK		**Keandalan jalan akses dari dan ke KEK MBTK**	Sudah terakses jalan menuju KEK MBTK
8.	KEK Kendal	Sumber Daya Air, Cipta Karya	**Percepatan Penanganan Abrasi Pantai di Utara Kendal**	• Agenda tersebut sudah masuk dalam draft renstra, jika sudah ditetapkan nanti akan disampaikan kembali oleh Kementerian PUPR. • telah dilakukan pemenuhan air baku dengan kapasitas 300 l/detik per tahun 2023 • BUPP berharap dapat dikerjakan pada periode 2025-2026. Selain itu, terkait sungai yang berada di wilayah semarang (timur dikelola PU Pusat dan Barat dikelola oleh Prov Jateng) dari BBWS sering melakukan diskusi ada baiknya seluruh pengelolaan dapat dikembalikan ke PU Pusat • Kementerian PU akan dikoordinasikan dengan direktorat teknis, dan akan dilakukan jawaban secara tertulis kepada sekjen denas KEK
9.	KEK Tanjung Lesung		**Dukungan ketersediaan air baku melalui pembangunan embung dalam kawasan**	• Dapat melakukan konfirmasi kepada ciptakarya • Telah dilaksanakan pengamanan pantai sepanjang 11,3 km • BUPP menyampaikan terkait dengan banjir, sungai ada di permen pupr 04/2016 pada saat musim hujan tertentu dapat menyebabkan banjir dengan cakupan 120Ha, harapannya dapat difasilitasi kebutuhan embung untuk antisipasi pengangan banjir. Selain itu masih terdapat kekruangan 125 l/detik dan butuh pembangunan waduk di Kab Pandeglang.
10.	KEK Likupang	Sumber Daya Air, Cipta Karya	**Perencanaan pembangunan jalur pipa air bersih ke KEK**	• Telah dilaksanakan penyediaan air baku pada tahun 2020-2022 dgn kap 55 liter/detik dan telah dimanfaatkan 5 liter/detik di Desa Marinsow. • BUPP perlu kepastian waktu untuk pemanfaatan KEK Likupang, BUPP telah melakukan koordinasi dgn BPW Sulut sejak Agustus 2024, namun belum ada perkembangan lebih lanjut. • KEK Likupang berlokasi di Desa Pulisan dan Desa Kinunang
11.	KEK Sorong		**Perencanaan pembangunan jalur pipa air bersih ke KEK**	• Ditjen SDA menyampaikan bahwa KemenPUPR telah membangun jarngan air baku sepanjang 11 km pada tahun 2022-2023 • Terdapat alokasi anggaran TA. 2025-2026 pembangunan air baku • BUPP perlu kepastian alokasi anggaran di tahun 2025-2026, untuk penyediaan jaringan air minum sudah siap didukung oleh Pemerintah Provinsi dan Dinas PU Kab. Sorong,
12.	KEK Lido		**Kesulitan mendapatkan sumber air bersih dan dukungan Penanganan pencemaran danau akibat abrasi di sekitar danau**	• Belum ada kegiatan penanganan • BUPP menyampaikan ketika perubahan status KEK tahun 2013, tlah terjadi sedimentasi di wilayah Danau Lido. Sebelumnya telah diajukan revitalisasi melalui APBN, sekitar 2 tahun yang lalu, elah diajukan permohonan untuk pelaksanaan revitalisasi mandiri oleh BUPP, dengan pendampingan oleh Ditjen SDA. Hingga saat ini belum ada arahan dan izin dari Kemen PU terkait mekanisme revitalisasi danau oleh BUPP. • Kementerian PU menyampaikan akan dikoordinasikan dengan direktorat teknis dan akan disampaikan jawaban tertulis kepada sekjen Denas KEK
13.	KEK Tanjung Lesung	Ditjen SDA	**Penyampaian dukungan penanganan banjir di dalam kawasan**	Akan dikoordinasikan dengan direktorat teknis
14.	KEK Mandalika		**Pembangunan Sistem Pengendali Banjir dan Sedimentasi di Wilayah Hilir KEK Mandalika.**	• Perencanaan akan dilakukan di tahun 2026 dan konstruksi akan dilakukan pada tahun 2028 • termasuk normalisasi sungai dan pengendali banjir

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

No.	KEK	KLASTER	KEBUTUHAN DUKUNGAN K/L	PERKEMBANGAN DAN USULAN TINDAK LANJUT
15.	KEK Tanjung Sauh	Bina Marga	**Kepastian Pembangunan Jembatan Batam - Bintan**	Masih menunggu kajian perihal pembiayaan
16.	KEK Bitung		**Dukungan pembangunan jalan kawasan dan peningkatan jalan lingkungan**	• Ditjen Bina Marga perlu info detail terkait kebutuhan pengembangan jalan kawasan • Kepastian skema KPBU untuk pembangunan infrastruktur dasar akan dibahas kembali dengan Dir. Pembiayaan • BUPP membutuhkan kepastian komitmen pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur dasar jalan kawasan • Kementerian PUPR akan melakukan koordinasi teknis dan menyampaikan tanggapan secara tertulis kepada Setjen Denas KEK
17.	KEK Singhasari	Ditjen Cipta Karya	**Pembangunan Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum**	Diperlukan tindak lanjut pembahasan opsi KPBU atau opsi B2B untuk pemenuhan kebutuhan air di KEK Singhasari (tidak dibahas)
18.	KEK Sei Mangkei		**Diperlukan percepatan penyusunan Studi Kelayakan TPA disekitar Kawasan yang dapat menunjang operasional Kawasan (TPA terdekat ada di Raya Kab. Simalungun**	Pemenuhan Kebutuhan TPA untuk Menunjang KEK (tidak dibahas)

Kebutuhan Dukungan

15) Kementerian Kelautan dan Perikanan

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

No.	KEK	KLASTER	KEBUTUHAN DUKUNGAN K/L	PERKEMBANGAN DAN USULAN TINDAK LANJUT
1.	KEK Galang Batang	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)	**Progres permohonan TUKS dalam area konservasi**	• KKPRL ditangani oleh direktorat jenderal penataan ruang laut, perizinan berusaha diperlukan PKKPRL • Sudah diterbitkan KKPRL di KEK Galang Batang untuk dua perusahaan (PT BAI juli 2022 seluas 127,84 Ha dan PT GBKEK Industri Park Jul 2023 seluas 264,6 Ha) • PT GBKEK mengajukan kembali KKPRL untuk perluasan area, sudah dilakukan penilaian teknis pada tanggal 16 Jan 2025, masih ada dok yang perlu dilengkapi • BUPP menyampaikan bahwa dokumen sedang dalam perbaikan BUPP. selain itu, perlu dukungan terkait tumpah tindih pada lahan Kawasan Konservasi, yang akan dibahas lebih lanjut kemudian
2.	KEK Nongsa		**Penyelesaian perizinan subsea landing point KEK Nongsa.**	• Perlu dipastikan mengenai kelembagaan dan mekanisme penyelesaian perizinan untuk Subsea Landing Point di KEK Nongsa • Sudah ada pengajuan KKPRL untuk sistem komunikasi kabel laut oleh PT telekomunikasi indonesia (TELIN). Saat ini sudah mendapatkan rekomendasi I untuk area marine survey berdasarkan surat dari pushidrosal pada tanggal 28 Mei 2024. • Saat ini ada perubahan regulasi KepmenKKP 42/2022 menjadi KepmenKKP 77/2024. Berdasarkan perubahan regulasi tersebut prosedur perizinan pipa kabel bawah laut sudah tidak memerlukan Rekom 1 dan 2, namun yang diperlukan adalah konsultasi dengan KKP. • PT TELIN dan BUPP KEK Nongsa akan berkonsultasi dengan KKP (merujuk kepmenKKP 77/2024) terkait progres dan tindak lanjut penyelesaian perizinan pipa kabel bawah laut KEK Nongsa.
3.	KEK Morotai	Perikanan Tangkap	**Penetapan KEK Morotai sebagai pusat pengembangan Penangkapan Ikan Terukur khusus Zona 2**	• Kluster perikanan tangkap sudah dilaksanakan rapat dari tahun 2024, KKP sudah melakukan intervensi melalui SKPT, khususnya pembangunan pelabuhan perikanan melalui hibah Pemerintah Jepang (termasuk cold storage 200 ton) • Terkait pusat pengembangan penangkapan ikan terukur, zona 2 disebutkan wilayah penangkapan WPP 717 di atas KEK Morotai. Untuk mendukung KEK Morotai, perikanan tangkap yang dilakukan di WPP 717 akan dilakukan pendaratan ikan di Pelabuhan Morotai • Untuk kepastian KEK Morotai sebagai pusat pengembangan penangkapan ikan terukur, dibutuhkan pelabuhan pangkalan. Bisa atau tidaknya tergantung juga dengan bantuan Kementerian/Lembaga terkait seperti dukungan transportasi dari dan ke Morotai, serta cold storage yang saat ini kapasitasnya masih terbatas • PNBP perikanan pasca produksi hanya dapat dilakukan di Pelabuhan Pangkalan, karena lokasi Pelabuhan Pangkalan dari KEK Morotai cukup jauh maka dapat dilakukan pembangunan pelabuhan swasta

Kebutuhan Dukungan

16) Kementerian Keuangan

No.	KEK	KLASTER	KEBUTUHAN DUKUNGAN K/L	PERKEMBANGAN DAN USULAN TINDAK LANJUT
1.	Seluruh KEK	Perpajakan	**Kebijakan Global Minimum Tax di KEK**	Diperlukan kepastian regulasi terkait kebijakan fasilitas fiskal di KEK paska diberlakukannya Global minimum Tax (tidak dibahas)
			Penyepakatan mengenai SLA penerbitan KMK Pemanfaatan Tax Holiday di KEK	Waktu penerbitan selama 45 hari terhitung setelah surat pemeriksaan diterbitkan (tidak dibahas)
2.	KEK Kendal	Perpajakan	**Penjabaran mengenai mekanisme pencatatan wajib pajak bagi pelaku usaha di KEK**	• Perlu dikonfirmasi kembali kepada DJP mengenai pencatatan pelaku usaha di KEK sebagai PU logistik • Di dalam PMK 33 jo PMK 237 satu entitas di dalam satu lokasi dapat dilaksanakan dua kegiatan dalam satu lokasi usaha • BIT sebagai pelaku usaha di Kendal dapat berkonsinyasi dengan pelaku usaha BUT • Pengeluaran barang dapat dilakukan oleh PT BIT sebagai PU di KEK, namun kepemilikan barang oleh Badan Usaha Tetap (BUT) • Akan diadakan pembahasan teknis dengan DJP) • Untuk paelaku usaha yang bisa mendapatkan fasilitas adalah wajib pajakn dalam negeri • Pada prinsipnya dapat BUT dapat melaksanakan kegiatan di KEK
3.	Implementasi fasilitas perpajakan dan kepabeanan untuk kegiatan MRO di KEK	Bea Masuk	**Diperlukan fasilitas pembebasan Bea Masuk untuk pengeluaran barang suku cadang pesawat (kegiatan MRO) yang berasal dari LDP ke TLDDP.**	DJBC menyampaikan terdapat dua skema insentif untuk KEK MRO • Skema penurunan tarif untuk Pelaku usaha MRO seluruhnya mendapatkan (tidak perlu mengubah PP 40/2021) • Skema KEK dapat menggunakan bea masuk ditanggung pemerintah / masterlist / NKL / skema lainnya (perlu mengubah PP40/2021) Bapak Budi Santoso Menyampaikan: • perlu dipastikan skema yang ditawarkan tidak menyimpang dari KEK dan perlu dilakukan simulasi untuk setiap opsi skema insentifnya. • Kementerian Keuangan perlu menyampaikan formulasi tertulis terkait skema insentif untuk KEK MRO dan BUPP KEK perlu menyampaikan detil kebutuhan insentif KEK dibidang MRO yang diperlukan agar Setjen DN KEK dapat menentukan posisi selanjutnya. • Perlu dibahas kembali terkait insentif fasilitas dan kemudahan untuk kegiatan MRO di KEK dengan Sesmenko, Setjen DN KEK, Kementerian Keuangan, dan BUPP BUPP menyampaikan bahwa pada pada dasarnya telah terdapat regulasi melalui PMK 81/2024, namun ketentuan didalamnya belum bisa diimplementasikan untuk pembebasan Bea Masuk bagi PT Batam Teknik (BUPP KEK BAT). Dalam pasal 219 dimaknai oleh DJP bahwa PPH tidak dipungut untuk pesawat udara dan suku cadangnya berlaku jika Bea Masuk dan PPN 0. Sedangkan jika Bea Masuk dan PPN 0 harus menggunakan.
4.	Mekanisme Pemasukan dan Pengeluaran Barang selama masa transisi KEK di wilayah KPBPB	Mekanisme pemasukan pengeluaran barang	**Diharapkan agar mekanisme pemasukan dan pengeluaran barang pada masa transisi di KEK yang berada di wilayah KPBPB dapat menggunakan mekanisme KEK (Sistem Aplikasi KEK.**	DJBC menyampaikan bahwa sesuai pengaturan Pasal 76 PMK 33/2021 disebutkan selama masa transisi KEK dari FTZ, pelaku usaha tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga ketentuan pemasukan pengeluaran barang pada masa transisi masih menggunakan PPFTZ. Untuk dapat menggunakan mekanisme KEK pada masa transisi maka diperlukan perubahan pada regulasi masa transisi KEK. Bapak Budi Santoso menyampaikan terkait mekanisme masa transisi ini perlu dirumuskan sistemnya yang akan digunakan oleh BUPP dan PU. Pada dasarnya diharapkan pada masa transisi KEK tersebut, pemasukan dan pengeluaran barang sudah dapat menggunakan mekanisme KEK.
5.	KEK Nongsa	kebijakan VoA kunjungan singkat dan penurunan PNBP	**Diperlukan implementasi pembebasan VOA bagi orang asing di luar ASEAN untuk kunjungan singkat pariwisata KEK Nongsa**	• Kebijakan VOA Kunjungan singkat Sudah diatur di dalam PP 45 tahun 2024 terkait pengaturan VIsa Kunjungan • Perubahan dapat dilakukan dan dapat diatur melalui peraturan Kementerian Keuangan • Usulan untuk penurunan PNBP dapat dilakukan dengan melampirkan kajian penurunan ataupun penghapusan
6.	KEK Galang Batang	DJBC	**Penyepakatan mengenai kategorisasi jenis barang yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk**	• DJBC sedang melakukan pratinjau perihal pengertian barang habis pakai apakah terkait proses produksi atau tidak, untuk pakaian kerja dan alat kerja dapat dimasukkan sebagai asetkan dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun. • pengeluaran barang terdapat usulan pengubahan PPKEK untuk barang habis pakai akan ditinjau kembali seperti apakah APD bisa masuk barang modal atau tidak. • untuk kontainer bisa dianggap sebagai sarana pengangkut (harus ada di indonesia paling lama 3 bulan dan tidak didaftarkan dalam manifest), namun jika dia sebagai barang harus diberitahukan dalam manifest. • pada dasarnya KEK Galang Batang siap mengikuti sebagaimana peraturan yang berlaku

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

No.	KEK	KLASTER	KEBUTUHAN DUKUNGAN K/L	PERKEMBANGAN DAN USULAN TINDAK LANJUT
7.	KEK Tanjung Sauh	LNSW, DJBC	**Sistem CEISA untuk dokumen PPFTZ-02 belum terintegrasi secara langsung dengan INSW.**	• Sebagai solusi sementara, setiap SKEP Masterlist hanya dapat digunakan untuk satu kali pengiriman barang. • tahun 2025 akan diimplementasikan interkoneksi single dokumen antar fasilitas • sudah berjalan antar fasilitas antara KEK dan KPPB, namun antara KEK dan FTZ masih perlu dikaji lebih dalam lagi • Diputuskan yang masuk dari FTZ (PPFTZ 02) ke KEK menggunakan masterlist, namun pemasukan barang antara PPFTZ dan masterlist harus sama • barang dari FTZ perlu didalami terkait proses bisnisnya, untuk sementara solusinya 1 masterlist 1 PPFTZ.
8.	KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam	DJKN	**Percepatan pemindahan aset kepemilikan**	• secara umum mendukung, mengenai penghapusan bangunan sudah mendapatkan persetujuan • untuk penghapusan bangunan taman rusa, BP batam perlu untuk melengkapi dokumen • untuk alih status BMN, BP batam perlu melengkapi dokumen KPKNL • Aset BMN persyaratannya masih ada di BP Batam. saat ini sedang dilakukan penghapusan BMN untuk luas tanah 3ha. target februari 2025 akan dilakukan groundbreaking yang rencananya mengundang presiden RI. • Tanggapan (BC) obat sebagai barang konsumsi, pun jika dikonsumsi untuk pasien rawat jalan, jika obat merupakan resep dari dokter di KEK, namun dihabiskan diluar KEK. • Usulan BC: • yang diperhitungkan untuk konsumsi pasien rawat inap dapat diperhitungkan dalam periode tahunan yang dimasukkan pada masterlist (alt PP40/2021 belum dilakukan revisi) • dapat dibebaskan bea masuknya saja berdasarkan masterlist
9.	Seluruh KEK	Pajak (PP I), LNSW, DJBC	**Perbaikan sistem pengeluaran barang hasil produksi dari KEK ke TLDDP**	• Saat ini sudah ada tiga tempat piloting mekanisme pengeluaran ke TLDDP, tinggal bagaimana hasil monitoring dan evaluasi dari implementasi di tiga tempat tersebut • LNSW juga siap untuk melaksanakan sosialisasi IT inventory • Saat ini perlu dilakukan perbaikan keandalan sistem, karena ketika sistem dimandatorykan namun secara sistem masih ditemukan banyak kendala. • Setjen DN KEK akan melakukan rapat khusus tentang sistem, termasuk sinkronisasi dengan CEISA.

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS 2024


SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS ©2024



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024

INDONESIA SEZ

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS © 2024